



PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2024



PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Jln. Bhayangkara, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Sofifi - Maluku Utara 97852

Telp (0921) 31328572, 3124298

www.pt-malukuutara.go.id, e-Mail: ptsp.ptmalut@gmail.com

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami mempersembahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang atas berkat rahmat dan hidayahNya, sehingga laporan ini, dapat selesai dan disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas-tugas instansional pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI dan sebagai sumber informasi tentang kinerja instansi Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4506/SEK/OT1.6/XII/2024, tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

Terimakasih kami ucapkan atas kerja keras dan kerjasama seluruh aparat Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang telah digariskan dalam tugas dan fungsi Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya.

Sambil mengharapkan Ridho-Nya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024 ini kami sampaikan untuk menjadi bahan evaluasi kedepan.

Atas segala kekurangannya, kritikan dan saran yang sifatnya membangun, sangat kami harapkan.

Sofifi, 25 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara

The image shows the official circular stamp of the Pengadilan Tinggi Maluku Utara (High Court of North Maluku). The stamp is purple and contains the court's name in Indonesian and English, along with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Sufaji'.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. UMUM	1
B. VISI DAN MISI	3
C. MOTTO	4
D. DASAR HUKUM	4
E. RUANG LINGKUP	5
F. WAKTU PELAKSANAAN	6
BAB II KEADAAN PERKARA	7
A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM	7
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	7
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	8
B. PENYELESAIAN PERKARA	11
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	11
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	12
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.....	14
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi	14
5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi	15

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	15
1. Posbakum	15
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	17
3. Perkara Prodeo	17
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	
KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/PENDIDIKAN	19
A. Mutasi	31
B. Promosi	37
C. Pensiun	41
D. Diklat	42
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	46
A. Pengelolaan Keuangan	46
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	50
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	67
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	74
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	74
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	81
C. Inovasi Pelayanan Publik	114
BAB VI PENGAWASAN.....	171
A. Internal	171
B. Evaluasi	177

BAB VII PENUTUP.....	178
A. Kesimpulan	178
B. Rekomendasi	180

BAB I

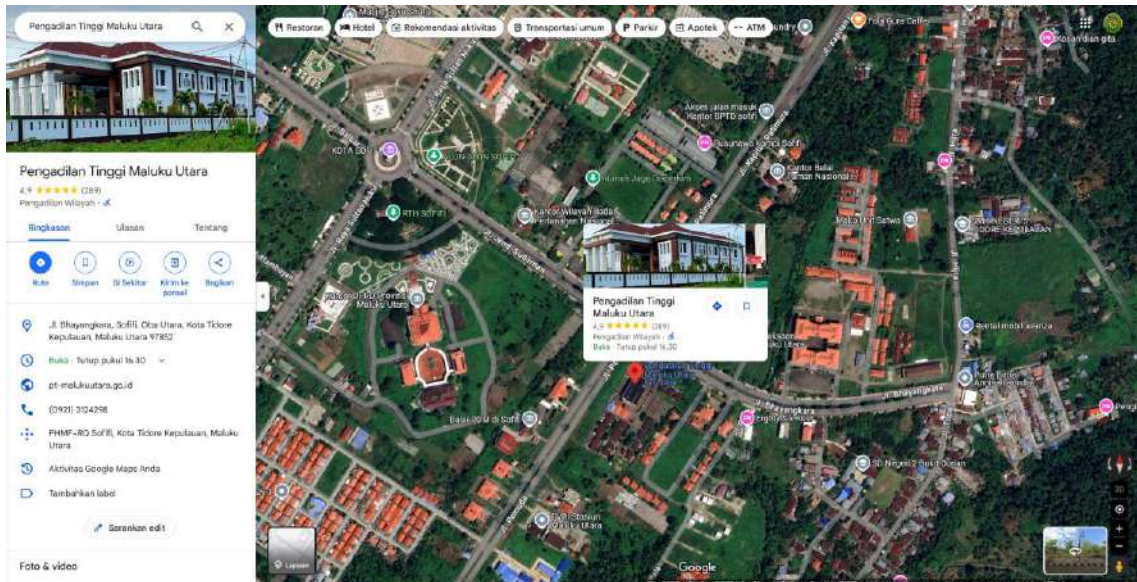
PENDAHULUAN

A. UMUM

Pengadilan Tinggi Maluku Utara merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 6 (enam) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Maluku Utara. Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Tinggi Maluku Utara secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengemban tugas pokok menegakkan hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Maluku Utara selain mempunyai fungsi yudikatif atau penyelesaian perkara, juga memiliki fungsi pengawasan, mengatur, dan administratif terhadap Pengadilan-pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya.

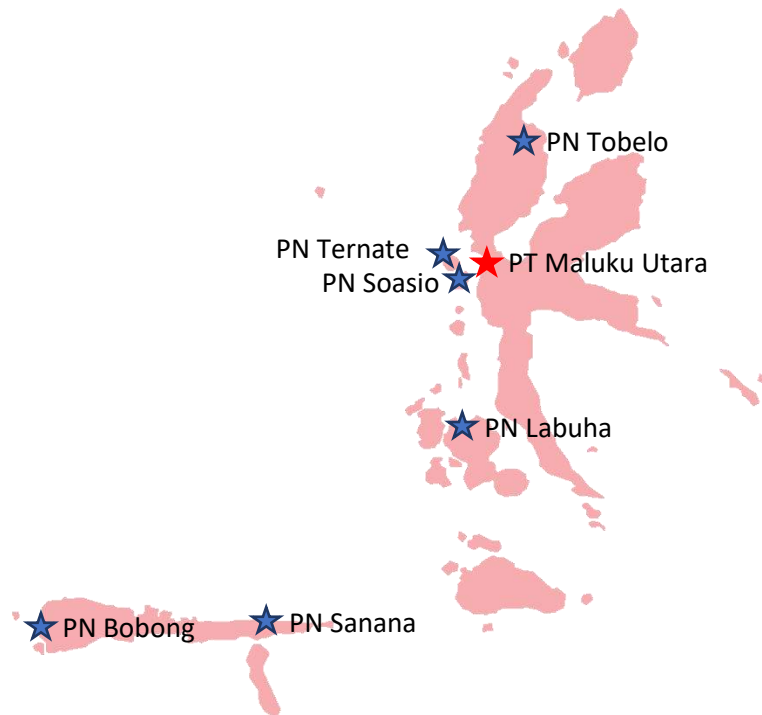
Dengan terbentuknya Provinsi Maluku Utara pada 4 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang No.46 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.6 Tahun 2003 dan atas dasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, akhirnya diresmikan berdirinya Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada 5 Maret 2005 yang berkedudukan sementara di Ternate menempati gedung Pemerintah Daerah Kota Ternate yang dipinjam pakaikan, mengingat kondisi gedung di Sofifi yang tidak memadai. Selanjutnya sesuai pasal 9, ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 1999, jo pasal 1 Undang-undang 11 tahun 2004, menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi, akhirnya dibangun gedung baru Pengadilan

Tinggi Maluku Utara di Sofifi dan terhitung tanggal 20 Desember 2018 Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpindah kantor di Ibukota Provinsi Maluku Utara di Sofifi, dengan alamat Jl. Bhayangkara, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.



Gambar 1.1. Peta Lokasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Saat ini Pengadilan Tinggi Maluku Utara membawahi 6 (enam) Pengadilan Negeri yakni Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA, Pengadilan Negeri Tobelo Kelas II, Pengadilan Negeri Soasio Kelas II, Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, Pengadilan Negeri Sanana Kelas II dan Pengadilan Negeri Bobong Kelas II.



Gambar 1.2. Peta Wilayah Maluku Utara Beserta Lokasi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara Yang Agung

Misi Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

C. MOTTO

Motto Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

“Bekerja Cerdas, Ikhlas, Tuntas dan Berkualitas dalam mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung dan Modern bertaraf International.”

dengan semboyannya : **KIE RAHA**

K : Komitmen

I : Inovatif

E : Edukatif

R : Responsif

A : Akuntabel

H : Humanis

A : Agamis

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah, sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007, tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan, baik para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 151A/KMA/SK/II/2011, Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor 4108/SEK/OTI.6/12/2024, tanggal 19 Desember 2024 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

E. RUANG LINGKUP

Dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini, mencakup pelaksanaan kegiatan administrasi teknis kepaniteraan dan pelaksanaan kegiatan administrasi umum kesekretariatan, serta pelaksanaan pelayanan publik dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan juga rekapitulasi seluruh kegiatan Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyusunan laporan mulai dilaksanakan sejak awal bulan Januari 2024, dengan mengumpulkan data pada masing-masing bagian dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan mengumpulkan laporan dari Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Salinan elektronik dokumen (*soft copy*) Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara, diterima di Pengadilan Tinggi Maluku Utara paling lambat pada minggu ketiga bulan Januari tahun 2025, dan *soft copy* Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Maluku Utara 2024, pada minggu keempat Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengkompilasi semua Laporan Pengadilan Tingkat pertama di bawahnya, dan pada minggu kedua sudah mengirim *soft copy*nya ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI melalui bit.ly/LAP_KEG_2024. Sebelum batas waktu akhir yang ditetapkan yaitu minggu ketiga bulan Februari 2025.

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024 dikelola dengan baik. Data perkara dilaporkan setiap bulan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Tabel 2.1 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

		Sisa		Jenis Perkara						
No	Pengadilan Negeri	Masuk	Pid.B	Pid.S/C	Pra	Pid.	Pid.	Pid. Tipikor	Jumlah	Ket
						Anak	Lalu Lintas			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ternate	Sisa 2023	34	0	0	0	0	18	52	*Tidak Termasuk Pidana LL
		Masuk 2024	223	31	8	8	10334	33	303	
2	Soasio	Sisa 2023	11	0	0	0	0	0	11	*Tidak Termasuk Pidana LL
		Masuk 2024	125	76	1	9	0	0	211	
3	Tobelo	Sisa 2023	4	0	0	0	0	0	4	*Tidak Termasuk Pidana LL
		Masuk 2024	92	5	2	1	0	0	100	
4	Labuha	Sisa 2023	5	0	0	0	0	0	4	*Tidak Termasuk Pidana LL
		Masuk 2024	49	5	0	2	2	0	58	
5	Sanana	Sisa 2023	7	0	0	0	0	0	7	*Tidak Termasuk Pidana LL
		Masuk 2024	49	17	1	3	4	0	74	
6	Bobong	Sisa 2023	0	0	0	0	0	0	0	*Tidak Termasuk Pidana LL
		Masuk 2024	20	2	1	2	0	0	25	
TOTAL 2024			585	136	13	25	10.340	33	797	

Tabel 2.2 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

No	Pengadilan Negeri	Sisa	Jenis Perkara					
		Masuk	PDT.G	PDT.GS	PDT.P	PDT.PLW	PDT.PHI	Jumlah
			1	2	3	4	5	6
1	Ternate	Sisa 2023	27	1	1	0	19	48
		Masuk 2024	62	21	170	4	4	261
2	Soasio	Sisa 2023	7	0	0	0	0	7
		Masuk 2024	25	6	20	0	0	51
3	Tobelo	Sisa 2023	34	2	0	0	0	36
		Masuk 2024	120	9	89	0	0	218
4	Labuha	Sisa 2023	10	0	0	0	0	10
		Masuk 2024	43	8	12	1	0	64
5	Sanana	Sisa 2023	2	0	0	0	0	2
		Masuk 2024	3	0	53	0	0	56
6	Bobong	Sisa 2023	0	0	0	0	0	0
		Masuk 2024	0	0	2	0	0	2
TOTAL 2024			303	46	346	5	4	707

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Tabel 2.3 Keadaan Perkara pada Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

No	Pengadilan Negeri	Jenis Perkara	Tingkat Upaya Hukum			
			Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Grasi
1	Ternate	PID + Tipikor	23+15	2+3	0+0	0
		PDT + PHI	22	3	0	0
2	Soasio	PID	14	7	1	0
		PDT	6	1	1	0
3	Tobelo	PID	15	6	1	0
		PDT	10	6	0	0
4	Labuha	PID	12	4	0	0
		PDT	4	7	0	0

5	Sanana	PID	12	3	0	0
		PDT	1	0	0	0
6	Bobong	PID	2	1	0	0
		PDT	0	0	0	0
TOTAL			136	43	3	0

Tabel 2.4 Keadaan Perkara Perdata Tingkat Banding yang diterima, diperiksa dan diputus Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

No.	PN Pengaju	Sisa	Masuk	Putus	Sisa
1	Ternate	2	22	23	1
2	Soasio	1	6	6	1
3	Tobelo	1	8	9	0
4	Labuha	3	4	7	0
5	Sanana	0	1	1	0
6	Bobong	0	0	0	0
Jumlah		7	41	46	2

Tabel 2.5 Keadaan Perkara Pidana Tingkat Banding yang diterima, diperiksa dan diputus Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

No.	PN Pengaju	Sisa	Masuk	Putus	Sisa
1	Ternate	0	23	23	0
2	Soasio	0	17	17	0
3	Tobelo	0	11	11	0
4	Labuha	0	11	11	0
5	Sanana	0	13	13	0
6	Bobong	0	2	2	0
Jumlah		0	77	77	0

Tabel 2.6 Keadaan Perkara Pidana Tipikor Tingkat Banding yang diterima, diperiksa dan diputus Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

No.	PN Pengaju	Sisa	Masuk	Putus	Sisa
1	Ternate	0	15	15	0
2	Soasio	0	0	0	0
3	Tobelo	0	0	0	0
4	Labuha	0	0	0	0
5	Sanana	0	0	0	0
6	Bobong	0	0	0	0
	Jumlah	0	15	15	0

Tabel 2.7 Keadaan Perkara Pidana Anak Tingkat Banding yang diterima, diperiksa dan diputus Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

No.	PN Pengaju	Sisa	Masuk	Putus	Sisa
1	Ternate	0	1	1	0
2	Soasio	0	1	1	0
3	Tobelo	0	0	0	0
4	Labuha	0	0	0	0
5	Sanana	0	0	0	0
6	Bobong	0	0	0	0
	Jumlah	0	2	2	0

Keterangan:

- a. Perkara sisa tahun 2023 sebanyak = 7 Perkara yaitu perkara Perdata masuk bulan Desember 2024.
- b. Perkara masuk tahun 2024 sebanyak = 135 Perkara yang terdiri dari:
 - 41 Perkara Perdata
 - 77 Perkara Pidana
 - 15 Perkara Pidana Tipikor
 - 2 Perkara Anak

- c. Jumlah beban tahun 2024 yaitu $7 + 135 = 142$ berkas.
- d. Jumlah perkara putus tahun 2024 sebanyak 140 berkas.
- e. Sisa perkara tahun 2023 sebanyak 7 berkas, merupakan beban tahun 2024.

Keadaan perkara tersebut, berdasarkan rencana kinerja tahun 2024, dengan sasaran strategis dan indikator kinerja dengan target 90% dan program kegiatan dengan target 98 perkara berdasarkan realisasi dan capaian tahun 2023. Maka realisasi dan capaian tahun 2024 ini 140 perkara dengan capaian yaitu 98,59% masuk dalam kategori **Sangat Baik** karena persentasenya diatas target 90%. Sedangkan diukur berdasarkan peningkatan manajemen peradilan dengan pagu anggaran rencana kinerja 2024 DIPA 03, target 98 perkara, maka realisasi capaian 140 perkara yaitu 98,59% masuk dalam kategori **Sangat Memuaskan**.

B. PENYELESAIAN PERKARA

Dalam penyelesaian perkara berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, yaitu penyelesaian perkara tingkat banding paling lama 3 (tiga) bulan terhitung penerimaan dan pendaftaran sampai dengan putus. Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menetapkan SOP sesuai SOP dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 268//KPT.W28-U/OT1.2/II/2024 tanggal 2 Januari 2024.

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara yang diputus pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.8 Jumlah sisa perkara yang diputus pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

No	Pengadilan	Jenis Perkara	Sisa
1	Ternate	Pidana	34
		Tipikor	9
		Perdata	18
2	Soasio	Pidana	26
		Perdata	7
3	Tobelo	Pidana	7
		Perdata	27
4	Labuha	Pidana	4
		Perdata	8
5	Sanana	Pidana	13
		Perdata	2
6	Bobong	Pidana	0
		Perdata	0

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.9 Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

No	Pengadilan Negeri	Jenis Perkara	Masuk	Putus	Sisa
1	Ternate	Pidana	223	223	34
		Tipikor	51	42	9
		Perdata	309	291	18
2	Soasio	Pidana	125	99	26
		Perdata	51	45	7
3	Tobelo	Pidana	100	93	7
		Perdata	218	191	27
4	Labuha	Pidana	58	54	4
		Perdata	64	56	8
5	Sanana	Pidana	74	61	13
		Perdata	56	54	2
6	Bobong	Pidana	25	25	0
		Perdata	2	2	0
TOTAL			1356	1236	155

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat capaian sasaran kerja dengan indikator kinerja masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Negeri Ternate: jumlah perkara masuk Perdata, Pidana dan Tipikor sebanyak 583 perkara dan jumlah perkara putus 556 perkara maka capaian kinerja adalah 95.37%.
- 2) Pengadilan Negeri Soasio: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 176 perkara dan jumlah perkara putus 144 perkara maka capaian kinerja adalah 81,82%.
- 3) Pengadilan Negeri Tobelo: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 318 perkara dan jumlah perkara putus 284 perkara maka capaian kinerja adalah 89.31 %.
- 4) Pengadilan Negeri Labuha: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 122 perkara dan jumlah perkara putus 110 perkara maka capaian kinerja adalah 90,16 %.
- 5) Pengadilan Negeri Sanana: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 130 perkara dan jumlah perkara putus 115 perkara maka capaian kinerja adalah 88.46%.
- 6) Pengadilan Negeri Bobong: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 27 perkara dan jumlah perkara putus 27 perkara maka capaian kinerja adalah 100 %.

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.10 Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

No	Pengadilan	Jenis Perkara	Tingkat Upaya Hukum		
			Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
1	Ternate	Pidana	208	223	231
		Tipikor	25	30	39
		Perdata	55	60	74
		PHI	23	1	23
2	Soasio	Pidana	111	118	125
		Perdata	17	17	17
3	Tobelo	Pidana	75	9	6
		Perdata	117	4	0
4	Labuha	Pidana	46	54	58
		Perdata	49	46	53
5	Sanana	Pidana	21	21	22
		Perdata	0	0	0
6	Bobong	Pidana	21	21	22
		Perdata	0	0	0
TOTAL			768	604	670

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi

Jumlah perkara Perdata yang berhasil melalui mediasi pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.11 Jumlah Perkara Perdata Melalui Mediasi pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

No	Pengadilan Negeri	Jenis Perkara	Masuk	Mediasi	Sisa
1	Ternate	Perdata	38	3	35
2	Soasio	Perdata	14	2	0
3	Tobelo	Perdata	41	6	35
4	Labuha	Perdata	43	1	42
5	Sanana	Perdata	0	0	0
6	Bobong	Perdata	0	0	0
TOTAL			136	12	112

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Jumlah perkara Anak yang berhasil melalui Diversi pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.12 Jumlah Perkara perdata melalui Diversi pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

No	Pengadilan Negeri	Jenis Perkara	Masuk	Diversi	Sisa
1	Ternate	Anak	1	1	0
2	Soasio	Anak	4	4	0
3	Tobelo	Anak	1	0	1
4	Labuha	Anak	2	1	1
5	Sanana	Anak	0	0	0
6	Bobong	Anak	0	0	0
TOTAL			8	6	2

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

1. Posbakum

Sesuai ketentuan Pasal 56 dan 57 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C UU 49 Tahun 2009, Pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 114 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh

bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pada tahun anggaran 2024, beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mendapatkan anggaran belanja jasa konsultan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2.10 Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Tingkat Pertama pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

No	Pengadilan Negeri	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah Layanan	%	LBH yang ditunjuk
1	Ternate	Rp.44.000.000	Rp.44.000.000	141	100%	POSBAKUMADIN Cabang Halmahera Utara
2	Soasio	Rp.36.000.000	Rp.35.242.500	312	97.90%	YLBH Sipakale Maluku Utara
3	Tobelo	Rp.44.000.000	Rp.43.907.160	676	99.97%	POSBAKUMADIN Halut
4	Labuha	Rp.36.000.000	Rp.32.967.000	66	91,58%	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara

5	Sanana	Rp24.000.000	Rp24.000.000	240 Jam	100%	YLBH Walima Sula
6	Bobong	Rp24.000.000	Rp24.000.000	240 Jam	100%	YLBH Sipakale

2. Sidang keliling

Pelaksanaan Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024 terangkum dalam table rincian sebagai berikut:

Tabel 2.11 Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Tingkat Pertama pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

No	Pengadilan Negeri	Pagu	Realisasi (Rp)	Jumlah Sidang	Prosentase (%)	Keterangan
1	Ternate	Rp313.707.000	Rp313.707.000	15	100%	44 Perkara
2	Soasio	Rp249.900.000	Rp249.890.000	6	100%	5 Perkara
3	Tobelo	Rp250.000.000	Rp248.560.000	32	99.42%	32 Perkara
4	Labuha	0	0	0	0	0
5	Sanana	Rp200.000.000	Rp199.896.000	8	99,95	13 Perkara
6	Bobong	0	0	0	0	0

3. Perkara Prodeo

Pada tahun anggaran 2024, pengajuan perkara prodeo pada pengadilan tingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Adapun rinciannya sebagai berikut:

*Tabel 2.12 Perkara Prodeo Pengadilan Tingkat Pertama dalam Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024*

No	Pengadilan Negeri	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Keterangan
1	Ternate	-	-	-	Anggaran telah dialihkan ke Kegiatan Sidang di Luar Gedung Pengadilan
2	Soasio	Rp.3.350.000	Rp.2.412.000	72%	-
3	Tobelo	0	0	0	-
4	Labuha	Rp.1.340.000	Rp328.000	24,48%	
5	Sanana	-	-	-	-
6	Bobong	0	0	0	0

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur peradilan sebagai sumber daya manusia memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Government*. Khususnya di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pengelolaan sumber daya manusia (Aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan.

Jumlah sumber daya manusia yang ada pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sumber Daya Manusia pada Wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA		
NO	NAMA	JABATAN
1.	H. AHMAD SHALIHIN, S.H., M.H.	KETUA PENGADILAN
2.	AISA HI MAHMUD, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI
3.	SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI
4.	SUDIRA, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI
5.	GLENNY JACOBUS LAMBERTH DE FRETES, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI
6.	MUSTAJAB, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI
7.	YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.	HAKIM TINGGI
8.	AGUS PANCARA, S.H., M.Hum.	HAKIM TINGGI
9.	DR. TIRTA WINATA, S.H., M.H.	HAKIM ADHOC TIPIKOR
10.	BUDIONO, S.H., M.H.	HAKIM ADHOC TIPIKOR

11.	LA JAMAL, S.H.	PANITERA
12.	FATIMA ALBAAR, S.AG., M.H.	SEKRETARIS
13.	TUTY INDAYANI, S.E.	KABAG UMUM DAN KEUANGAN
14.	PATMA, S.H., M.H.	KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
15.	YASIN UMAGAPI, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA
16.	MUHAMMAD IKBAL DAUD, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM
17.	NAHRA HUSEN, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA
18.	FERRY NITA, S.H.	PANITERA MUDA TIPIKOR
19.	SUMARTINI WARDIO	PANITERA PENGGANTI
20.	SULAIMAN TOMIA, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
21.	DEWI ZUBAIDAH, S.T.	KASUBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN
22.	ALIMUDIN BOLY, S.IP., M.H.	KASUBAG RENCANA DAN PROGRAM ANGGARAN
23.	FATAH MANAN	KASUBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
24.	MONALISA, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
25.	INDRAWATI HAJI AMIN IDRIS, S.SOS	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
26.	YENI RAHMAWATI, S.T.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
27.	M. NASIR JAFAR, S.HI.	ANALIS PERKARA PERADILAN
28.	SYAHRUDDIN, S.KOM.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
29.	SAMSUDIN USMAN, S.HI.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
30.	MUHAMMAD AL AKHIRUDDIN HAMSAH, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
31.	BAYU INDRIANTO, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
32.	ROSYID HARDIKA, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
33.	ADAM ADI PRADANY, S.E.	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
34.	HERLIAN DJUNAIDI, A.Md.	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

35.	SRI OKTIANINGSIH, A.Md. A.B.	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
36.	ADITYA AZHAR PRATAMA, A.Md. A.B	PENGELOLA KEPEGAWAIAN
37.	AZMI IBRAHIM, A.Md. A.K.P	PENGELOLA PERKARA
38.	ALDI NOVENDRA, A.Md.	PENGELOLA PERKARA
39.	FADLI, S.IP.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA
40.	RIDWAN KARIM	PPNPN
41.	MALIK MANABUNG	PPNPN
42.	ASIS IDRIS	PPNPN
43.	FADLI HANAFI	PPNPN
44.	NUR CHASANA	PPNPN
45.	NADIR HANAFI	PPNPN
46.	RAHMAN KALI HASAN LUBIS	PPNPN
47.	RAHMAN AFANDI	PPNPN
48.	ROSIHAN HAMZAH	PPNPN
49.	SAIFUL ALIMUDIN	PPNPN
50.	IDHAM HI. CHAIRUDDIN	PPNPN
51.	WA MARIAM	PPNPN

PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS I A		
NO	NAMA	JABATAN
1.	BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.	KETUA PENGADILAN
2.	YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.	WAKIL KETUA PENGADILAN
3.	BUDI SETIAWAN, S.H.	HAKIM
4.	KADAR NOH, S.H.	HAKIM
5.	IRWAN HAMID, S.H.	HAKIM
6.	ALBANUS ASNANTO, S.H., M.H.	HAKIM
7.	DENIHENDRA ST. PANDUKO, S.H., M.H.	HAKIM

8.	M IQBAL BOPENG, S.H.	HAKIM ADHOC PHI
9.	SAMHADI, S.H., M.H.	HAKIM ADHOC TIPIKOR
10.	R. MOH. YAKOB WIDODO, S.H., M.HUM.	HAKIM ADHOC TIPIKOR
11.	JAYADI MUJENIH, S.H.	HAKIM ADHOC PHI
12.	IRIANY SIPAYUNG, S.H.	PANITERA
13.	VERRA LOKOLLO, S.H.	SEKRETARIS
14.	HERLINA HERMANSYAH, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA
15.	JEFRI PRATAMA, S.H., M.H.	PANITERA MUDA PERDATA
16.	MELDA RENNY TANTI, S.H., M.H.	PANITERA MUDA PHI
17.	IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.KOM, S.H.	PANITERA MUDA TIPIKOR
18.	ASLAM, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM
19.	YULIANTINI BURHAN, S.KOM	KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA
20.	IBNU, S.T.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
21.	CHAIRUL DAHRI PAGULILI, S.KOM	KASUBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
22.	ZADRAK PALLY, S.H.	PANITERA PENGGANTI
23.	ENONG KAILUL	PANITERA PENGGANTI
24.	RUSLI, S.H.	PANITERA PENGGANTI
25.	YUVITALIA SYARI, S.H.	PANITERA PENGGANTI
26.	RATIH SOFIANA DAENGBARANG, S.H.	PANITERA PENGGANTI
27.	RUSTIANA MADIKOE, S.H.	PANITERA PENGGANTI
28.	ERNY HS. MAILAHA, S.H.	PANITERA PENGGANTI
29.	ABDUL HALIK BUAMONA, S.H.	PANITERA PENGGANTI
30.	FLORENCE NENCY MAHOKLORI, S.H.	PANITERA PENGGANTI
31.	FERAWATI, A.Md.	PANITERA PENGGANTI
32.	JULAIHA ABDUL KADIR, S.H.	PANITERA PENGGANTI
33.	LANNY ISMAIL, S.E.	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA

34.	RAHMAWATI DAROTA, A.Md.	PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR
35.	SAMSUDIN DANEL	JURUSITA
36.	DAHLAN LAFUKU, A.MD.	JURUSITA
37.	EDISON DUWILA, S.H.	JURUSITA
38.	ASMIYATI YUSUF, S.H.	JURUSITA
39.	SURIDA	JURUSITA
40.	SUSAN PUASA KHARIE	JURUSITA PENGGANTI
41.	SYAIFUL MANABUNG	JURUSITA PENGGANTI
42.	DIAN ASRIYANI, S.KOM.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
43.	NURASIA DARWIS, S.ST.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
44.	MAHRANI BALAKUM, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
45.	PUJI ASTUTI, A.Md.	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA
46.	ABI DAUD ALFARISI, S.E.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
47.	MOHAMMAD DENI SAPUTRA, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
48.	MUHAMMAD ADIB AFIQ, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
49.	TEGUH PRASETIO, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
50.	DEASY FRANTI ABDULKARIM, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
51.	MELIA ANDARI NADA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
52.	CHIKAL UTAMI PUTERI	PENGELOLA DATA DAN INFORMASI
53.	SUKARMAN WAIBOT	PPNPN
52.	SUGIMAN SAFRUDIN	PPNPN
53.	MAULANA SAMSUDIN	PPNPN
54.	FAHRIZAL A. SYAHJUAN	PPNPN
55.	SAFRIL AHMAD	PPNPN
56.	RISMAWATI LANAE	PPNPN
57.	ROSDIANA YUSMAN	PPNPN
58.	JULKIFLI MUKSIN	PPNPN
59.	FARMAN HASAN	PPNPN

60.	UCY WALLY, S.KOM.	PPNPN
61.	ABDUL HARIS A. MUSA, A.MD.KOM.	PPNPN
62.	RAHMAT SADEK	PPNPN
63.	DARWIN R ADAM	PPNPN

PENGADILAN NEGERI SOASIO KELAS II		
NO	NAMA	JABATAN
1.	RUDY WIBOWO, S.H., M.H.	KETUA PENGADILAN
2.	ASMA FANDUN, S.H., M.H.	WAKIL KETUA PENGADILAN
3.	UTORO DWI WINDARDI, S.H., M.H.	HAKIM
4.	MADE RIYALDI, S.H., M.KN.	HAKIM
5.	ZUHRO PUSPITASARI, S.H., M.H.	HAKIM
6.	HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H.	HAKIM
7.	ANNY SAFITRI SIREGAR, S.H.	HAKIM
8.	KEMAL SYAFRUDDIN, S.H.	HAKIM
9.	MUHAMMAD ABDUH ABAS, S.H.	PANITERA
10.	BAKHTIAR, S.E.	SEKRETARIS
11.	ALWI UMAR HANNY ALTING, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA
12.	JONES VICO PAAYS, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA
13.	SISWADI, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM
14.	NINING FARDIASIH M.SALEH, S.E.	KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
15.	RAODA BIN USMAN, S.T.	KASUBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
16.	SUKIMAN, A.Md.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
17.	SUHARTI KEMHAY, S.KOM., S.H.	PANITERA PENGGANTI
18.	SILVIA NINGSIH WALLY, S.H.	PANITERA PENGGANTI
19.	YUYUN RENHOAT, S.H.	PANITERA PENGGANTI
20.	MARLINA R. SALEH, S.H.	PANITERA PENGGANTI

21.	NOVRY KURNIATI, S.H.	PANITERA PENGGANTI
22.	HAMID SALAM	JURUSITA
23.	ROSMINA SALIM	JURUSITA
24.	NURBAITY SUKRI	JURUSITA
25.	SITI SOFIATUN, S.H.	JURUSITA PENGGANTI
26.	LISNAWATY	JURUSITA PENGGANTI
27.	THADY ALFAIDZIN, S.IP.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
28.	RAHMI, S.E.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
29.	MAHENDRA YULFITRA PURNAMA, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
30.	RAHMAT MUHAMMAD, S.T.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
31.	AGUS RIAN M. NUR, A.Md.	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA
32.	IRDIYANI TAIB	PPNPN
33.	A. RAHMAN UMAR	PPNPN
34.	PERIH HADI	PPNPN
35.	SOFIYAN DJAMRUN	PPNPN
36.	JAINUDIN ABDULLAH	PPNPN
37.	REZA KIAY MARDJO	PPNPN
38.	RAHMAT SALEH	PPNPN
39.	SITI DUNAWATI GAFARUDIN	PPNPN
40.	ASHARI	PPNPN
41.	ASRIYANTO A. RAHMAN	PPNPN
42.	MUHIDIN NURU	PPNPN
43.	KADER RADJANG	PPNPN
44.	MUHAMMAD TIRTO HAMID	PPNPN
45.	ZULKARNAEN	PPNPN

PENGADILAN NEGERI LABUHA KELAS II		
NO	N A M A	JABATAN
1.	WAHYUDINSYAH PANJAITAN, S.H., M.Hum.	KETUA PENGADILAN
2.	MANGULUANG, S.H., M.Kn.	HAKIM
3.	TITO SANTANO SINAGA, S.H	HAKIM
4.	KARTIKA WATI, S.H.	HAKIM
5.	GALANG ADHE SUKMA, S.H.	HAKIM
6.	M. SYAHRUL RATUELA, S.H.	PANITERA
7.	MA'RIFIN ARIF, S.KOM	SEKRETARIS
8.	FAIZAL ALI, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA
9.	DEDY UMAAYA	PANITERA MUDA PERDATA
10.	MOHTAR SOUWAKIL, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM
11.	NURLIA A. JUSUF, S.E.	KASUBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
12.	M. RIDWAN UMAGAP, S.H.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
13.	RAHMA, S.H.	PLT. KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA
14.	MUHAMMAD HANGGA, S.H.	PANITERA PENGGANTI
15.	ABU DZAR ALGHIFARI, S.H.	PANITERA PENGGANTI
16.	KAMARUDDIN SOLISA, S.H.	PANITERA PENGGANTI
17.	HALIL SALIM, S.H.	PANITERA PENGGANTI
18.	SILVANI D.C. SYARANAMUAL, S.H.	PANITERA PENGGANTI
19.	IMELDA ERUBUN, S.Pi.	JURUSITA
20.	ARMAN HI SYAFI, S.Ip.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
21.	RIVAN KURNIAWAN, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
22.	FAUZI PERDANA, S.E.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
23.	DIKI ABIDIN	CPNS/ANALIS PERKARA PERADILAN
24.	OBET MAYA JAWATE	PPNPN

25.	REZA G. HAMZAH, S.KOM	PPNPN
26.	KARMAN KADER	PPNPN
27.	RISWAN JAFAR	PPNPN
28.	SALMA ABDULLAH, S.PI.	PPNPN
29.	SANDRA HATALAIBESSY	PPNPN
30.	SANAWIVADA AK YAHYA, S.H.	PPNPN
31.	JASLIN ARIFIN, S.T.	PPNPN
32.	RUSMAN S. RAJAK	PPNPN
33.	SAHRIL ABU BAKAR	PPNPN

PENGADILAN NEGERI TOBELO KELAS II		
NO	NAMA	JABATAN
1.	R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.	KETUA PENGADILAN
2.	FERDINAL, S.H., M.H.	WAKIL KETUA PENGADILAN
3.	HERDIAN E. PUTRAVIANTO, S.H., M.H.	HAKIM
4.	HENDRA WAHYUDI, S.H.	HAKIM
5.	MOHAMMAD SALIM HAFIDI, S.H.	HAKIM
6.	AZHARUL N. PUTRA PATURUSI, S.H.	HAKIM
7.	ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.	PANITERA
8.	ULFA MAILANI, S.E.	SEKRETARIS
9.	NOBERT HANGEWA	PANITERA MUDA PERDATA
10.	MARTHINA BUNGIN, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA
11.	ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM
12.	DONYLISAN F. ROMKENY, S.H., M.H.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
13.	IKSAN, A.Md.	KASUBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
14.	NURJAIMA MAULAGI, S.H.	PANITERA PENGGANTI
15.	MINSAR MANABUNG, S.H.	PANITERA PENGGANTI

16.	SOLEMAN LA ADI, S.H.	PANITERA PENGGANTI
17.	ARI IRWANTO, S.H.	PANITERA PENGGANTI
18.	RAFLI SALDI, S.H.	PANITERA PENGGANTI
19.	MUHAMMAD I. PONO	JURUSITA
20.	ALIFTYA, S.H.	JURUSITA
21.	CAROLINE ROSALINA LESSIL	JURUSITA
22.	NOLA LEONORA LEUNUFNA	JURUSITA PENGGANTI
23.	ELEONORA SELIFE	JURUSITA PENGGANTI
24.	AGUNG MUJTABA, S.E.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
25.	HELTY DJANGU	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
26.	YULISTINA YOTLELY	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
27.	ISMAN HANAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
28.	GOM BANUARAN, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
29.	EVITA KARETJI, S.H.	PPNPN
30.	SUPRIYADI, S.Pd.	PPNPN
31.	MARLENI HULUTANI	PPNPN
32.	ARDYANTO BELIAN ALI	PPNPN
33.	ERIKSON PALIAS	PPNPN
34.	MUHAMMAD LINGKUNGAN	PPNPN
35.	HUSEN TUHAREA	PPNPN

PENGADILAN NEGERI SANANA KELAS II		
NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dr. TITO ELIANDI, S.H., M.H.	KETUA PENGADILAN
2.	IQBAL SALEH SYAHRONI, S.H., M.KN.	HAKIM
3.	AUFARRIZA MUHAMMAD, S.H., M.KN.	HAKIM
4.	MUHAMMAD FADLLULLAH, S.H.	HAKIM
5.	FEBRIAN RAMADHAN, S.H.	HAKIM

6.	EDGAR PRATAMA HANIBAL, S.H.	HAKIM
7.	FAHRUDIN PORA, S.H.	PANITERA
8.	AMAL SYAH, S.H.	SEKRETARIS
9.	ISRAMAN AMANTO, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA
10.	SHINTA HAJI ALI, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM
11.	SOESANTO GAILEA, S.KOM.	KASUBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
12.	NURLITA, A.Md.	PLT. KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA
13.	HAIRIL ABDULLAH, A.MD.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
14.	SUPRIADI SUKRI	JURUSITA
15.	MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
16.	CHENLY MARTUA SIHOMBING, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
17.	FERI ARUMAJAYA, S.H., M.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
18.	FIRMAN PRASASTI	JURUSITA PENGGANTI
19.	RANO KAUNAR	JURUSITA PENGGANTI
20.	NUR ARFA BUAMONA	PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA
21.	ADRI MUHAMAD	PPNPN
22.	ZULFA EMBISA	PPNPN
23.	YUNI KURNIAWATI RAMLI, S.S.	PPNPN
24.	APRILIANI MUHAMAD, S.IP.	PPNPN
25.	AMIYUDIN FOKAAYA	PPNPN
26.	ZULFIKRI YOISANGADJI	PPNPN
27.	RAFIUDIN DUWILA	PPNPN
28.	UKEN UMALEKHOA	PPNPN

PENGADILAN NEGERI BOBONG KELAS II		
NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. SYAMSUNI, SH., M.Kn.	KETUA
2.	WILLY MARSAOR, S.H.	HAKIM
3	HERMAN, S.H.	HAKIM
4	FIKRAN WARNANGAN, S.H.	HAKIM
5	PANUSUNAN, S.H.	HAKIM
6	ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H.	HAKIM
7	KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H., M.H.	PANITERA
8	BUDYSTIRA MOHAMMAD TOFAN, S.H.	SEKRETARIS
9	M. ICHSAN SADARALAM,SH.	PANITERA MUDA PIDANA
10	ARIF TENGA,SH.	PANITERA MUDA HUKUM
11	EKO WALDY,SH.	PANITERA MUDA PERDATA
12	LA ODE HARJET ODE ISA, S.Si.	KASUBAG KEPGAWAIAN, ORGANISASI & TATA LAKSANA
13	RIDONALDJO SAMODARA, S.KOM.	PLT. KASUBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
14	ABDULLAH MAMADOA, S.Pd., M.Pd.	PLT. KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
15	NURASIH DWI WULANDARI, S.H.	PANITERA PENGGANTI
16	BADARUDIN LA ODE, S.I.P.	JURUSITA
17	AFANDI UMASANGAJI	PPNPN
18	SYAHDIN FATMONA, A.Md.	PPNPN
19	MARNI UMALEKHAY, S.T.	PPNPN
20	IRWAN KUMKELO, S.H.	PPNPN
21	ZALDY, Amd.Kom.	PPNPN
22	FAHRI SANGAJI, S.H.	PPNPN
23	SALMAN UMAWAITINA, A.Md.	PPNPN
24	AQSA PRAYOGA	PPNPN
25	M. TARIK	PPNPN
26	RESTU DINDA MAHARANI	PPNPN

27	MAYA ANGGRIANI	PPNPN
28	WULAN SARI DEBANG	PPNPN

1. MUTASI

Mutasi Pegawai pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara terdiri dari mutasi masuk dan mutasi keluar. Pada tahun 2024, mutasi Pegawai yang masuk dalam Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	YUSRIANSYAH, S.H., M.HUM.	196308051996031001	Hakim PN Banjarmasin	Hakim Tinggi PT Maluku Utara
2	AGUS PANCARA, S.H., M.HUM.	196508081996031002	Hakim PN Palembang	Hakim Tinggi PT Maluku Utara
3	LA JAMAL, S.H.	197301211993031002	Panitera PN Sumber	Panitera PT Maluku Utara
4	DIAN ASRIYANI, S.KOM.	198308132009042005	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Ternate	Kasubag Kepegawaian dan Teknologi Informasi PT Maluku Utara
5	SULAIMAN TOMIA, S.H.	198610152011011014	Kasubag Umum dan Keuangan PN Labuha	Kasubag Kepegawaian dan Teknologi Informasi PT Maluku Utara
6	INDRAWATI HAJI AMIN IDRIS, S.SOS.	198412142002122001	Pegawai Pemkab Halmahera Barat	Penata Layanan Operasional PT Maluku Utara
7	YENI RAHMAWATI, S.T.	198406062011012004	Pegawai Pemkot Ternate	Penata Layanan Operasional PT Maluku Utara
8	M. NASIR JAFAR, S.HI.	199106082015011002	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama Pemprov Maluku Utara	Analisis Perkara Peradilan PT Maluku Utara
9	SYAHRUDDIN, S.KOM.	198710192011011003	Pegawai Pemprov Maluku Utara	Penata Layanan Operasional PT Maluku Utara
10	SAMSUDIN USMAN, S.HI.	199101012015011001	Pegawai Pemprov Maluku Utara	Penata Layanan Operasional PT Maluku Utara
11	MUHAMMAD AL AKHIRUDDIN HAMSAH, S.H.	198206232005011006	Pegawai Pemprov Maluku Utara	Analisis Perkara Peradilan PT Maluku Utara

12	ROSYID HARDIKA, S.H.	199908182024051001	-	Analisis Perkara Peradilan PT Maluku Utara
13	HERLIAN DJUNAIDI, A.Md.	198802082014032001	Pegawai Pemprov Maluku Utara	Pengolah Data dan Informasi PT Maluku Utara

Tabel 3.3 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Negeri Ternate

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	BUDI SETYAWAN S.H., M.H.	196810231996031001	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten	Ketua Pengadilan Negeri Ternate
2	YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.	197103111994931002	Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate
3	DENIHENDRA ST. PANDUKO, S.H., M.H.	198108192007041001	Hakim Pengadilan Negeri Bangko	Hakim Pengadilan Negeri Ternate
4	JAYADI MUJENIH, S.H.	-	-	Hakim Adhoc PHI Pengadilan Negeri Ternate
5	RATIH S. DAENG BARANG, S.H.	198608122011012010	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soa Sio	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate
6	ASLAM, S.H.	198602112009121003	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sanana	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Ternate
7	DIAN ASRIYANI, S.KOM.	198308132009042005	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara	Penata Layanan Operasional Pengadilan Negeri Ternate
8	SURIDA	198609132009042004	Jurusita Pengadilan Negeri Ambon	Jurusita Pengadilan Negeri Ternate
9	IBNU, S.T.	198707192011011008	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Ternate
10	YUVITALIA SYARI, S.H.	198507092009122006	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate

Tabel 3.4 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Negeri Soasio

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	RAODA BIN USMAN, S.T.	198710102011012024	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Tobelo	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Soa Sio
2	SUKIMAN, A.Md.	198311112009041007	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bobong	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Soa Sio
3	SILVIA NINGSIH WALLY, S.H.	199005252012122002	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soa Sio
4	THADY ALFAIDZIN, S.IP.	199711222020081001	Pemkab Halmahera Barat	Penata Layanan Operasional Pengadilan Negeri Soa Sio
5	RAHMAT MUHAMMAD, S.T.	198405152014091002	Pemkab Halmahera Barat	Penata Layanan Operasional Pengadilan Negeri Soa Sio

Tabel 3.5 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Negeri Tobelo

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H.	197306012006041002	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala	Ketua Pengadilan Negeri Tobelo
2	IKSAN, A.Md.	198409112009041004	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Negeri Sanana	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Tobelo
3	ISMAL HANAN	198607162012121002	Pemprov Maluku Utara	Pengadministrasi Perkantoran Pengadilan Negeri Tobelo

Tabel 3.6 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Negeri Labuha

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	WAHYUDINSYAH PANJAITAN, S.H., M.HUM	198003242002121002	Hakim PN Pangkal Pinang	Wakil PN Labuha

2	MOHTAR SOUWAKIL, S.H.	197010251993031003	Panitera Muda Pidana PN Tobelo	Panitera Muda Hukum PN Labuha
3	M. SYAHRUL RATUELA, S.H.	198104182009041008	Panitera PN Sanana	Panitera PN Labuha
4	HALIL SALIM, S.H.	197504102014081002	Jurusita Pengganti PN Ternate	Panitera Pengganti PN Labuha
5	SILVANI D. C. SYARANAMUAL, S.H.	198002212012122002	Kasubag PTIP PN Tobelo	Analisis Perkara Peradilan PN Labuha

Tabel 3.7 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Negeri Sanana

NO.	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1.	FERI ARUMAJAYA S.H., M.H.	198607232010011004	Pemkab Halmahera Barat	Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sanana
2.	NURLITA, A.Md.	198607232011012005	Pemkab Halmahera Barat	Pengolah Data dan Informasi Pengadilan Negeri Sanana

Tabel 3.8 Mutasi Pegawai Masuk pada Pengadilan Negeri Bobong

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1.	Dr. SYAMSUNI, S.H., M.Kn.	197701162002121004	Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bobong
2.	ABDULLAH MAMADOA, S.Pd., M.Pd.	198004072009031001	Pemkab Halmahera Barat	Plt. Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bobong
3.	RIDONALDJO SAMODARA, S.KOM.	198206262014091001	Pemkab Halmahera Barat	Plt. Kasubag Umum dan Keunagan Pengadilan Negeri Bobong

Sedangkan untuk mutasi Pegawai keluar Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	LUKMAN BACHMID, S.H., M.H.	195708201983031022	Wakil Ketua PT Maluku Utara	Wakil Ketua PT Gorontalo
2	CHRISTOPHER SURYA SALIM, S.H.	199802182022031006	Analisis Perkara Peradilan PT Maluku Utara	Calon Hakim PN Cianjur
3	MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H., M.H.	198005242008051001	Hakim Yustisial PT Maluku Utara	Hakim PN Bau-bau
4	IBNU, S.T.	198707192011011008	Kasubag Kepegawaian dan Teknologi Informasi PT Maluku Utara	Kasubag Umum dan Keuangan PN Ternate
5	MUHAMMAD FADHLI, A.Md.	199410152020121006	Pengolah Data dan Informasi PT Maluku Utara	Pengolah Data dan Informasi PT Palembang
6	ANDREAN PERDANA KUSUMA, A.Md.Ak.	199804232020121006	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PT Maluku Utara	Pengolah Data dan Informasi PN Semarang
7	DIAN ASRIYANI, S.KOM.	198308132009042005	Kasubag Kepegawaian dan Teknologi Informasi PT Maluku Utara	Penata Layanan Operasional PN Ternate

Tabel 3.10 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Negeri Ternate

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	ROMMEL F. TAMPUBOLON, S.H.	196904241996031002	Ketua Pengadilan Negeri Ternate	Ketua Pengadilan Negeri Sragen
2	HARYANTA, S.H., M.H.	196503261986031002	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
3	KHADIJAH A. RUMALEAN, S.H.	198310142007042001	Hakim Pengadilan Negeri Ternate	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barru
4	DIAN ASRIYANI, S.KOM.	198308132009042005	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana Pengadilan Negeri Ternate	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara
5	EARLY HANDAYANI, S.H.	198108162008052001	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bau Bau

6	HALIL SALIM, S.H.	197504102014081002	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha
---	-------------------	--------------------	--	--

Tabel 3.11 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Negeri Soasio

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	YOHAN DAVID MISEOR, S.H.	199102272002031005	Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Soa Sio	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan
2	GUFRAN ZAKKY, S.HI.	199305042019031008	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soa Sio	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang

Tabel 3.12 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Negeri Tobelo

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1.	RAODA BIN USMAN, S.T.	198710102011012024	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Negeri Tobelo	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Soa Sio
2.	SILVANI D.C. SYARANAMUAL, S.H.	198002212012122002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Tobelo	Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Labuha
3.	SLAMET BUDIONO, S.H., M.H.	197806202001121001	Ketua Pengadilan Negeri Tobelo	Hakim Pengadilan Negeri Malang

Tabel 3.13 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Negeri Labuha

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	EDWARD, S.H., M.H.	197704302001121002	Ketua PN Labuha	Hakim PN Palembang
2	SILVIA NINGSIH WALI, S.H.	199005252012122002	Panitera Pengganti PN Labuha	Panitera Pengganti PN Soa Sio

3	KURNIAWAN BAYU SETIAJI, S.H.	199705242022031005	CPNS / Analis Perkara Peradilan PN Labuha	Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
4	KHARIS M. HARISUN, S.H.	197208232006041002	Panitera PN Labuha	Panitera PN Sorong
5	SULAIMAN TOMIA, S.H.	198204142011011011	Kasubag Umum dan Keuangan PN Labuha	Kasubag Kepegawaian dan Teknologi Informasi PT Maluku Utara

Tabel 3.14 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Negeri Sanana

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1.	MUHAMMAD SYAHRUL RATUELA, S.H.	198104182009041008	Panitera Pengadilan Negeri Sanana	Panitera Pengadilan Negeri Labuha
2.	IKSAN, A.Md.	198409112009041004	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Negeri Sanana	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Tobelo
3.	ASLAM, S.H.	198602112009121003	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sanana	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Ternate
4	MARGA AREA REFANGGA, S.E.	199602032019031004	Penata Layanan Operasional Pengadilan Negeri Sanana	Penata Layanan Operasional Pengadilan Negeri Madiun
5	DWianto JATI SUMIRAT, S.H.	197711182001121004	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanana	Ketua Pengadilan Negeri Serui

Tabel 3.15 Mutasi Pegawai Keluar pada Pengadilan Negeri Bobong

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	SUHENDRA SAPUTRA, S.H., M.H.	197209122005021001	Ketua Pengadilan Negeri Bobong	Ketua Pengadilan Negeri Luwuk

2. PROMOSI

Secara teknis, promosi bagi Pegawai didasarkan pada Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dan

Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 2003 sedangkan wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara internal di lingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam KMA 125 tahun 2009, Pengangkatan dalam jabatan Hakim, Ketua/Wakil Ketua didasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2002, dan untuk pengangkatan dalam jabatan April 003 didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI nomor 13 tahun 2002 dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

- a. Pengusulan promosi kenaikan pangkat untuk tahun 2024 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.16 Promosi Kenaikan Pangkat dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG			
		LAMA	TMT	BARU	TMT
1	GLENNYJACOBUS LAMBERTH DE FRETES, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1 April 2020	Pembina Utama (IV/e)	1 April 2024
2	JUANDA WIJAYA, S.H.	Penata Tingkat I (III/d)	1 April 2019	Pembina (IV/a)	1 Agustus 2024
3	LA JAMAL, S.H.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 April 2020	Pembina Utama Muda (IV/b)	1 April 2024
4	SYAHRUDDIN, S.KOM.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 April 2016	Penata (III/c)	1 Juni 2024
5	ANDREAN PERDANA KUSUMA, A.Md.Ak.	Pengatur (II/c)	1 Desember 2020	Pengatur Tingkat I (II/d)	1 Desember 2024
6	MUHAMMAD HANGGA, S.H.	Penata Muda (III/a)	1 April 2020	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 April 2024
7	HALIL SALIM, S.H.	Penata Muda (III/a)	1 April 2020	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 April 2024
8	RIVAN KURNIAWAN, S.H.	Penata Muda (III/a)	1 Desember 2020	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 Desember 2024

9	ABU DZAR ALGHIFARI, S.H.	Penata Muda (III/a)	1 Desember 2020	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 Desember 2024
10	EKO WALDY, S.H.	Penata Muda (III/a)	1 April 2020	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 April 2024
11	ARIF TENGA, S.H.	Penata Muda (III/a)	1 April 2020	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 April 2024
12	NURASIH DWI WULANDARI, S.H.	Penata Muda (III/a)	1 Desember 2020	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 Desember 2024
13	THADY ALFAIDZIN, S.IP.	Penata Muda (III/a)	1 Agustus 2020	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 Agustus 2024
14	MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS, S.H.	Penata Muda (III/a)	1 Desember 2020	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 Desember 2024
15	NOBERT HANGEWA, S.H.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 Oktober 2018	Penata (III/c)	1 Juni 2024
16	MINSAR MANABUNG, S.H.	Penata Muda (III/a)	1 April 2020	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 April 2024
17	AGUNG MUJTABA, S.E.	Penata Muda (III/a)	1 Desember 2020	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 Desember 2024
18	BUDI SETIAWAN, S.H.	Pembina (IV/a)	1 April 2020	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 April 2024
19	RUSTIANA MADIKOE, S.H.	Penata Muda Tingkat I S(III/b)	1 April 2020	Penata (III/c)	1 April 2024
20	EDISON DUWILA, S.H.	Penata Muda (III/a)	1 April 2020	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 April 2024
21	ABD HALIK BUAMONA, S.H.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 Oktober 2020	Penata (III/c)	1 Oktober 2024

b. Pengusulan promosi menduduki jabatan di lingkungan Pengadilan

Tinggi Maluku Utara secara keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 3.17 Promosi Menduduki Jabatan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

NO	NAMA	NIP	JABATAN/UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
1	IBNU, S.T.	198707192011011008	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Ternate
2	WAHYUDINSYAH PANJAITAN, S.H., M.HUM.	198003242002121002	Hakim PN Pangkal Pinang	Wakil Ketua PN Labuha
3	MOHTAR SOUWAKIL, S.H.	197010251993031003	Panitera Muda Pidana PN Tobelo	Panitera Muda Hukum PN Labuha
4	MUHAMMAD SYAHRUL RATUELA, S.H.	198104182009041008	Panitera PN Sanana	Panitera PN Labuha
5	HALIL SALIM, S.H.	197504102014081002	Jurusita Pengganti PN Ternate	Panitera Pengganti PN Labuha
6	KAMARUDDIN SOLISA, S.H.	198605152012121005	Jurusita PN Labuha	Panitera Pengganti PN Labuha
7	SULAIMAN TOMIA, S.H.	198610152011011014	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Labuha	Kasubag Umum dan Keuangan PN Labuha
8	NURLIA A. JUSUF, S.E.	197805072012122002	Kasubag Umum dan Keuangan PN Labuha	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Labuha
9	WAHYUDINSYAH PANJAITAN, S.H., M.HUM.	198003242002121002	Wakil Ketua PN Labuha	Ketua PN Labuha
10	SILVANI DORIS SYARANAMUAL, S.H.	198002212012122002	Analisis Perkara Peradilan PN Labuha	Panitera Pengganti PN Labuha
11	SULAIMAN TOMIA, S.H.	198610152011011014	Kasubag Umum dan Keuangan PN Labuha	Kasubag Kepegawaian dan Teknologi Informasi PT Maluku Utara
12	NURLIA A. JUSUF, S.E.	197805072012122002	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Labuha	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan PN Labuha
13	MUHAMMAD RIDWAN UMAGAP, S.H.	198201232002121004	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan PN Labuha	Kasubag Umum dan Keuangan PN Labuha
14	Dr. SYAMSUNI, S.H., M.Kn.	197701162002121004	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bobong	Ketua Pengadilan Negeri Bobong

15	RAODA BIN USMAN, S.T.	19871010201101 2024	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Negeri Tobelo	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Soa Sio
16	NINING FARDIASIH M. SALEH, S.E.	19820515200912 2003	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Soa Sio	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Negeri Soa Sio
17	SUKIMAN, A.Md.	19831111200904 1007	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bobong	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Soa Sio
18	SILVIA NINGSIH WALLY, S.H.	19900525201212 2002	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soa Sio
19	R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H.	19730601200604 1002	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala	Ketua Pengadilan Negeri Tobelo
20	IKSAN, A.Md.	19840911200904 1004	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Negeri Sanana	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Tobelo
21	MUHAMMAD I. PONO	19780620200212 1005	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo	Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo
22	CAROLINE R. LESSIL	19740212200604 2003	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo	Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo
23	NOLA L. LEUNUFNA	19830727201408 2002	Bendahara Penerimaan Pengadilan Negeri Tobelo	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo
24	ELEONORA SELIFE	19800923201408 2002	Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Tobelo	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo

3. Pensiun

Pada tahun 2024 telah dikirimkan usulan pensiun sebanyak 3 (tiga) orang Pegawai, Pegawai diusulkan kenaikan pangkat pengabdian sekaligus pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun. Adapun nama Pegawai yang diusulkan pensiun tersebut antara lain:

Tabel 3.18 Usul Pensiun pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	JENIS USULAN PENSIUN	TMT
1	KEITEL VON ESMTER, S.H./ 196202021986031000	Pembina Utama Madya (IV/d)	Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara	Pemberhentian Dengan Hormat dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Dengan Golongan IV/e	1 Maret 2024
2	RAMLI RUMONIN / 196604131989051000	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Jurusita Pengadilan Negeri Ternate	Pemberhentian Dengan Hormat dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Dengan Golongan III/c	1 Mei 2024
3	ABDULLAH UMAR / 196605221993031000	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Soa Sio	Pemberhentian Dengan Hormat dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Dengan Golongan III/d	1 Juni 2024

4. DIKLAT

Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada, pada tahun 2024 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mengirimkan Pegawai untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Secara keseluruhan data Pegawai Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Diklat Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

NO	PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI	SDM YANG DI USULKAN	ASAL SATUAN KERJA	WAKTU PELAKSANAAN
1	PELATIHAN SERTIFIKASI LINGKUNGAN HIDUP BAGI HAKIM TINGKAT PERTAMA PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA SELURUH INDONESIA	1. WAHYUDINSYAH PANJAITAN, S.H., M.HUM. 2. R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H.	PENGADILAN NEGERI LABUHA PENGADILAN NEGERI TOBELO	25 NOVEMBER 2024 – 17 DESEMBER 2024
2	BIMBINGAN TEKNIS PILOTING TAHAP III PELAKSANAAN PENYAMPAIAN DAN VALIDASI LPJ BENDAHARA MELALUI APLIKASI SAKTI	1. RAHMA, S.H. 2. SUPRIADI SUKRI	PENGADILAN NEGERI LABUHA PENGADILAN NEGERI SANANA	29 FEBRUARI – 1 MARET 2024

		3. AGUNG MUJTABA, S.E. 4. ELEONORA SELIFE 5. ANDREAN PERDANA KUSUMA, A.Md.Ak. 6. LANNY ISMAIL, S.E. 7. RAHMAWATI DAROTA, A.Md.	PENGADILAN NEGERI TOBELO PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA PENGADILAN NEGERI TERNATE	
3	PELATIHAN PELAYANAN PRIMA DAN LAYANAN DISABILITAS UNTUK PETUGAS PTSP	1. RIVAN KURNIAWAN, S.H. 2. FAUZI PERDANA, S.E. 3. NURASIH DWI WULANDARI, S.H. 4. MARNI UMALEKHAY 5. EVITA KARETJI, S.H. 6. MUHAMMAD LINGKUNGAN	PENGADILAN NEGERI LABUHA PENGADILAN NEGERI BOBONG PENGADILAN NEGERI TOBELO	13 JUNI 2024
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LATSAR CPNS GOL. III	1. DIKI ABIDIN, S.H. 2. MAHENDRA YULFITRA PURNAMA, S.H. 3. GOM BANUARAN, S.H. 4. ROSYID HARDIKA, S.H. 5. M. DENI SAPUTRA, S.H. 6. M. ADIB AFIQ, S.H. 7. TEGUH PRASETIO, S.H.	PENGADILAN NEGERI LABUHA PENGADILAN NEGERI SOA SIO PENGADILAN NEGERI TOBELO PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA PENGADILAN NEGERI TERNATE	9 SEPTEMBER – 21 DESEMBER 2024
5	BIMBINGAN TEKNIS KEGIATAN UJIAN KELAYAKAN DAN KEPATUHAN BAGI PANITERA PENGADILAN KELAS 1B	MUHAMMAD SYAHRUL RATUELA, S.H.	PENGADILAN NEGERI LABUHA	2 OKTOBER – 4 OKTOBER 2024
6	PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BMN	1. SULAIMAN TOMIA, S.H. 2. BUDYSTIRO M. TOFAN, S.H. 3. FIRMAN PRASASTI 4. DONYLISAN F. ROMKENY, S.H., M.H. 5. ADAM ADI PRADANY, S.E. 6. SRI OKTIANINGSIH, A.Md.A.B. 7. CHIKAL UTAMI PUTERI, A.Md.Ak. 8. LANNY ISMAIL, S.E.	PENGADILAN NEGERI LABUHA PENGADILAN NEGERI BOBONG PENGADILAN NEGERI SANANA PENGADILAN NEGERI TOBELO PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA PENGADILAN NEGERI TERNATE	20 NOVEMBER – 22 NOVEMBER 2024
7	PELATIHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENATAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA	1. RAHMA, S.H. 2. ARMAN HI SAFI, S.IP.	PENGADILAN NEGERI LABUHA	25 NOVEMBER – 28 NOVEMBER 2024

8	PELATIHAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS SECARA DARING (ONLINE) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI TA. 2024	1. Dr. SYAMSUNI, S.H., M.Kn. 2. ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H. 3. WILLY MARSAOR, S.H. 4. PANUSUNAN, S.H. 5. HERMAN, S.H. 6. FIKRAN WARNANGAN, S.H. 7. KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H. 8. BUDYSTIRO M. TOFAN, S.H.	PENGADILAN NEGERI BOBONG	11 JULI 2024
9	BIMBINGAN TEKNIS EKSEKUSI SECARA DARING (ONLINE)	1. Dr. SYAMSUNI, S.H., M.Kn. 2. ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H. 3. WILLY MARSAOR, S.H. 4. PANUSUNAN, S.H. 5. HERMAN, S.H. 6. FIKRAN WARNANGAN, S.H. 7. KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H. 8. BUDYSTIRO M. TOFAN, S.H. 9. FERDINAL, S.H., M.H. 10. HERDIAN E. PUTRAVIANTO, S.H., M.H. 11. HENDRA WAHYUDI, S.H. 12. M. SALIM HAFIDI, S.H. 13. AZHARUL P. PATURUSI, S.H.	PENGADILAN NEGERI BOBONG PENGADILAN NEGERI TOBELO	15 JULI – 18 JULI 2024
10	PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM PERSAINGAN USAHA BAGI HAKIM TINGKAT PERTAMA PERADILAN UMUM SELURUH INDONESIA	Dr. TITO ELIANDI, S.H., M.H.	PENGADILAN NEGERI SANANA	18 NOVEMBER – 10 DESEMBER 2024
11	PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA GELOMBANG III SECARA ONLINE TAHUN 2024	1. IQBAL SALEH SYAHRONI, S.H., M.Kn. 2. FAUZI PERDANA, S.E.	PENGADILAN NEGERI SANANA PENGADILAN NEGERI LABUHA	10 JUNI – 14 JUNI 2024 1 JULI – 5 JULI 2024
12	PELATIHAN SPIP INTEGRATIF SECARA ONLINE	AGUNG MUJTABA, S.E.	PENGADILAN NEGERI TOBELO	8 JULI – 12 JULI 2024
13	BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS TENTANG MANAJEMEN RESIKO OLEH PEMERINTAH DAERAH HALMAHERA UTARA	R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H.	PENGADILAN NEGERI TOBELO	24 OKTOBER – 27 OKTOBER 2024
14	BIMBINGAN TEKNIS PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UAPPA-W LINGKUP MALUKU UTARA OLEH DJPB MALUKU UTARA	1. DEWI ZUBAIDAH, S.T. 2. ADAM ADI PRADANY, S.E.	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	19 JANUARI 2024
15	PELATIHAN EKSPLORASI KEPPIH “STUDI KASUS LAPORAN MASYARAKAT DI KOMISI YUDISIAL” SECARA DARING (ONLINE)	1. ALBANUS ASNANTO, S.H., M.H. 2. HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H. 3. KARTIKA WATI, S.H.	PENGADILAN NEGERI TERNATE PENGADILAN NEGERI SOA SIO PENGADILAN NEGERI LABUHA	6 MARET – 8 MARET 2024

		4. M. SALIM HAFIDI, S.H.	PENGADILAN NEGERI TOBELO	
		5. WILLY MARSAOR, S.H.	PENGADILAN NEGERI BOBONG	
		6. AUFARRIZA MUHAMMAD, S.H., M.H.	PENGADILAN NEGERI SANANA	
16	PELATIHAN TERPADU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) BAGI APARAT PENEGAK HUKUM DAN INSTANSI TEKNIS LAINNYA	FERDINAL, S.H., M.H.	PENGADILAN NEGERI TOBELO	12 – 27 MARET 2024
17	PELATIHAN BAGI PELATIH TEKNIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BAGI HAKIM DAN HAKIM ADHOC	1. BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. 2. YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H. 3. ALBANUS ASNANTO, S.H., M.H. 4. IRWAN HAMID, S.H., M.H. 5. DENIHENDRA ST. PANDUKO, S.H., M.H. 6. M. IQBAL BOPENG, S.H. 7. JAYADI MUJENIH, S.H.	PENGADILAN NEGERI TERNATE	NOVEMBER 2024
18	PELATIHAN SERTIFIKASI SISTEM PERADILAN ANAK TERPADU BAGI HAKIM TINGKAT BANDING PERADILAN UMUM	1. AISA HI. MAHMUD, S.H., M.H. 2. SUDIRA, S.H., M.H. 3. GLENNY J.L. DE FRETES, S.H., M.H.	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	18 NOVEMBER – 6 DESEMBER 2024
19	SERTIFIKASI MEDIATOR	ALBANUS ASNANTO, S.H., M.H.	PENGADILAN NEGERI TERNATE	14 JULI – 26 JULI 2024
20	PELATIHAN SERTIFIKASI NIAGA BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.	PENGADILAN NEGERI TERNATE	13 OKTOBER – 26 OKTOBER 2024

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan adalah segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban (pelaporan) terhadap siklus keluar masuknya dana/uang dalam sebuah instansi pada kurun waktu tertentu.

Bahwa dalam tahapan pengelolaan keuangan sesuai siklus anggaran diawali dari perencanaan, penganggaran pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan anggaran tahun 2024 masing masing satuan kerja telah melaksanakan anggaran sesuai skala prioritas kebutuhannya.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada umumnya mengelola 2 (dua) DIPA yakni DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Alokasi anggaran untuk Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2024, adalah sebagai berikut:

- DIPA (01) kode satker 664522 sebesar Rp.11,256,007,000
- DIPA (03) kode satker 664523 sebesar Rp.216,290,000

Alokasi anggaran untuk 7 (tujuh) satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2024, adalah sebagai berikut:

- DIPA (01) sebesar Rp.73,467,442,000
- DIPA (03) sebesar Rp.1,801,482,000

Adapun realisasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Realisasi DIPA 01

DIPA Badan Urusan Administrasi (01)				
No	Satker	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	%
1	PT. Maluku Utara	11,256,007,000	11,178,932,112	99.32
2	PN. Ternate	9,669,741,000	9,279,836,458	95.97
3	PN. Soasio	5,379,986,000	5,310,789,399	98.71
4	PN. Tobelo	4,976,640,000	4,914,382,273	98.75
5	PN. Labuha	5,742,153,000	5,158,264,307	89.83
6	PN. Sanana	31,387,195,000	31,257,062,752	99.59
7	PN. Bobong	5,055,720,000	4,665,975,792	92.29

Tabel 4.2 Realisasi Belanja Pegawai

DIPA Badan Urusan Administrasi (01)				
No	Satker	Belanja Pegawai		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	%
1	PT. Maluku Utara	8,236,366,000	8,172,758,685	99.23
2	PN. Ternate	7,222,892,000	6,833,863,689	95
3	PN. Soasio	3,706,619,000	3,645,348,436	98
4	PN. Tobelo	3,278,242,000	3,253,965,353	99
5	PN. Labuha	3,420,221,000	2,826,436,017	83
6	PN. Sanana	2,976,336,000	2,955,156,907	99
7	PN. Bobong	3,019,180,000	2,640,568,792	87

Tabel 4.3 Realisasi Belanja Barang

DIPA Badan Urusan Administrasi (01)				
No	Satker	Belanja Barang		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	%
1	PT. Maluku Utara	3,007,641,000	2,994,173,427	99.55
2	PN. Ternate	2,446,849,000	2,445,972,769	100
3	PN. Soasio	1,598,367,000	1,590,440,963	99.99
4	PN. Tobelo	1,655,398,000	1,504,599,920	91

5	PN. Labuha	2,131,932,000	2,128,100,190	99.99
6	PN. Sanana	1,980,585,000	1,863,731,387	94
7	PN. Bobong	1,636,540,000	1,606,907,000	98

Tabel 4.4 Realisasi Belanja Modal

DIPA Badan Urusan Administrasi (01)				
No	Satker	Belanja Modal		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	%
1	PT. Maluku Utara	12,000,000	12,000,000	100
2	PN. Ternate	-	-	-
3	PN. Soasio	75,000,000	75,000,000	100
4	PN. Tobelo	43,000,000	43,000,000	100
5	PN. Labuha	190,000,000	189,932,100	99.99
6	PN. Sanana	26,430,274,000	26,427,674,458	99.99
7	PN. Bobong	400,000,000	400,000,000	100

Adapun realisasi DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sebagai berikut:

Tabel 4.5 Realisasi DIPA 03

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03)				
No	Satker	Belanja Barang		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	%
1	PT. Maluku Utara	216,290,000	216,270,556	99.99
2	PN. Ternate	541,712,000	497,293,000	92
3	PN. Soasio	335,350,000	319,215,240	95
4	PN. Tobelo	338,700,000	328,442,160	97
5	PN. Labuha	72,840,000	67,903,000	93
6	PN. Sanana	251,090,000	241,309,649	96
7	PN. Bobong	45,500,000	41,413,500	91

Tabel 4.6 Nilai Kinerja Satuan Kerja DIPA 01

DIPA Badan Urusan Administrasi (01)									
No	Satker	Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Capaian Output	Nilai Akhir
1	PT. Maluku Utara	100	100	99.77	100	100	97.71	100	99.73
2	PN. Ternate	100	94.62	95.55	100	100	100	100	98.30
3	PN. Soasio	100	91.78	100	92	100	100	100	97.97
4	PN. Tobelo	100	91.56	97.98	100	100	94.26	100	97.76
5	PN. Labuha	100	83.5	96.96	96	100	95.38	100	95.97
6	PN. Sanana	100	51.13	100	92	100	97.14	100	91.46
7	PN. Bobong	100	92.42	98.82	100	100	100	100	98.74

Tabel 4.7 Nilai Kinerja Satuan Kerja DIPA 03

No	Satker	DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03)							
		Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Capaian Output	Nilai Akhir
1	PT. Maluku Utara	100	92.72	100	-	-	99.07	100	98.52
2	PN. Ternate	100	79.09	97.22	-	-	100	100	95.38
3	PN. Soasio	100	63.73	100	-	-	99.02	100	92.55
4	PN. Tobelo	100	77.2	100	-	-	89.86	98.25	93.91
5	PN. Labuha	100	72.61	91.48	-	-	100	96.25	92.06
6	PN. Sanana	100	64.64	100	-	-	94.46	90	89.82
7	PN. Bobong	100	60.2	88.11	-	-	92.74	90	86.21

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pada tahun 2024, Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri sewilayah hukumnya melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Tanah

Pengelolaan tanah pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hal hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk pula dengan perbuatan hukum yang terkait dengan Sumber Daya Alam itu. Tujuan lain dari diselenggarakannya program pengelolaan pertanahan adalah untuk mewujudkan keteraturan terkait dengan penyelenggaraan dan administrasi yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesinambungan pembangunan Pengelolaan Tanah pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, memiliki tanah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Keadaan Tanah yang dimiliki Pengadilan Tinggi Maluku Utara

No	Uraian	Luas (m2)	Lokasi
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	20,413	Jl.Bhayangkara, Sofifi Kec. Oba Utara Tidore Kepulauan
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5,019	Jl.Bhayangkara, Sofifi Kec. Oba Utara Tidore Kepulauan
3	Tanah Kantor Pemerintah	10.000	Darame Jl. Jalan Muhajirin Baru Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	10.000	Jl. Jalan Muhajirin Baru Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai

Adapun keadaan tanah pada Pengadilan Negeri sewilayah Maluku Utara adalah sebagai berikut :

*Tabel 4.9 Keadaan Tanah Pengadilan Negeri se-wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Maluku Utara*

No	Uraian	Luas (m2)	Lokasi
I	Pengadilan Negeri Ternate		
1	Nuku, Kab. Halmahera Barat	1204 m2	Balai Sidang Jailolo
2	Kel. Tabona, Kota Ternate	6117 m2	Tanah Tipikor
3	Jl. Gelora Kie Raha, Kota Ternate	1712 m2	Bangunan Gedung Kantor
4	Salahudin, Kota Ternate	554 m2	RD. Hakim
5	Salahudin, Kota Ternate	190 m2	RD. Hakim
6	Kompi Bantuan, Kota Ternate	554 m2	RD. Hakim
7	Kolontjutju, Kota Ternate	500 m2	RD. Hakim
8	Batu Anteru, Kota Ternate	200 m2	RD. Panitera
9	Jl. Gelora Kie Raha, Kota Ternate	372 m2	RD. Ketua
10	Salahudin, Kota Ternate	234 m2	RD. Wakil
11	SLTP 05, Kota Ternate	213 m2	RD. Hakim
II	Pengadilan Negeri Tobelo		
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	370	Jln. Bhayangkara Desa Gamsungi., Kec. Tobelo
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	276	Jln Huboto Desa Gosoma, Kec. Tobelo
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	480	Jln. Bhayangkara Desa Gamsungi, Kec. Tobelo
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1304	Jln Kuburan Cina Desa Gosoma, Kec. Tobelo
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	441	Jln Kuburan Cina Desa Gosoma, Kec. Tobelo
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2493	Jln. Siswa Desa Gamsungi, Kec. Tobelo
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1514	Jln. MTQ Desa Darame, Kec. Morotai Selatan
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2380	Jln. Kenari Desa Bere Bere, Kec. Morotai Utara
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3000	Jln. Sangaji Boeng Kec. Kao
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1476	Jln. Yasin Gamsungi Desa Soasio Kec. Galela
III	Pengadilan Negeri Soa Sio		
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,809	Jl. A. Yani, Soasio Tidore Kepulauan
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,591	Jl. Nurweda, Weda Halmahera Tengah
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,002	Lolobata, Wasile, Halmahera Timur
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,611	Maba, Halmahera Timur
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,501	Jl. Yolendiu, Patani Halmahera Tengah
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	336	Indonesiana Kota Tidore Kepulauan
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	406	Indonesiana Kota Tidore Kepulauan
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	850	Indonesiana Kota Tidore Kepulauan
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	373	Indonesiana Kota Tidore Kepulauan
10	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	406	Indonesiana Kota Tidore Kepulauan
11	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	402	Indonesiana Kota Tidore Kepulauan
12	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	435	Indonesiana Kota Tidore Kepulauan

13	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	731	Indonesiana Kota Tidore Kepulauan
14	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	451	Indonesiana Kota Tidore Kepulauan
IV	Pengadilan Negeri labuha		
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	500	Jl. Usman Syah, Labuha
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	288	Jl. Pasar Lama, Labuha
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	200	Jl. Usman Syah, Labuha
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1,625	Jl.Kota Popoh, Labuha
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1,490	Jl. Flamboyan. Labuha
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,130	Jl. Molunjunga, Labuha
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,589	Jl. Emomalamo, Sanana
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	13,530	Jl. Karet Putih, Labuha
V	Pengadilan Negeri Sanana		
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.589	Jl. Emolamo,Fogi, Sanana
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.649	Jl. Soeharto, Fatcei, Sanana
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10.370	Jl. Desa Pohea, Pohea, Sanana
VI	Pengadilan Negeri Bobong		
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10,480	Jalan Talo Nomor 2, Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Kode Pos 97794

2. Kendaraan Dinas

2.1 Kendaraan Dinas Tingkat Banding

Tabel 4.10 Kendaraan Dinas yang dimiliki Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda Empat					
	Toyota Hi Ace	2020	√			Sewa
	Toyota Pajero	2023	√			Sewa
	Toyota Camry	2023	√			Sewa
	Toyota Baleno	2005	√			Pinjam pakai
	Toyota Altis	2006	√			
	Toyota Fortuner	2017	√			Pinjam pakai
	Toyota Vios	2009	√			
	Toyota Kijang Innova	2005	√			Pinjam pakai
	Toyota Kijang Innova	2010	√			
	Toyota Kijang Innova	2007	√			

	Toyota Avansa	2011	√			
II	Jenis Kendaraan Roda Dua					
	Honda Supra Fit	2005		√		
	Honda Supra Fit	2005		√		
	Honda Supra Fit	2005		√		
	Honda Supra Fit	2007		√		
	Honda Supra Fit	2007		√		
	Suzuki Thunder	2008		√		
	Suzuki Thunder	2008		√		
	Yamaha Mio Soul	2011	√			

2.2 Kendaraan Dinas pada Pengadilan Negeri

Tabel 4.11 Kendaraan Dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

No	Uraian	Tahun	Kondisi			Ket
		Perolehan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	PN. Ternate					
1.1	Jenis Kendaraan Roda Empat					
1	Toyota Vios	2006	√			
2	Toyota Kijang	2007	√			
3	Toyota Rush	2011	√			
4	Toyota Vios	2006	√			
1.2	Jenis Kendaraan Roda Dua					
1	Honda Supra X	2006	√			
2	Honda Supra Fit	2008	√			
3	Honda Supra Fit	2002		√		
4	Honda Supra Fit	2002	√			
5	Yamaha Soul	2011	√			
6	Honda Supra Fit	2006	√			
7	Honda Supra Fit	2001		√		
8	Honda Supra Fit	2005	√			
9	Honda Revo	2008	√			
10	Honda Supra Fit	2005	√			
2	PN. Soasio					
2.1	Jenis Kendaraan Roda Empat					
1	Daihatsu Xenia	2011	√			
2	Innova Venturer	2020	√			
2.2	Jenis Kendaraan Roda Dua					
1	Yamaha RX King	2003	√			
2	Suzuki Shogun	2008	√			
3	Suzuki Shogun	2008	√			
3	PN. Labuha					
3.1	Jenis Kendaraan Roda Empat					

1	Minibus Mitsubishi Xpander Ultimate 1.5 4X2 AT	2024	√			
2	Minibus Toyota Inova	2009	√			
3	Daihatsu Xenia	2011	√			
4	Toyota Kijang Standar	2008			√	
3.2	Jenis Kendaraan Roda Dua					
1	Honda Supra Fit	2005			√	
2	Honda Supra Fit	2005			√	
3	Honda Supra Fit	2005	√			
4	Honda Legenda	2004			√	
5	Honda Supra NF 125	2007	√			
6	Honda Supra NF 125 TR	2008	√			
7	Honda Supra NF 125 TR	2008			√	
8	Honda Blade	2011	√			
9	Honda Blade	2011	√			
4	PN. Tobelo					
4.1	Jenis Kendaraan Roda Empat					
1	Suzuki Ertiga	2014	√			
5	PN. Sanana					
5.1	Jenis Kendaraan Roda Empat					
1	Toyota Rush	2021	√			
5.2	Jenis Kendaraan Roda Dua					
1	Honda Vario	2021	√			
2	Honda Vario	2021	√			
6	PN. Bobong					
6.1	Jenis Kendaraan Roda Empat					
1	Toyota Rush	2019	√			
2	Mitsubishi Expander	2022	√			Sewa
3	Toyota Hilux	2019		√		Pinjam pakai
6.2	Jenis Kendaraan Roda Dua					
1	Sepeda Motor Honda Revo	2019	√			
2	Sepeda Motor Honda Trakter	2019	√			
3	Sepeda Motor Honda Revo	2019		√		Pinjam Pakai
4	Sepeda Motor Yamaha Trakker	2019		√		Pinjam Pakai

3. Keadaan Rumah Negara

3.1 Rumah Negara pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Tabel 4.12 Rumah Negara yang dimiliki Pengadilan Tinggi Maluku Utara

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			
3	Rumah Dinas Hakim	7	√			
4	Rumah Dinas Panitera	1	√			
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	√			
6	Rumah Dinas Pejabat Es III dan IV	9	√			

3.2 Rumah Negara pada Pengadilan Negeri

Tabel 4.13 Rumah Negara yang dimiliki Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	PN. Ternate	10	√			
1	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			
3	Rumah Dinas Hakim	7	√			
4	Rumah Dinas Panitera	1	√			
5	Rumah Dinas Sekretaris					Tdk ada
II	PN. Soasio	11				
1	Rumah Dinas Ketua	1		√		
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1		√		
3	Rumah Dinas Hakim	8		√		
4	Rumah Dinas Panitera	1		√		
5	Rumah Dinas Sekretaris					Tdk ada
III	PN. Labuha	12				
1	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			
3	Rumah Dinas Hakim	6			√	

4	Rumah Dinas Panitera	1			√	
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	√			
6	Rumah Dinas Pegawai	2		√		
IV	PN.Tobelo	8				
1	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			
3	Rumah Dinas Hakim	4	√			
4	Rumah Dinas Panitera	1	√			
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	√			
V	PN. Sanana	-				
1	Rumah Dinas Ketua	-				
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	-				
3	Rumah Dinas Hakim	-				
4	Rumah Dinas Panitera	-				
5	Rumah Dinas Sekretaris	-				
VI	PN. Bobong	-				
1	Rumah Dinas Ketua	-				
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	-				
3	Rumah Dinas Hakim	-				
4	Rumah Dinas Panitera	-				
5	Rumah Dinas Sekretaris	-				

4. Sarana dan Prasarana

4.1 Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Tabel 4.14 Sarana dan Prasarana yang dimiliki Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
I	Sarana & Prasarana Gedung		
	Ruang Ketua	1	
	Ruang Wakil Ketua	1	
	Ruang Hakim	5	
	Ruang Panitera	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Sidang Umum	2	
	Ruang Kepaniteraan	4	
	Ruang Kesekretariatan	6	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang Arsip Perkara	1	
	Ruang Arsip Umum	1	
	Ruang Dharmayukti Karini	1	
	Ruang Rapat	1	
	Ruang Gudang	1	
	Ruang Server	1	

	Ruang Ajudan	4	
	Ruang Pantry	1	
	Ruang Tamu Terbuka	1	
	Mushola	1	
	Toilet/WC	5	
	Rumah Genset	1	
	Pos Satpam	2	
	Ruang PTSP	1	
	Ruang Command Center	1	
II.	Sarana & Prasarana Fasilitas Kantor		
	Crimping Tolls	1	
	Mesin Pompa Air	1	
	Scanner (Universal Tester)	1	
	Lemari Kayu	24	
	Brandkas	1	
	CCTV	16	
	Papan Visual/Papan Nama	7	
	Mesin Absensi	-	
	Alat Pemotong Kertas	1	
	Meja Kerja Kayu	75	
	Kursi Besi/Metal	172	10 rusak berat
	Kursi Kayu	19	
	Sice	27	
	Bangku Panjang Kayu	4	
	Meja Rapat	7	1 Rusak Berat
	Partisi	1	
	Vacum Cleaner (Untuk Mobil)	5	
	Lemari Es	12	
	A.C Sentral	-	
	A.C Split	46	
	Televisi	12	2 Rusak Berat
	Amplifier	2	
	Equalizer	1	
	Loudspeaker	39	
	Microphone	5	
	Mic Wireless	8	
	Lambang Garuda Pancasila	4	
	Tiang Bendera	4	
	Mimbar/Podium	2	
	Palu Sidang	11	
	Karpert	30	
	Vertikal Blind	1	
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	21	
	Scanner Coir, Presst	4	
	Digital Keyboard Technics	1	
	Camera Wall Box	2	2 Rusak Berat
	Digital Video Effect	1	
	Camera Digital	1	
	Handy Talky	19	7 Rusak Berat
	Facsimile	1	1 Rusak Berat
	Switcher Anthena Lainnya	11	
	Komputer Jaringan Lainnya	13	
	P.C Unit	18	1 rusak berat
	Lap Top	31	
	Printer	20	
	Server	2	
	Router	1	
	Rak Server	1	

Acces Point	2	
Pesawat Telephone	24	
PABX	3	
Tabung Pemadam Kebakaran		
Alat Rumah Tangga Lainnya (home use)	20	

4.2 Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Negeri

Tabel 4.15 Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
PENGADILAN NEGERI TERNATE			
I.	Sarana dan Prasarana Gedung		
	Ruang Ketua	1	
	Ruang Wakil Ketua	1	
	Ruang Panitera	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Hakim	3	
	Ruang Panitera Pengganti	-	
	Ruang Panitera Muda Perdata	-	
	Ruang Panitera Muda Pidana	-	
	Ruang Panitera Muda Hukum	-	
	Ruang Kesekretariatan	3	
	Ruang Kepaniteraan	5	
	Ruang Sidang Umum	3	
	Ruang Sidang Anak	1	
	Ruang Tunggu Saksi Anak	1	
	Ruang Bapas	-	
	Ruang Mediasi/Diversi	1	
	Ruang Lobby	3	
	Ruang Arsip	1	
	Ruang Arsip Eksekusi	-	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang Server	1	
	Ruang Rapat ICPE (Media Center)	1	
	Ruang Posbakum/Tunggu Advokat	1	
	Ruang Tunggu Jaksa	1	
	Ruang Tahanan	3	
	Ruang Tunggu Pengunjung Tahanan	1	
	Gudang	-	
	Kamar Mandi	15	
	Pantry	1	
	Ruang Laktasi	1	
	Mushollah	2	
	Ruang Sekretariat Dharmayukti Cabang Ternate	1	
	Ruang Rapat	1	
II.	Sarana & Prasarana Fasilitas Kantor		
	Lemari penyimpan	4	
	Mesin foto copy	1	
	Lemari Besi / Metal	12	
	Lemari Kayu	49	
	Rak Besi	29	

Filing Kabinet Besi	22	
Filing Kabinet Kayu	7	Rusak Berat
Brandkas	4	-
Tabung Pemadam Api	3	-
Camera Control Television System	2	Rusak Berat 1 Paket
Papan visual	50	-
White board	2	Rusak Berat 2 unit
Alat Pemotong kertas	2	Rusak berat 1 unit
Hand Metal detector	2	Rusak Berat 2 unit
Pintu Elektrik	1	-
Perkakas Kantor lainnya	6	-
Alat kantor lainnya	6	-
Meja kerja kayu	106	-
Kursi besi/metal	131	-
Kursi Kayu	81	-
Sice	11	Rusak Berat 5 Unit
Bangku panjang kayu	55	Rusak berat 12 Unit
Meja rapat	3	Rusak berat 1 unit
Meja Komputer	9	Rusak berat 9 unit
Meja Receptionsionis	2	-
AC Central	4	-
AC Split	55	Rusak berat 26 unit
Televisi	10	-
Sound System	3	Rusak Berat 1 Unit
Lambang Garuda Pancasila	5	-
Tiang Bendera	12	Rusak Berat 2 Unit
Dispenser	32	Rusak Berat 8 Unit
Palu Sidang	8	Rusak Berat 3 Unit
Lambang Instansi	1	-
Vertikal Blind	1	-
Bendera Negara	10	-
Uninterruptible Power Supply	20	Rusak Berat 12 Unit
Camera Digital	2	Rusak Berat 1 Unit
LCD Monitor	3	-
Facsimile	2	-
Finger Pinter	1	-
Genset	1	-
Kursi dorong	1	-
PC Unit	53	-
Laptop	33	-
Printer	42	-
Scanner	9	-
Server	2	-
Kursi Roda	2	-
Panic Button System, Alarm Indicator	1	-
Tempat Tidur Besi	1	-
Kursi Fiber Glas/Plastik	20	Rusak Berat 20 Unit
Partisi	11	-
Nakas	8	-
Meubelair Lainnya	2	Rusak Berat 2 Unit
Jam Elektronik	4	-
Kipas Angin	5	Rusak Berat 2 Unit
Loudspeaker	6	-
Wireless	1	-
Microphone	16	-
Handy Cam	1	Rusak Berat 1 Unit
Karpet	14	Rusak Berat 14 Unit
Bracket Standing Peralatan	2	-

	Audio Mixing Console	1	-
	Audio Visual	1	-
	Microphone/Wireless MIC	2	-
	Microphone/Boom Stand	2	-
	Mixer Sound Sistem	1	-
	Camera Conference	4	-
	Mesin Pelubang (Peralatan Cetak)	1	-
	Telephone (PABX)	20	Rusak Berat 20 Unit
	Handy Talky (HT)	1	-
	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	1	-
	Network Monitoring System	1	-
	Switching Matrix and Server	1	-
	Walker Polding	6	-
	Personal Computer	6	-
	Internet	1	-
	Note Book	1	Rusak Berat 1 Unit
	Serial Printer	2	-
	Hub	1	-
	Wireless Access Point	1	-
	Automatic Terminal Information Service (ATIS)	1	-
	Aid Hearing	2	-
	Alat Musik Modern/Band	1	-
	Buku Lainnya	19	-
	Monografi	11	-
	Uninterrupted Power Supply	1	
PENGADILAN NEGERI SOASIO			
I.	Sarana dan Prasarana Gedung		
	Ruang Ketua	1	
	Ruang Wakil Ketua	1	
	Ruang Hakim	1	
	Ruang Panitera	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Sidang Umum	2	
	Ruang Kepaniteraan Muda Pidana	1	
	Ruang Kepaniteraan Muda Perdata	1	
	Ruang Kepaniteraan Muda Hukum	1	
	Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI, & Pelaporan	1	
	Ruang Umum & Keuangan	1	
	Ruang Sub Bagian Kepegawaian & Ortala	1	
	Ruang Pantry	2	
	Mushola	1	
	Toilet/WC	12	
	Rumah Genset	1	
	Pos Penjagaan	2	
	Ruang PTSP	1	
	Ruang Command Center	1	
	Ruang Sidang Anak	1	
	Ruang Jaksa	1	
	Ruang Posbakum	1	
	Ruang Laktasi	1	
	Ruang Bapas	1	
	Ruang Tahanan	2	
	Ruang Lobi	1	
	Ruang Kasir	1	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang Arsip Perkara	1	
	Ruang Gudang	1	
	Ruang Server	1	

	Ruang Ajudan	1	
II.	Sarana dan Prasarana Gedung		
	Komputer	31	Baik
	Laptop	23	Baik
	Infokus	1	Rusak Berat
	Mesin Fotocopy	1	Sewa/ Baik
	A.C. Split	14	Baik/ 4 Rusak Berat
	A.C. Sentral	4	Baik
	Genset	1	Baik
	Camera Digital	2	1 Rusak Berat
	Sound System	2	Baik
	Printer	22	6 Rusak Berat
	Vacum Cleaner	1	Rusak Berat
	Mesin Finger Print	1	Baik
	Kursi Besi Metal	82	22 Rusak Berat
	Kursi Zeis	20	5 Rusak Berat
	Kursi Kayu	32	23 Rusak Berat
	Meja Kerja Kayu	63	13 Rusak Berat
	Meja Rapat / Meja Mediasi	1	Baik
	Meja Resepsionis	1	Baik
	Hand Metal Detector	1	Baik
	Handycam	1	Rusak Berat
	Scanner Coir Pres	2	Rusak Ringan
	Filling Cabinet	2	Rusak Ringan
	CCTV	4	Baik
	Lemari Kayu	25	5 Rusak Berat
	Server	2	Baik
	Access Point	1	Baik
	Rak Server	2	Baik
	Webcam	1	Rusak Berat
	Televisi	1	Rusak Berat
	Apar	4	Baik
	Brandkas	1	Baik
	Papan Nama Pejabat Pengadilan	1	Baik
	Papan Informasi	1	Baik
	Lambang Garuda	5	Baik
	Lambang Instansi	1	Baik
	Tiang Bendera	1	Baik
	Palu Sidang	3	Baik
	Kas Toga & Jas	7	Baik
	Power Supply	8	Baik
	LCD Monitor	3	Baik
	Kursi Roda	1	Baik
	Tongkat Distabilitas	1	Baik
	Mixer Sound System	1	Baik
	Alat Pengeras Suara/ Mic	8	Baik
	Buku Lainnya	20	Baik
	Scanner	2	Baik
	Camera Conference	2	Baik
	Telephone	2	Baik
PENGADILAN NEGERI TOBELO			
I.	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		
	Ruang Ketua	1	
	Ruang Wakil Ketua	1	
	Ruang Hakim	1	
	Ruang Panitera	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Sidang Umum	3	

	Ruang Sidang Anak	1	
	Ruang Tahanan	2	
	Ruang Kepaniteraan Muda Pidana & Hukum	1	
	Ruang Kepaniteraan Muda Perdata	1	
	Ruang Kasir	1	
	Ruang Panitera Pengganti	1	
	Ruang Jurusita	1	
	Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI, & Pelaporan	1	
	Ruang Sub Bagian Kepegawaian & Ortala	1	
	Ruang Sub Bagian Umum & Keuangan	1	
	Ruang Server	1	
	Ruang PTSP	1	
	Ruang Tamu Terbuka	1	
	Ruang Mediasi	1	
	Ruang Jaksa Penuntut Umum	1	
	Ruang Posbakum	1	
	Ruang Tunggu Anak	1	
	Ruang ATK	1	
	Ruang Laktasi	1	
	Ruang Musholla	1	
	Ruang Arsip	1	
	Ruang Rapat Umum	1	
	Ruang Rapat Pimpinan	1	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang Kamar Mandi/WC	8	
	Bangunan Pos Satpam	1	
	Gudang	1	
II.	Sarana & Prasarana Fasilitas Kantor		
	Lemari Kayu	51	
	Lemari Kayu	51	
	Rak Besi	6	
	Rak Kayu	27	
	Filling Kabinet	5	
	Brandkas	3	
	Tabung Pemadam Api	1	
	CCTV	10	
	Papan Visual	7	
	Whiteboard	5	
	Mesin Absensi (fingerprint)	3	
	Hand Metal Detector	1	
	Infocus	2	
	Meja Kerja Kayu	129	
	Kursi Besi/Metal	120	
	Kursi Kayu	80	
	Sice	9	
	Bangku Panjang Metal	10	
	Bangku Panjang Kayu	34	
	Meja Rapat	2	
	Meja Komputer	2	
	Meja Resepsionis	30	
	Partisi	2	
	Mebeulair Lainnya	2	
	AC Split	25	
	Kipas Angin	10	
	Tape Recorder	1	
	Loudspeaker	2	
	Soundsystem	3	
	Megaphone	1	

	Microphone Table Stand	17	
	Lambang Garuda	3	
	Tiang Bendera	6	
	Tangga Alumunium	1	
	Dispenser	2	
	Mimbar	1	
	Lambang Intansi	1	
	Vertikal Blind	1	
	Audio Amplifier	2	
	UPS	7	
	Power Amplifier	1	
	Camera Electronic	1	
	LCD Monitor	2	
	Telephone	1	
	Genset	1	
	Komputer Lainnya	14	
	PC Unit	40	
	Laptop	27	
	Console Unit	6	
	Scanner	5	
	CPU	7	
	Monitor	7	
	Printer	18	
	Keyboard	6	
	Meja Komputer	13	
	Sever	3	
	Router	1	
	Rak Server	2	
	Monografi	9	
	Software Komputer	1	
PENGADILAN NEGERI LABUHA			
I.	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		
	Ruang Ketua	1	
	Ruang Wakil Ketua	1	
	Ruang Hakim	1	
	Ruang Panitera	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Rapat Internal	1	
	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
	Ruang ICPE	1	
	Ruang Arsip Perkara	1	
	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
	Ruang Sub Bagian PTIP	1	
	Ruang Server	1	
	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
	Ruang Media Center / Teleconference	1	
	Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
	Ruang Sub Bagian Kortala	1	
	Ruang Kesehatan	1	
	Ruang Mediasi	1	
	Ruang Ramah Anak	1	
	Ruang Jaksa	1	
	Ruang Posbakum	1	
	Ruang Sidang Umum	2	
	Ruang Sidang Anak	1	
	Ruang Tunggu/Lobby/PTSP	1	
	Toilet	13	
	Ruang Perpustakaan	1	

	Ruang Laktasi	1	
II.	Sarana dan Sarana Fasilitas Kantor		
	Mesin Hitung Elektronik/ Calculator	3	
	Lemari Kayu	26	
	Rak Besi	1	
	Rak Kayu	5	
	Filling Cabinet Besi	4	
	Brangkas	2	
	CCTV	2	
	Papan Visul/ Papan Nama	3	
	Mesin Absensi	2	
	Hand Metal Detector	1	
	LCD Projector	1	
	Layar LCD Projector	1	
	Mesin Antrian	1	
	Meja Kerja Kayu	59	
	Kursi Besi/ Metal	177	
	Kursi Kayu	27	
	Sice	5	
	Bangku Panjang Kayu	33	
	Meja Rapat	2	
	Lemari Es	1	
	AC Split	25	
	Televisi	8	
	Tape Recorder	1	
	Amplifier	1	
	Loudspeker	8	
	Soud System	2	
	Microphone	7	
	Microphone Conference	1	
	Unit Power Supply	14	
	Lambang Garuda Pancasila	3	
	Tiang Bendera	2	
	Dispenser	11	
	Palu Sidang	2	
	Lambang Instansi	2	
	Karpet	1	
	Audio Mixing Console	1	
	Pesawat Telephone	3	
	Facsimile	2	
	Genset	1	
	Kursi Dorong	5	
	PC Unit	33	
	Laptop	16	
	Printer	14	
	Scanner	13	
	Server	2	
	Rak Server	2	
PENGADILAN NEGERI SANANA			
I.	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		
	Ruang Ketua	1	
	Ruang Wakil Ketua	1	
	Ruang Hakim	1	
	Ruang Panitera	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Sidang Umum	1	
	Ruang Sidang Anak	1	
	Ruang Pidana	1	

	Ruang Perdata	1	
	Ruang Hukum	1	
	Ruang Panitera Pengganti	1	
	Ruang Umum dan Keuangan	1	
	Ruang Kepegawaian dan Ortala	1	
	Ruang PTIP	1	
	Ruang Tamu Terbuka	1	
	Ruang Mediasi	1	
	Ruang PTSP	1	
	Ruang Tunggu	1	
	Ruang Tunggu Anak	1	
	Ruang Poliklinik dan Laktasi	1	
	Ruang Teleconference, Bapas	1	
	Ruang Arsip	1	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang Rapat	0	
	Ruang Kejaksaan	0	
	Ruang Pengacara	1	
	Ruang Posbakum	1	
	Mushola	1	
	Pos Satpam	1	
II.	Sarana dan Sarana Fasilitas Kantor		
	Lemari Besi/Metal	15	
	Rak Besi	1	
	Bracket Standing Peralatan	2	
	Mesin Absensi	1	
	Meja Kerja Kayu	33	
	Kursi Besi/Metal	68	
	A.C Split	11	
	Wireless	3	
	Kabel	2	
	UPS	7	
	LCD Monitor	4	
	P.C Unit	24	
	Lap Top	18	
	Serial Printer	9	
	Server	1	
	Router	1	
	Switch	6	
	Microphone	7	
	Speaker	2	
	Amplifier	2	
	Digital Keyboard Technic	1	
	Loudspeaker	1	
	Webcam	1	
	LCD Projector/Infocus	1	
	Kamera Digital	1	
PENGADILAN NEGERI BOBONG			
I.	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		
	Ruang Ketua	1	
	Ruang Wakil Ketua	1	
	Ruang Panitera	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Hakim	5	
	Ruang Arsip Pidana	1	
	Ruang Arsip Perdata	1	

	Ruang Rapat Pimpinan	1	
	Ruang Teleconference	1	
	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
	Ruang Server	1	
	Ruang Jurusita	1	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang ZI	1	
	Ruang Kepegawaian dan Ortala	1	
	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
	Ruang Umum dan Keuangan	1	
	Ruang Bendahara	1	
	Ruang Gudang ATK	1	
	Ruang Sidang Utama	1	
	Ruang Sidang Anak	1	
	Ruang Sidang 1	1	
	Ruang Sidang 2	1	
	Ruang Mediasi	1	
	Ruang Kaukus	1	
	Ruang Diversi	1	
	Ruang Kesehatan	1	
	Ruang Jaksa	1	
	Ruang Barang Bukti	1	
	Ruang Posbakum	1	
	Ruang Konferensi Pers	1	
	Ruang Tahanan Anak	1	
	Gudang	1	
	Ruang PTSP	1	
	Kamar Mandi/Toilet Difabel	1	
	Kamar Mandi/Toilet Pengunjung Sidang	4	
	Kamar Mandi/Toilet Pegawai	4	
	Parkiran Khusus Pejabat	-	Tidak Ada
	Parkiran Khusus Pengunjung	-	Tidak Ada
	Ruang Tamu Terbuka	-	Tidak Ada
	Pos Jaga	2	
	Rumah Genset dan Pompa Air	1	
II.	Sarana dan Sarana Fasilitas Kantor		
	Personal Komputer	20	
	Laptop/Notebook	14	
	Printer	9	
	Scanner	2	
	Server	2	
	A.C Cassete	16	
	A.C Split	31	
	Meja Kerja Kayu	50	
	Kursi Besi Metal	130	
	Lemari Kayu	15	
	Lemari Besi Metal	18	
	CCTV	23	
	Synologi	1	
	Televisi	11	
	Sofa	4	
	Kursi Pengunjung/Bangku Panjang	16	
	Kursi Disabilitas	1	
	Brandkas	2	
	Router	2	
	UPS	8	

	Mesin Absensi/Finger Print	1	
	LCD Projector/Infocus	-	
	Camera zoom	1	

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi Informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Dengan kata lain, teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari *hardware* dan *software* untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas.

Perangkat Keras (*hardware*) yang tersedia untuk pengembangan IT di Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai berikut :

Tabel 4.16 Perangkat Keras yang dimiliki Pengadilan Tinggi Maluku Utara

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH	MERK/TYPE	KET
1	Server	2	HP dan Fujitsu	
2	Rak Server	2		
3	Crimping Tolls	1	Scneider Digilink	
4	Scanner (Universal Tester)	2	Gold Tool, TCT-2690 Pro	
5	CCTV	16	Avtech 103, 105	
6	LCD Projector/Infocus	1	Sony	
7	UPS	5	Prolink	
8	Scanner Coir, Presst	4	Fujitzu	
9	Digital Video Effect	1	DVS 7216-F2	
10	Switcher Antena Lainnya	11	Rujie, TP-Link TL SG108	
11	Komputer Jaringan Lainnya	2		
12	PC Unit	18		
13	Laptop	31	Asus, Lenovo, HP	
14	Serial Printer / Scanner	18	Epson	
15	Printer	2	Epson, Canon	
16	Router	1	Mikrotik	
17	Access Point	8	Rujie	

Sedangkan Perangkat lunak (*software*) berupa sistem informasi yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara antara lain sebagai berikut :

- Sistem Operasi Komputer : Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, dan Google Chrome
- Office : Microsoft Office 2007, 2010, 2016
- PDF Reader : Adobe Reader, PDF Nitro
- Kompresi : Winrar dan Winzip
- Antivirus : Kaspersky, Smadav
- Aplikasi : SIPP, SIKEP, KOMDANAS, SAKTI, Persediaan, SIMAK-BMN, SIMAN, SAIBA, E- Rekon, SIMARI, PTSP, SIAP BEN, SIAI, E-BIMA, E Persuratan, SISUPER, E-Pelita, SIAMPUH, SIWAS, e-COURT, eBerpada,

Secara umum pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri meliputi aplikasi e-court merupakan implementasi dari peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini terdiri dari 3 (tiga) fitur utama yaitu: Pendaftaran Perkara (e-filing), Pembayaran Panjar Perkara (e-payment) dan Penyampaian Pemberitahuan/Panggilan Secara Elektronik (e-summons).

Salah satu yang sangat penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Pelayanan Publik, seperti kita ketahui, bahwa masyarakat/para pencari keadilan sudah lama menganggap bahwa aparatur pemerintah (Pengadilan) melayani publik secara tidak maksimal. Oleh karenanya peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu hal penting yang harus dilaksanakan oleh

semua instansi terutama di Pengadilan yang tengah melaksanakan Reformasi Birokrasi juga menyadari betapa pentingnya pelayanan publik ini. Tentunya dalam hal ini perlu adanya dukungan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada seluruh masyarakat pencari keadilan.

Perangkat Keras Pendukung Teknologi Informasi terkait SIPP pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara :

1. Pengadilan Negeri Ternate

- Server SIPP : 1 Unit
- Server Backup SIPP : 1 Unit
- Mikrotik Router Board : 1 Unit
- Acces point : 5 unit
- Hub/Switch : 1 unit
- Bandwith Internet : 19 Mbps
- Jariangan LAN : 15 Client
- Jaringan W-LAN : 28 Client
- UPS Server : 1 unit
- PC/Lap Top Client : 76 unit

Perangkat Lunak pendukung Teknologi Informasi terkait SIPP sebagai berikut: Sistem Operasi Linux CentOS 7.7, Aplikasi SIPP Versi 3.3.0-1, Database Mysql (MariaDB), Apache, PHP, FileZilla, PuTTY, SQLyog.

2. Pengadilan Negeri Tobelo

a. Perangkat keras yang masih berfungsi

- Personal komputer (PC) : 19 Unit

- Server : 2 Unit
- Notebook (laptop) : 11 Unit
- Monitor tampilan : 2 Unit
- Printer : 1 Unit
- Scanner : 2 Unit
- CCTV : 1 Unit

b. Perangkat lunak

- Sistem Operasi Komputer : Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome
- Office : Microsoft Office 2007, 2010, dan 2016
- PDF Reader : Adobe Reader, Pdf Nitro
- Kompresi : Winrar, Winzip
- Antivirus : Kaspersky, Smadaf
- Aplikasi : SIPP, MIS, PTSP+, eraterang, e-Court, SIKEP Komdanas, aplikasi RKAKL, Keuangan (SAS, SAIBA, SIMAK BMN, Aplikasi Persediaan)

3. Pengadilan Negeri Bobong

Perangkat Keras terdiri atas: Server, UPS, Router, Personal Komputer 13 unit, Laptop sebanyak 5 unit, dan perangkat lunak terdiri atas:

- Administrasi Perkara : SIPP/CTS Versi 4.0.1
- Administrasi Keuangan : GPP, SAKPA, SPM, PP 39, PINPPSPM, Silabi, AFS, KOMDANAS, SIMARI

- Administrasi Kepegawaian/SDM : SAPK, SIKEP, KOMDANAS
- Administrasi Aset : Persediaan, SIMAK BMN
- Administrasi Perencanaan : Aplikasi RKA-K/L
Anggaran

4. Pengadilan Negeri Sanana

Perangkat Keras (hardware) yang tersedia untuk pengisian data SIPP adalah sebagai berikut: Server Centos 2 unit, Laptop 10 unit, PC 14 Unit, Printer 9 unit, UPS 10 unit. Adapun jaringan yang digunakan meliputi:

- LAN (Local Area Network)
- Jaringan Internet Speedy dengan kapasitas 10 Mbps

Perangkat lunak pendukung Teknologi Informasi untuk mendukung penyelesaian pekerjaan di pengadilan sebagai berikut :

- Administrasi Perkara : SIPP / CTS Versi 4.0.1
- Administrasi Keuangan : GPP, SAKPA, SPM, PP 39,
PINPPSPM, Silabi, AFS,
KOMDANAS
- Administrasi Kepegawaian/SDM : SAPK, SIKEP, KOMDANAS
- Administrasi Aset : Persediaan, SIMAK BMN
- Administrasi Perencanaan : Aplikasi RKA-K/L
Anggaran

5. Pengadilan Negeri Labuha

a. Perangkat Keras

1) Server

2) Personal Komputer (PC)

3) Note Book/Laptop

b. Perangkat Lunak

1) Sistem Operasi Komputer

- Windows : 26 Unit
- Linux : 1 Unit

2) Aplikasi umum yang terpasang dan digunakan

- Web Browser : Mozilla, internet explorer, Google Chrome
- PDF Reader : Nitro pdf, adobe reader 9
- Office : Open Office, Microsoft Office 2007
- Kompresi : Win rar
- Antivirus : Smadav, McAfee, Avast, Antivir, Kaspersky

3) Aplikasi Khusus yang terpasang dan digunakan untuk mendukung penyelesaian pekerjaan di pengadilan :

- Administrasi Perkara : SIPP / CTS, MIS, e-Court
- Administrasi Pelayanan : Aplikasi PTSP
- Administrasi Survey : Aplikasi IKM
Kepuasan
- Administrasi Keuangan : GPP, SAKTI, KOMDANAS,
SAKPA, SPM, SILABI,
SIMPONI, PP 39,
PINPPSPM, Silabi, AFS
- Administrasi Kepegawaian/ SDM : SAPK, SIKEP, KOMDANAS,
SIMARI
- Administrasi Aset : Persediaan, SIMAK BMN

- Administrasi Perencanaan : SAKTI
Anggaran

6. Pengadilan Negeri Soasio

a. Perangkat keras

- Server SIPP : 1 Unit
- Server Backup SIPP : 1 Unit
- Mikrotik Router Board : 1 unit
- Modem : 1 unit
- Acces point : 1 unit
- Hub/Switch : 1 unit
- PC/Lap Top Client : 34 unit

b. Perangkat Lunak pendukung Teknologi Informasi sebagai berikut :

- Administrasi Perkara : SIPP / CTS Versi 4.0.1
- Administrasi Keuangan : GPP, SAKPA, SPM, PP 39,
PINPPSPM, Silabi, AFS,
KOMDANAS
- Administrasi Kepegawaian/SDM : SAPK, SIKEP, KOMDANAS
- Administrasi Aset : Persediaan, SIMAK BMN
- Administrasi Perencanaan : Aplikasi SAKTI

Anggaran

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melakukan pembenahan dan perbaikan demi peningkatan sistem kerja yang efisien, efektifitas serta produktif pada Sumber Daya Manusia Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki standar pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima, serta dapat melakukan perbaikan yang cepat dengan melakukan perubahan dan pembaharuan pola pikir, serta inovasi-inovasi pelayanan publik kepada masyarakat pengguna dan pencari keadilan.

Dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. SK/KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan SK Ketua Mahkamah Agung RI No. SK/KMA 026 Tahun 2012 Tentang Standart Pelayanan Peradilan dimana pelayanan prima terus ditingkatkan, terutama pada pelayanan yang masih ada keluhan dari masyarakat antara lain informasi di Pengadilan yang belum transparansi, maka dituntut untuk menyediakan sarana pelayanan yang lebih maksimal kepada publik.



Gambar 5.1 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2018

Sejak Tahun 2017, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menerapkan Akreditasi Penjaminan Mutu dan telah dilakukan penilaian oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, masing-masing :

1. Pelaksanaan penilaian pertama Tanggal 20 Maret 2018 memperoleh predikat "B".
2. Pelaksanaan penilaian surveillence pertama Tanggal 20 Maret 2019 memperoleh predikat "A". (*Excellent*).
3. Pelaksanaan penilaian surveillence kedua Tanggal 03 Nopember 2020 memperoleh predikat "A". (*Excellent*).
4. Pelaksanaan penilaian surveillence ketiga Tanggal 07 Desember 2021 memperoleh predikat "A". (*Excellent*). Dengan nilai 716.

5. Pelaksanaan penilaian surveillance keempat Tanggal 08-09 Juni 2022 memperoleh predikat “A”. (*Excellent*), dengan nilai 743

Pada tahun 2023 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) mengeluarkan Keputusan Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 untuk memberlakukan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH). Program ini merupakan pengembangan dari Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang telah diterapkan sejak 2014. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi, integritas tenaga teknis, serta efektivitas administrasi dan manajemen pelayanan di lingkungan peradilan umum. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah dilakukan assessmen AMPUH oleh Ditjen Badan peradilan Umum pada tanggal 15 Agustus 2024, dan mendapat predikat “Unggul” dengan nilai 867,29 .



Gambar 5.2. Sertifikat AMPUH Badilum Tahun 2024

Adapun yang menjadi Ruang lingkup program AMPUH meliputi seluruh aspek tugas, fungsi, dan layanan yang ada di Pengadilan yang meliputi :

- Manajemen peradilan
- Administrasi perkara
- Administrasi persidangan
- Administrasi umum
- Pelayanan publik
- Pengelolaan kas
- Pengadaan barang dan jasa
- Pengawasan dan penanganan pengaduan
- Pembangunan Zona Integritas

Kriteria Penilaian AMPUH masih sama dengan APM, yaitu terdiri dari:

1. Kepemimpinan
2. Perencanaan Strategis
3. Pengelolaan Sumber Daya
4. Kualitas Pelayanan
5. Manajemen Proses
6. Dokumentasi dan pengarsipan
7. Hasil Kinerja

Berbeda dengan APM, Program AMPUH menetapkan lima kategori predikat:

1. Cukup
2. Baik
3. Utama

4. Unggul

5. Paripurna

Predikat Paripurna diberikan kepada satuan kerja yang telah memperoleh predikat Unggul selama tiga tahun berturut-turut. Program AMPUH tersebut bertujuan :

1. Meningkatkan kompetensi dan integritas tenaga teknis di lingkungan peradilan umum.
2. Menata ketertiban administrasi perkara secara menyeluruh.
3. Meningkatkan manajemen pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Implementasi program AMPUH diharapkan dapat:

- Memastikan pelayanan di peradilan umum sesuai standar mutu yang ditetapkan.
- Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kinerja peradilan umum.
- Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aspek administrasi dan manajemen.

Adapun pelaksanaan dan hasil penilaian Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai berikut :

Tabel 5.1 Hasil Penilaian AMPUH Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024

No	Pengadilan Negeri	Type / Kelas	Nilai AMPUH	Predikat
1	PN Ternate	IA	721,64	BAIK
2	PN Soasio	II	774,26	UTAMA
3	PN Tobelo	II	757,02	UTAMA
4	PN Labuha	II	785,96	UTAMA
5	PN Sanana	II	765,48	UTAMA
6	PN Bobong	II	722,16	BAIK

Salah satu Penilaian dalam AMPUH adalah Pembangunan Zona Integritas, menuju wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam hal evaluasi dan penilaian pembangunan Zona Integritas, Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga telah melakukan evaluasi dan penilaian baik secara mandiri maupun evaluasi penilaian ke Pengadilan Tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sedangkan untuk Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah dinilai oleh Ditjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, lewat aplikasi PMPZI.

Adapun Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024, dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Maluku Utara, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2 Hasil Evaluasi ZI Pengadilan Tinggi Maluku Utara

NO	NOMOR	PREDIKAT/TAHUN	LAMA PROSES	NILAI	STATUS
1	4-WBK-791-2024 Kegiatan Penilaian WBK 2024	WBK/2024	Mulai : 12 April 2024 Selesai : -	97.05	Evaluasi Selesai
2	4-WBK-791-32024 Kegiatan Penilaian WBK 2024	WBK/2023	Mulai : 12 April 2023 Selesai : -	97.05	Evaluasi Selesai
3	3-WBK-791-2022 Update Kegiatan Penilaian Menuju WBK2022	WBK/2022	Mulai : 31 Maret 2022 Selesai : -	96.93	Penilaian TPI Selesai
4	2-WBK-791-2021 Pengiriman Dokumen Laporan HasilPMPZI 2021.	WBK/2021	Mulai : 17 April 2021 Selesai : -	0.00	Penilaian TPI Selesai
5	1-WBK-791-2020 Pengiriman Dokumen Laporan HasilPMPZI.	WBK/2020	Mulai : 26 Februari 2020 Selesai : -	0.00	Penilaian TPI Selesai

2. Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Adapun Hasil evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara, adalah sebagai berikut :

HASIL NILAI PENILAIAN MANDIRI SATUAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK TAHUN 2024

Tabel 5.3 Hasil Evaluasi ZI Pengadilan Negeri se-Wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara

No	Satuan Kerja	Nilai SPKP Triwulan I Tahun 2024	Nilai SPAK Triwulan I Tahun 2024	Nilai SAKIP Terakhir	Nilai Hasil Evaluasi ZI Terakhir	Keterangan
1	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	3,97	3,99	70,60 (BB)	97,72	Diusulkan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK,
2	Pengadilan Negeri Ternate	4,00	4,00	72,45 (BB)	84,30	Diusulkan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK
3	Pengadilan Negeri Soasio	3,92	4,00	79 (BB)	81,08	Tidak diusulkan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK

4	Pengadilan Negeri Labuha	4,00	4,00	74,25 (BB)	81,99	Diusulkan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK
5	Pengadilan Negeri Tobelo	4,00	4,00		81,73	Tidak diusulkan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK
6	Pengadilan Negeri Sanana	-	4,00	72,4 (BB)	56,27	Tidak diusulkan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK
7	Pengadilan Negeri Bobong	-	3,95	70,9 (BB)	Belum dapat dievaluasi (syarat dokumen kurang)	Tidak diusulkan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dimana pelayanan prima terus ditingkatkan, terutama pada pelayanan yang masih ada keluhan dari masyarakat antara lain informasi di Pengadilan yang dianggap belum transparansi, maka dituntut untuk menyediakan sarana pelayanan yang lebih maksimal kepada publik.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkewajiban untuk selalu meningkatkan pelayanan agar dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan yang sederhana, transparansi, akuntabel, cepat, efisien efektif dan berkeadilan.

Idealnya sebuah badan pengadilan haruslah berorientasi pada pelayanan publik yang prima, sesuai dengan visi Mahkamah Agung yakni Terwujudnya badan peradilan yang agung. Selain itu salah satu agenda reformasi birokrasi di pengadilan adalah peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, diperlukan langkah-langkah yang berani dan strategis yakni diterapkannya sistim pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara berdasarkan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang transparan dan akuntabel yang didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019, perubahan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan agar lebih cepat, mudah, transparansi, terukur dan terjangkau.

Adapun laporan terkait jenis layanan PTSP untuk Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PTSP Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Jenis layanan di tingkat banding, terdiri dari :

a) Meja Pelayanan Kesekretariatan

- Penerimaan surat masuk : 1.812 Surat
- Surat Keluar : 2.462 Surat



Gambar 5.3. Aplikasi PTSP Pengadilan Tinggi Maluku Utara

- b) Meja Pelayanan Kepaniteraan : NIHIL
- c) Meja Pelayanan Informasi dan pengaduan : 23 Layanan



Gambar 5.4. Meja PTSP Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut telah ditunjuk dan ditetapkan para petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai berikut: (1). Pelayanan Bagian Kepaniteraan; (2). Pelayanan Informasi dan Pengaduan; (3). Pelayanan Bagian Kesekretariatan dan Pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bagian sebagai berikut :

1) Petugas Bagian Kepaniteraan

Menerima berkas perkara banding, laporan banding, terdakwa ditahan, permohonan penahanan dan perpanjangan penahanan.

2) Bagian Informasi dan Pengaduan

Informasi: Menerima permohonan informasi dari masyarakat.

Pengaduan: Menerima pengaduan dari masyarakat.

3) Petugas Bagian Kesekretariatan

Melakukan pelayanan penerimaan surat masuk, memproses dan mengolah serta mendistribusikan kepada bagian yang dituju dan juga memproses surat keluar.

2. PTSP Pengadilan Negeri Ternate

Jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing meja pelayanan PTSP Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Ternate Kelas IA tahun 2024 adalah:

a) Meja Pelayanan Umum

- Penerimaan surat masuk : 1024 Surat
- Surat Keluar : 3357 Surat

b) Meja Pelayanan Kepaniteraan Tipikor

- Penerimaan pelimpahan perkara : 32 Layanan
- Pendaftaran permohonan praperadilan : Nihil
- Penerimaan permohonan upaya hukum : 31 Layanan
- Penerimaan memori / kontra memori : 66 Layanan
- Penerimaan permohonan izin penyitaan : 25 Layanan
- Penerimaan permohonan izin penggeledahan : 1 Layanan
- Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan : 2 Layanan
- Penerimaan permohonan izin besuk : Nihil

c) Meja Pelayanan Kepaniteraan Perdata

- Pendaftaran perkara : 265 Layanan
- Pendaftaran permohonan upaya hukum : 44 Layanan
- Penerimaan memori / kontra memori : 14 Layanan
- Permohonan dan pengambilan sisa panjar : 237 Layanan
- Pendaftaran permohonan Eksekusi : 11 Layanan
- Pendaftaran Permohonan Konsinyasi : Nihil
- Permohonan pencabutan perkara & upaya hukum : 1 Layanan

d) Meja Pelayanan Kepaniteraan Hukum

- Pendaftaran Surat Kuasa	: 524 Layanan
- Permohonan Surat Kuasa Insidentil	: 2 Layanan
- Permintaan Salinan Putusan	: 158 Layanan
- Permintaan surat keterangan melalui eraterang	: 827 Layanan
- Permohonan surat keterangan	: 23 Layanan
- Legalisir surat	: 3 Layanan
- Permohonan Penelitian	: 47 Layanan

e) Meja Pelayanan Kepaniteraan PHI

- Pendaftaran perkara	: 21 Layanan
- Pendaftaran permohonan upaya hukum	: 3 Layanan
- Penerimaan memori / kontra memori	: 3 Layanan
- Penerimaan pendaftaran perjanjian bersama	: Nihil
- Permohonan pencabutan perkara & upaya hukum	: Nihil

f) Meja Pelayanan Kepaniteraan Pidana :

- Penerimaan pelimpahan perkara	: 265 Layanan
- Pendaftaran permohonan praperadilan	: 5 Layanan
- Penerimaan permohonan upaya hukum	: 21 Layanan
- Penerimaan memori / kontra memori	: 21 Layanan
- Penerimaan permohonan izin penyitaan	: 338 Layanan
- Penerimaan permohonan izin penggeledahan	: 40 Layanan
- Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan	: 181 Layanan
- Penerimaan permohonan izin besuk	: Nihil

Dengan melihat jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, dapat dikatakan hampir semua jenis pelayanan administrasi baik teknis maupun administrasi di Pengadilan Negeri Ternate

Kelas IA, dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*).



Gambar 5.5. Meja Pelayanan PTSP Bagian Kepaniteraan dan Kesekretariat

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN NEGERI LABUHA

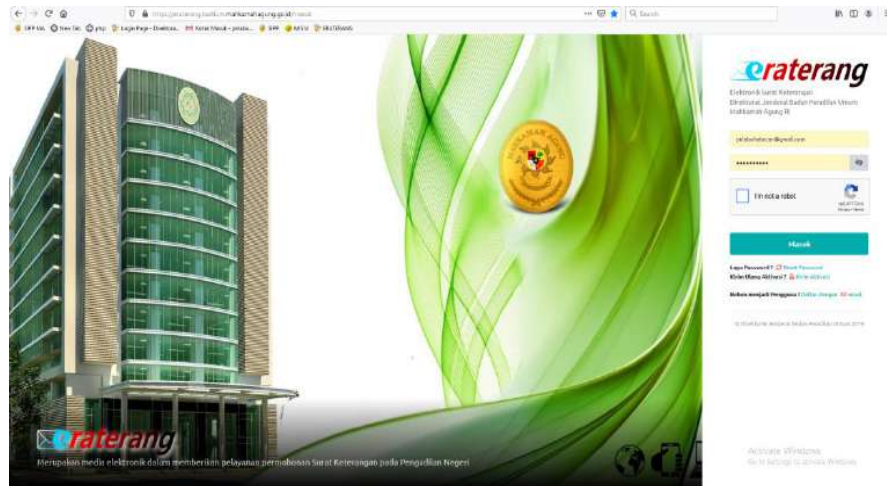
Register Buku Tamu

#	Tanggal	Masa Register	Tujuan	Nama Tamu	Kepolisian	#
1	04/06/2020	20/07/20	Kerus Pengadilan	Pharwanad Nlan	Kurangnya Disipliner	
2	08/09/2020	20/07/20	Kerus Pengadilan	Bark ISM	Stafet atasi	
3	05/09/2020	20/07/20	Kerus Pengadilan	YMS DI A KADIBAN	Kurangnya Dengan Kerus Pengadilan Negeri Labuha	
4	20/09/2020	20/07/20	Kerus Pengadilan	Mykon Pnggan	menangis, bisa sama dengan berbagai permasalahan penyengkerta transportasi	
5	20/09/2020	20/07/20	Kerus	MOHAMMAD AGUS	Kontribusi Pengantar Tunt Putusan Labuh	
6	20/09/2020	20/07/20	Kerus Pengadilan	Faisal M. Tuhin	Layanan Pemilih	
7	20/09/2020	19/08/20	Kerus	Ismael R. Saggil	Kurangnya Dengan Pemilih PH Labuha	
8	02/09/2020	19/08/20	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepaniteraan Muda Labuhan	Ismael	kurat Kurangnya Tunt Putusan Di Putusan	
9	08/09/2020	19/08/20	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepaniteraan Muda Labuhan	Gusti Setiawan Karamandih	Kurangnya Dengan Kerus Pemilih Untuk Mendapat Akta Perawatan	
10	22/09/2020	19/08/20	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepaniteraan Muda Labuhan	Andi N	Suara Kurangnya Tunt Putusan Di Putusan / Putusan	

Showing 1 to 10 of 201 entries

© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia
versi 1.0.0

Gambar 5.6. Aplikasi registrasi buku tamu



Gambar 5.7. Aplikasi eraterang



Gambar 5.8. E-Court

3. PTSP Pengadilan Negeri Soasio

Jenis-Jenis Layanan Peradilan Yang Pelaksanannya Dilakukan Secara Terpadu meliputi :

1) Kepaniteraan Perdata

- Pendaftaran perkara gugatan;
- Pendaftaran perkara gugatan sederhana;
- Pendaftaran verset atas putusan verstek;
- Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;

- Pendaftaran perkara permohonan;
- Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauankembali;
- Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;
- Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;
- Permohonan dan pengambilan turunan putusan;
- Pendaftaran permohonan eksekusi;
- Pendaftaran permohonan konsinyasi;
- Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;
- Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi serta konsinyasi;

2) Kepaniteraan Pidana

- Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
- Pendaftaran permohonan praperadilan;
- Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
- Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

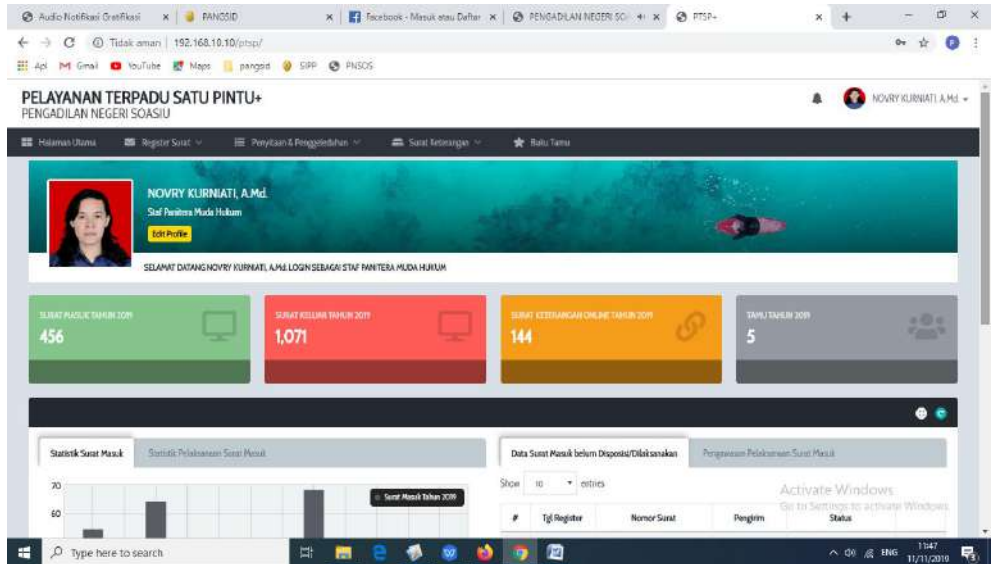
- Penerimaan permohonan izin/persetujuan pengeledahan;
- Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan;
- Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti;
- Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan;
- Penerimaan permohonan izin besok;
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana;

3) Kepaniteraan Hukum

- Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;
- Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris;
- Permohonan pendaftaran penolakan waris;
- Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana & perdata;
- Permohonan melaksanakan penelitian dan riset;
- Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Permohonan pendaftaran surat kuasa;
- Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran;
- Permohonan legalisasi surat;
- Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;
- Layanan pengaduan/SIWAS-MARI ;
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya;

Aplikasi Pelayanan yang digunakan :

1. PTSP+



Gambar 5.9 Aplikasi PTSP+

2. Aplikasi ERATERANG



Gambar 5.10. Aplikasi eraterang

3. Aplikasi PANGSID



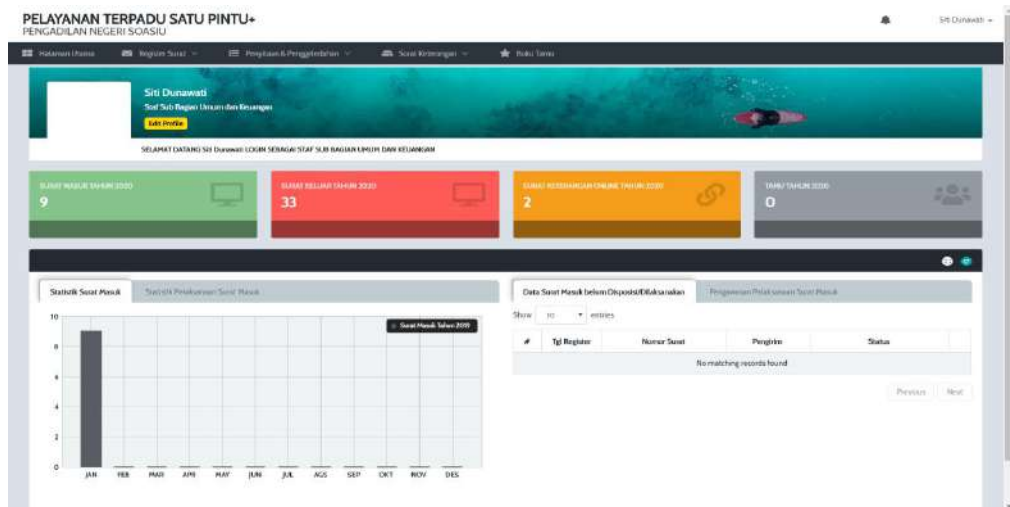
Gambar 5.11. Aplikasi PANGSID

4) Sub Bagian Umum dan Keuangan

- Penerimaan surat masuk dan Disposisi secara elektronik;
- Pengiriman surat keluar, berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
- Pengisian Buku Tamu.

Dengan melihat jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, dapat dikatakan hampir semua jenis pelayanan administrasi baik teknis maupun administrasi di Pengadilan Negeri Soasio Kelas II, dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service).

- APLIKASI PTSP+



Gambar 5.12. Aplikasi PTSP+

a. Inovasi Pelayanan Publik

Praktik penyelenggaraan layanan publik harus membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, dan layanan publik juga merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk Indonesia, sehingga upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk, serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan hal yang diperlukan. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka perlu ada suatu inovasi pelayanan publik sebagai solusi untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan publik agar bisa berjalan sesuai dengan norma-norma yang diinginkan, yakni mengedepankan norma keadilan, transparan, akuntabel, dan terbuka. Oleh karena itu, dalam artikel ini mencoba untuk menggambarkan kondisi pelayanan publik di

Indonesia serta pentingnya penerapan inovasi pelayanan, terutama pada Pengadilan Negeri Soasio.

Aplikasi Inovasi adalah semua aplikasi yang dibuat secara mandiri maupun oleh pihak ketiga. Aplikasi tersebut dikembangkan berdasarkan Kebutuhan untuk membuat efektifitas dan sistematis di Pengadilan Negeri Soasio. Adapun Inovasi pada Pengadilan Negeri Soasio Kelas II termuat dalam daftar sebagai berikut :

1) Sistem Pelayanan Dua Puluh Menit (Simpel)

Sistem Pelayanan Dua Puluh Menit (Simpel) merupakan kebijakan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Kelas II yang pada pokoknya lamanya waktu proses penyelesaian pelayanan pembuatan surat keterangan dikerjakan dan diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) menit (jika permohonan atau persyaratan surat keterangan telah terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang).



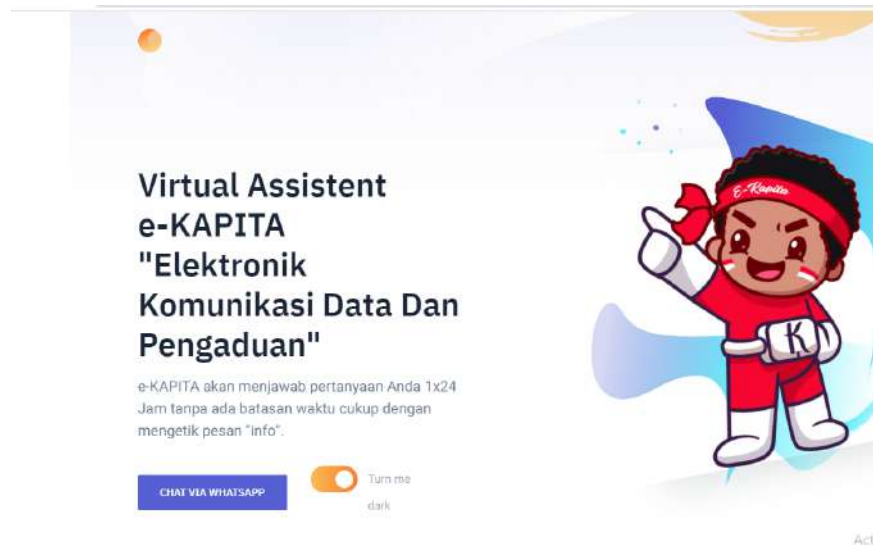
Gambar 5.13. Banner SimPel 20 Menit

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor: W28-U1/847/KP.03/VIII/2020, pelayanan yang diberikan dalam kebijakan ini adalah sebagai berikut

- Surat Keterangan Tidak Dipidana;
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
- Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang baik atas nama perorangan/badan hukum menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- Pengesahan akta CV/PT;
- Pendaftaran Surat Kuasa;
- Leges Alat Bukti.

2) Aplikasi E-Kapita PN Soasio

Merupakan sebuah engine (mesin) yang bekerja layaknya HUMAS yang terintegrasi dengan sebuah sistem yang akan memberikan segala kebutuhan informasi bagi masyarakat di Pengadilan Negeri Soasio secara Virtual. e-KAPITA merupakan singkatan dari Elektronik Komunikasi Data Dan Pengaduan. KAPITA sendiri memiliki makna Pemimpin atau yang membawa perubahan sehingga diharapkan e-KAPITA dapat membawa perubahan di PN SOASIO khususnya perubahan dalam kemudahan dalam mengakses informasi elektronik di Pengadilan Negeri Soasio. Adapun yang dapat dilayani oleh e-Kapita adalah informasi seputar Status Perkara, Biaya Perkara, Denda Tilang, Surat Keterangan, serta Pengaduan & Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat & Survey Persepsi Anti Korupsi.



Gambar 5.14. Virtual Assistant e-KAPITA

4. PTSP Pengadilan Negeri Tobelo

Jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing meja pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Tobelo Kelas II tahun 2024 adalah :

a) Meja Pelayanan Umum

- Penerimaan surat masuk : 237 Surat
- Surat Keluar : 1525 Surat

b) Meja Pelayanan Kepaniteraan Perdata dan E-Court

- Pendaftaran perkara : 218 Layanan
- Pendaftaran permohonan upaya hukum : 17 Layanan
- Penerimaan memori / kontra memori : 14 Layanan
- Permohonan dan pengambilan sisa panjar : 191 Layanan
- Pendaftaran permohonan Eksekusi : 2 Layanan
- Pendaftaran Permohonan Konsinyasi : Nihil
- Permohonan pencabutan perkara & upaya hukum : 9 Layanan

c) Meja Pelayanan Kepaniteraan Hukum

- Pendaftaran Surat Kuasa : 252 Layanan
- Permohonan Surat Kuasa Insidentil : 1 Layanan
- Permintaan Salinan Putusan : 129 Layanan
- Permintaan surat keterangan melalui eraterang : 100 Layanan
- Permohonan surat keterangan : 73 Layanan
- Legalisir surat : Nihil
- Permohonan Penelitian : 2 Layanan

d) Meja Pelayanan Kepaniteraan Pidana :

- Penerimaan pelimpahan perkara : 102 Layanan
- Pendaftaran permohonan praperadilan : 2 Layanan
- Penerimaan permohonan upaya hukum : 21 Layanan
- Penerimaan memori / kontra memori : 24 Layanan
- Penerimaan permohonan izin penyitaan : 172 Layanan
- Penerimaan permohonan izin penggeledahan : 4 Layanan
- Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan : 77 Layanan
- Penerimaan permohonan izin besuk : 89 Layanan

Dengan melihat jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, dapat dikatakan hampir semua jenis pelayanan administrasi baik teknis maupun administrasi di Pengadilan Negeri Tobelo Kelas II, dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*).



#	Tanggal Register	Nomor Agenda	Sifat Surat	Pengirim	Status	Waktu	#
1	15/01/2024	10/2024	Eksekusi	Kantor Wilayah Sudut Perbatasan Nasional Program Maluku Utara	Diproses	Kepada: ABGUA, SAMPUNG MA BUD S.H. (Penerima)	3 Hari
2	15/01/2024	10/2024	Eksekusi	Kantor Wilayah Sudut Perbatasan Nasional Program Maluku Utara	Diproses	Kepada: ABGUA, SAMPUNG MA BUD S.H. (Penerima)	3 Hari
3	15/01/2024	10/2024	Eksekusi	Kantor Wilayah Sudut Perbatasan Nasional Program Maluku Utara	Diproses	Kepada: ABGUA, SAMPUNG MA BUD S.H. (Penerima)	3 Hari
4	15/01/2024	10/2024	Eksekusi	Kantor Wilayah Sudut Perbatasan Nasional Program Maluku Utara	Diproses	Kepada: ABGUA, SAMPUNG MA BUD S.H. (Penerima)	3 Hari
5	15/01/2024	10/2024	Eksekusi	Kantor Wilayah Sudut Perbatasan Nasional Program Maluku Utara	Diproses	Kepada: ABGUA, SAMPUNG MA BUD S.H. (Penerima)	3 Hari
6	15/01/2024	10/2024	Eksekusi	Kantor Wilayah Sudut Perbatasan Nasional Program Maluku Utara	Diproses	Kepada: ABGUA, SAMPUNG MA BUD S.H. (Penerima)	3 Hari

Gambar 5.15. Ruang PTSP dan Aplikasi PTSP+

Inovasi Pelayanan Publik

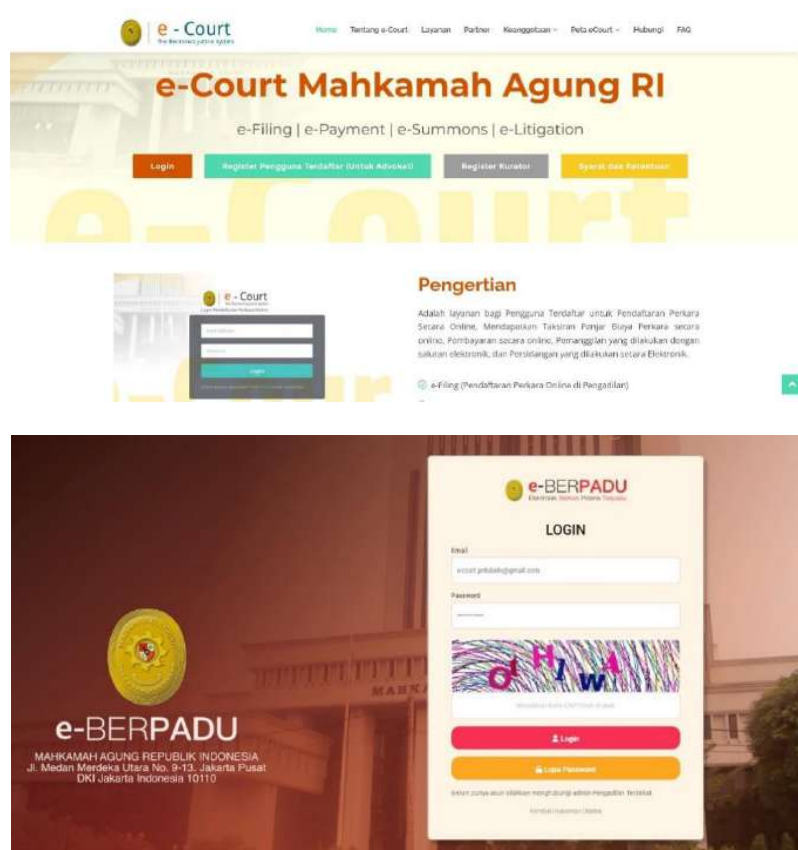
Pelaksanaan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Tobelo dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik pada Pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun fasilitas pelayanan publik yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tobelo yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah sebagai berikut :

- Ruang Sidang, yang terdiri dari 3 (tiga) ruang sidang biasa dan 1 (satu ruang sidang anak);
- Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Ruang Mediasi;
- Ruang Tamu Terbuka;

- e. Ruang Tunggu Sidang;
- f. Ruang Tunggu Anak,
- g. Ruang Tunggu Jaksa;
- h. Ruang Tahanan;
- i. Parkir Pegawai dan Pengunjung;
- j. Smoking Area;
- k. Kursi roda dan jalur difabel (penyandang cacat);
- l. Titik Kumpul Bencana.

Fasilitas lainnya yang tidak kalah penting dalam pelayanan publik antara lain berbentuk aplikasi :

- a. Aplikasi e-Court dan e-Berpadu Mahkamah Agung RI;



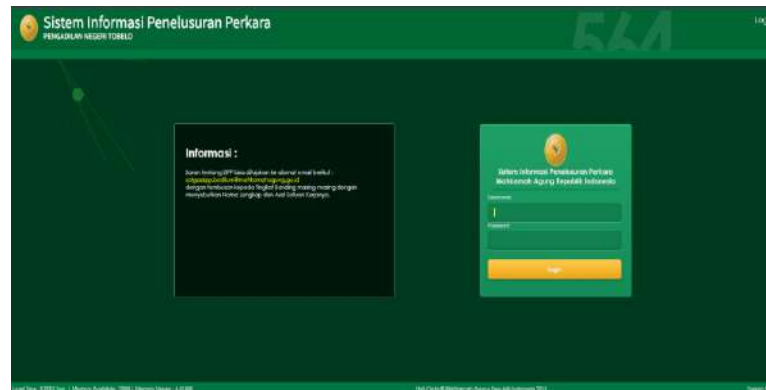
Gambar 5.16 Aplikasi e-Court dan e-Berpadu

- b. Aplikasi eraterang Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;



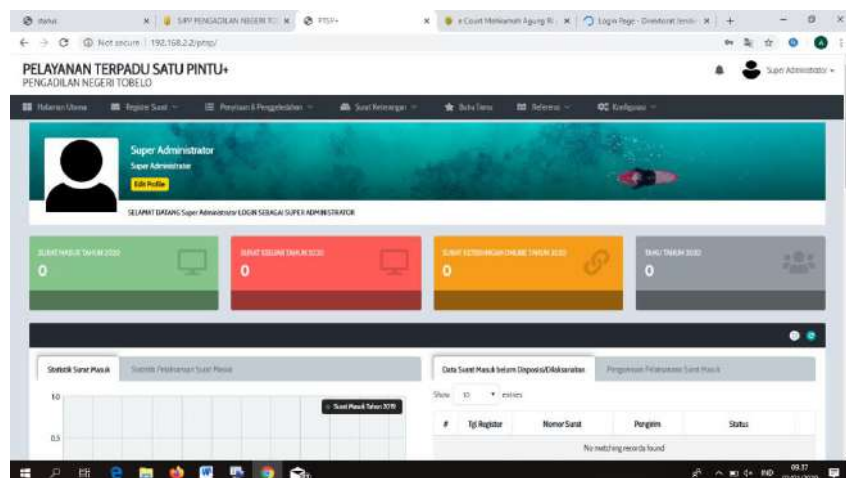
Gambar 5.17 Aplikasi Eraterang

- c. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);



Gambar 5.18. Aplikasi SIPP

- d. Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+);



Gambar 5.19. Aplikasi PTSP+

e. Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS);



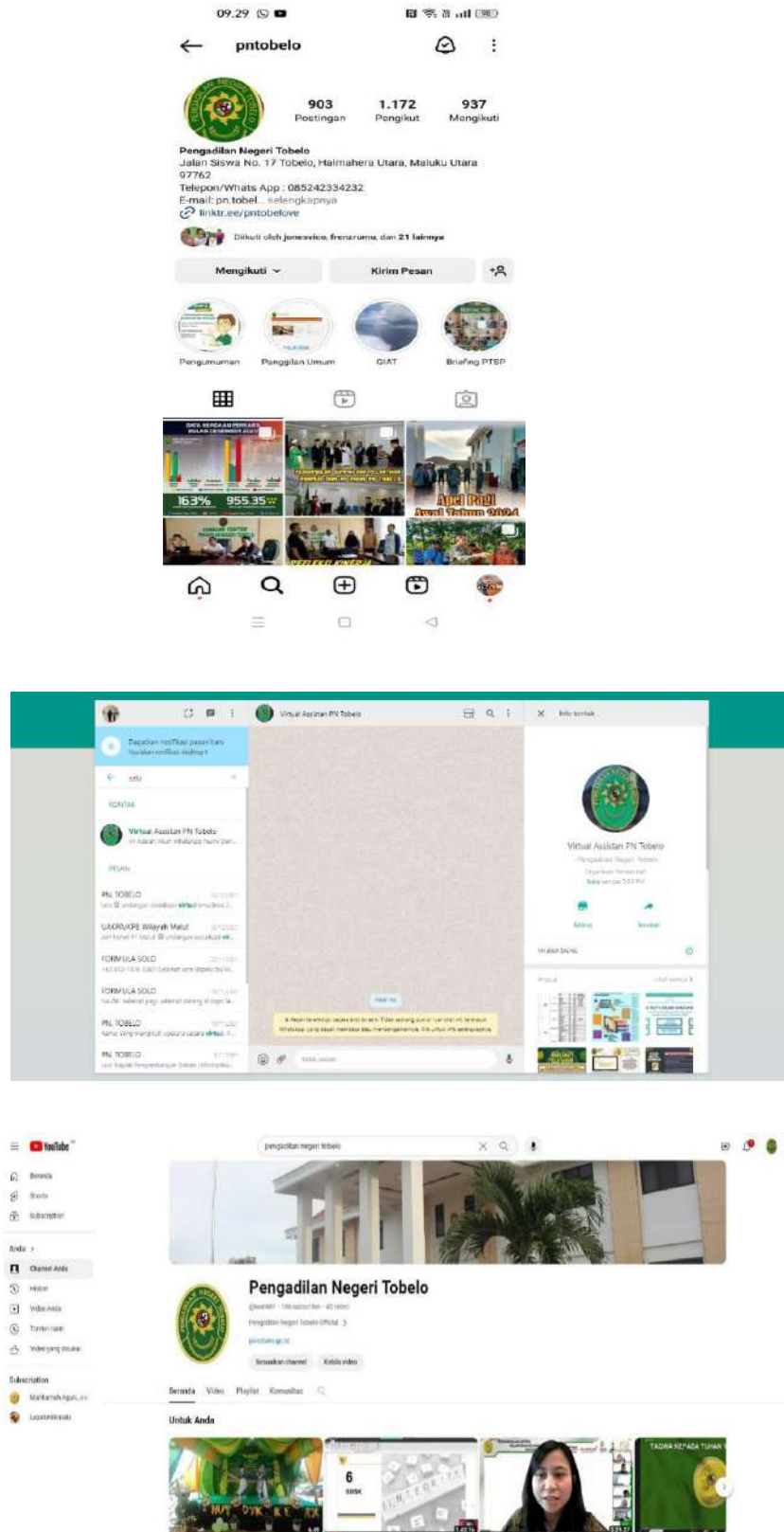
Gambar 5.20 Aplikasi SIWAS

f. Website Pengadilan Negeri Tobelo;



Gambar 5.21 Website Pengadilan

g. Pemanfaatan Media Sosial dalam memberikan informasi.



Gambar 5.22. Media Sosial

h. Kaca Mata Baca



Gambar 5.23. Kaca Mata Baca

5. PTSP Pengadilan Negeri Labuha

Jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing meja pelayanan

PTSP Pengadilan Negeri Labuha Kelas II tahun 2024 adalah :

a) Meja Pelayanan Umum

- Penerimaan surat masuk : 357 Surat
- Surat Keluar : 434 Surat

b) Meja Pelayanan Kepaniteraan Perdata

- Pendaftaran perkara : 64 Layanan
- Pendaftaran permohonan upaya hukum : 11 Layanan
- Penerimaan memori / kontra memori : 11 Layanan
- Permohonan dan pengambilan sisa panjar : 53 Layanan
- Pendaftaran permohonan Eksekusi : 2 Layanan
- Pendaftaran Permohonan Konsinyasi : Nihil
- Permohonan pencabutan perkara & upaya hukum : 16 Layanan

c) Meja Pelayanan Kepaniteraan Hukum

- Pendaftaran Surat Kuasa : 239 Layanan
- Permohonan Surat Kuasa Insidentil : 2 Layanan
- Permintaan Salinan Putusan : 24 Layanan
- Permintaan surat keterangan melalui eraterang : 185 Layanan
- Permohonan surat keterangan : 185 Layanan
- Legalisir surat : 300 Layanan
- Permohonan Penelitian : 1 Layanan

d) Meja Pelayanan Kepaniteraan Pidana :

- Penerimaan pelimpahan perkara : 58 Layanan
- Pendaftaran permohonan praperadilan : Nihil
- Penerimaan permohonan upaya hukum : 9 Layanan
- Penerimaan memori / kontra memori : 9 Layanan
- Penerimaan permohonan izin penyitaan : 8 Layanan
- Penerimaan permohonan izin penggeledahan : 8 Layanan
- Penerimaan permohonan perpanjangan : 45 Layanan
- penahanan
- Penerimaan permohonan izin besuk : 704 Layanan

Jenis-Jenis Layanan Peradilan Yang Pelaksanannya Dilakukan
Secara Terpadu meliputi :

a) **Kepaniteraan Perdata**

- Pendaftaran perkara gugatan;
- Pendaftaran perkara gugatan sederhana;
- Pendaftaran verset atas putusan verstek;

- Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;
- Pendaftaran perkara permohonan;
- Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;
- Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;
- Permohonan dan pengambilan turunan putusan;
- Pendaftaran permohonan eksekusi;
- Pendaftaran permohonan konsinyasi;
- Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;
- Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi serta konsinyasi;

b) Kepaniteraan Pidana

- Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
- Pendaftaran permohonan praperadilan;
- Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
- Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

- Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeladahan;
- Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan;
- Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti;
- Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan;
- Penerimaan permohonan izin besok;
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana;

c) Kepaniteraan Hukum

- Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;
- Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris;
- Permohonan pendaftaran penolakan waris;
- Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
- Permohonan melaksanakan penelitian dan riset;
- Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Permohonan pendaftaran surat kuasa;
- Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran;
- Permohonan legalisasi surat;
- Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;
- Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya;

d) Sub Bagian Umum dan Keuangan

- Penerimaan surat masuk dan Disposisi secara elektronik;
- Pengiriman surat keluar, berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
- Pengisian Buku Tamu.

Dengan melihat jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, dapat dikatakan hampir semua jenis pelayanan administrasi baik teknis maupun administrasi di Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*).

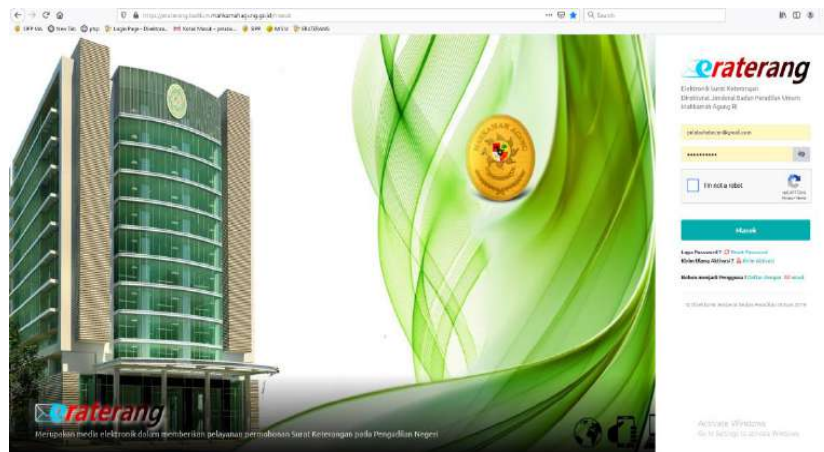
Dalam hal penerapan Reward and punishment, setiap bulan dilaksanakan evaluasi terhadap seluruh petugas PTSP, yang kemudian dinilai oleh Tim penilai internal untuk selanjutnya diberikan penghargaan kepada Petugas PTSP terbaik dan pembinaan terhadap Petugas PTSP yang nilainya masih dibawah rata-rata. Selain itu, sebagai bentuk komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II Nomor: 245/KPN.W28-U3/HK1.2.5/XI/2024 tentang Pemberlakuan sistem kompensasi terhadap penerima layanan pada Pengadilan Negeri Labuha Kelas II.



Gambar 5.24. Meja Pelayanan PTSP



Gambar 5.25. Penghargaan terhadap Petugas PTSP terbaik



Gambar 5.26. Aplikasi eraterang

6. PTSP Pengadilan Negeri Sanana

Jenis layanan yang diberikan oleh masing – masing meja pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Negeri Sanana Kelas II tahun 2024 adalah :

a) Meja Pelayanan Umum

- Penerimaan surat masuk : 834 Surat
- Surat Keluar : 1120 Surat

b) Meja Pelayanan Kepaniteraan Perdata

- Pendaftaran perkara : 56 Layanan
- Pendaftaran permohonan upaya hukum : 2 Layanan
- Penerimaan memori / kontra memori : 2 Layanan
- Permohonan dan pengambilan sisa panjar : 3 Layanan
- Pendaftaran permohonan Eksekusi : 1 Layanan
- Pendaftaran Permohonan Konsinyasi : Nihil
- Permohonan pencabutan perkara & upaya hukum : 1 Layanan

c) Meja Pelayanan Kepaniteraan Hukum

- Pendaftaran Surat Kuasa : 53 Surat
- Permohonan Surat Kuasa Insidentil : 1 Surat
- Permintaan Salinan Putusan : 63 Layanan

- Permintaan surat keterangan melalui eraterang : Nihil
- Permohonan surat keterangan : 74 Surat
- Legalisir surat : Nihil
- Permohonan Penelitian : Nihil

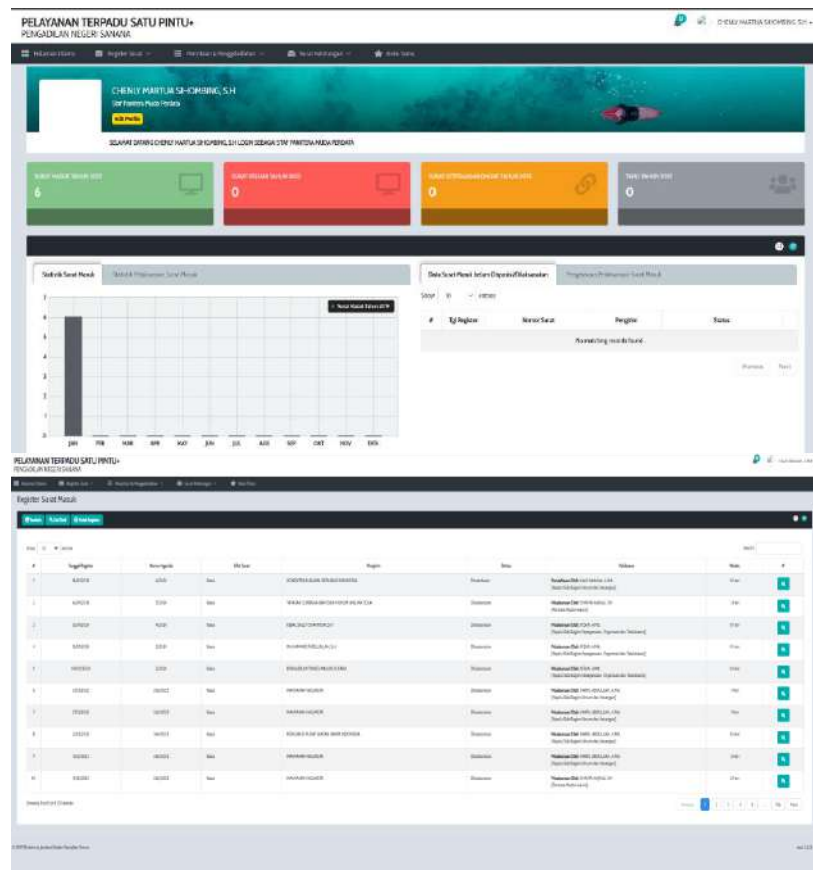
d) Meja Pelayanan Kepaniteraan Pidana :

- Penerimaan pelimpahan perkara : 69 Layanan
- Pendaftaran permohonan praperadilan : 1 Layanan
- Penerimaan permohonan upaya hukum : 22 Layanan
- Penerimaan memori / kontra memori : 30 Layanan
- Penerimaan permohonan izin penyitaan : 65 Layanan
- Penerimaan permohonan izin penggeledahan : 2 Layanan
- Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan : 79 Layanan
- Penerimaan permohonan izin besuk : Nihil

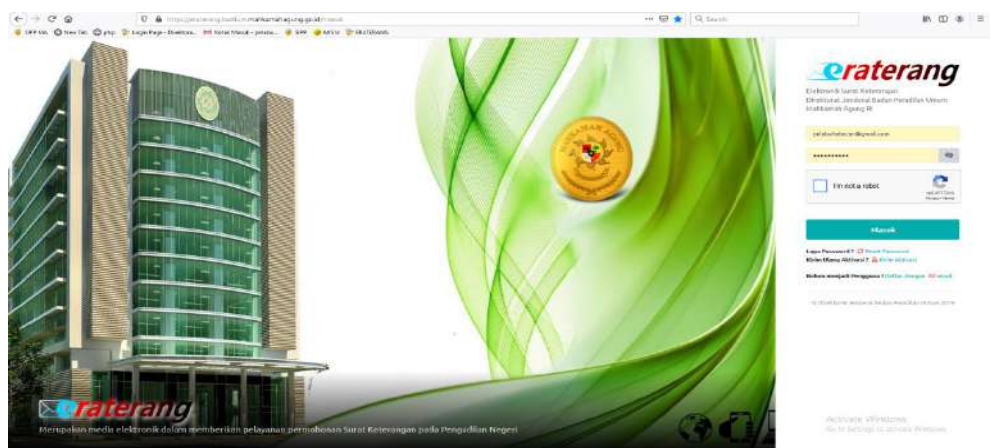
Dengan melihat jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, dapat dikatakan hampir semua jenis pelayanan administrasi baik teknis maupun administrasi di Pengadilan Negeri Sanana kelas II, dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service).



Gambar 5.27. Pelayanan Terpadu Satu pintu Pengadilan Negeri Sanana



Gambar 5.28. Register Surat pada aplikasi PTSP+



Gambar 5.29. Aplikasi eraterang



Gambar. 5.30. Pelayanan PTSP pada meja e-Court

7. PTSP Pengadilan Negeri Bobong

Meja pelayanan PTSP Pengadilan Negeri/ Bobong Kelas II B tahun 2024 adalah :

a) Meja Pelayanan Umum

- Penerimaan surat masuk : 415 Surat
- Surat Keluar : 774 Surat

b) Meja Pelayanan Kepaniteraan Perdata

- Pendaftaran perkara : 1 Layanan
- Pendaftaran permohonan upaya hukum : Nihil
- Penerimaan memori / kontra memori : Nihil
- Permohonan dan pengambilan sisa panjar : 1 Layanan
- Pendaftaran permohonan Eksekusi : Nihil
- Pendaftaran Permohonan Konsinyasi : Nihil
- Permohonan pencabutan perkara & upaya hukum : Nihil

c) Meja Pelayanan Kepaniteraan Hukum

- Pendaftaran Surat Kuasa : 2 Layanan
- Permohonan Surat Kuasa Insidentil : Nihil
- Permintaan Salinan Putusan : 1 Layanan

- Permintaan surat keterangan melalui eraterang : 376 Layanan
- Permohonan surat keterangan : Nihil
- Legalisir surat : 2 Layanan
- Permohonan Penelitian : Nihil

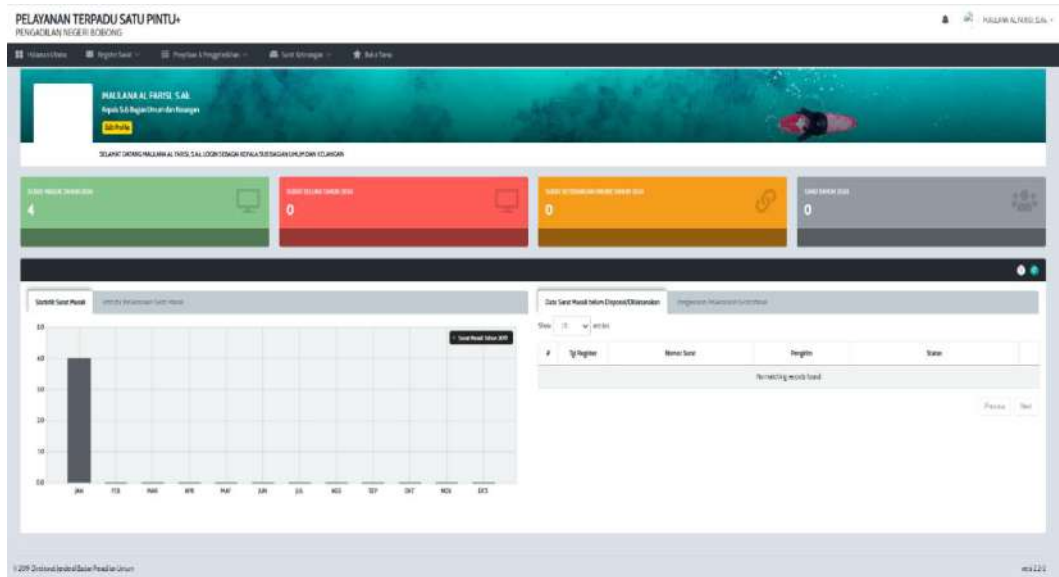
d) Meja Pelayanan Kepaniteraan Pidana :

- Penerimaan pelimpahan perkara : 18 Layanan
- Pendaftaran permohonan praperadilan : Nihil
- Penerimaan permohonan upaya hukum : Nihil
- Penerimaan memori / kontra memori : 3 Layanan
- Penerimaan permohonan izin penyitaan : 30 Layanan
- Penerimaan permohonan izin penggeledahan : 3 Layanan
- Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan : 10 Layanan
- Penerimaan permohonan izin besuk : Nihil

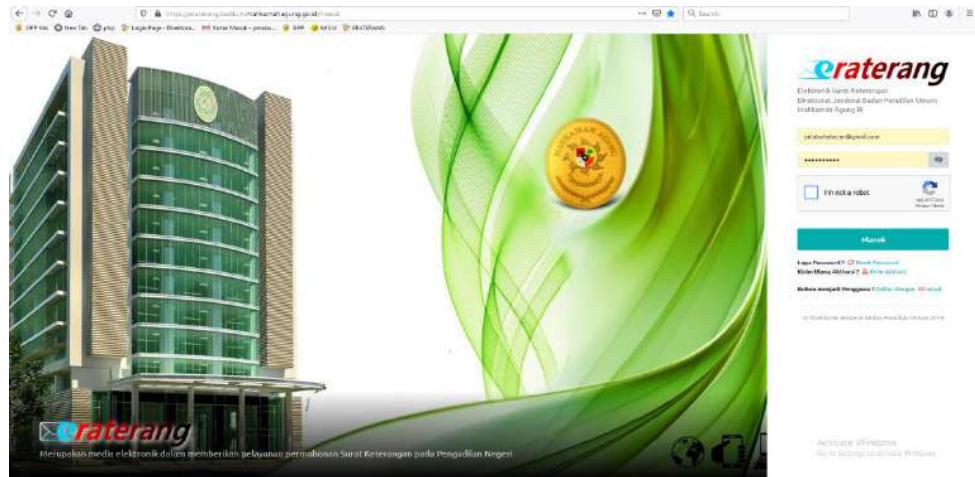
Dengan melihat jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, dapat dikatakan hampir semua jenis pelayanan administrasi baik teknis maupun administrasi di Pengadilan Negeri Bobong Kelas II B, dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*).



Gambar 5.31. Meja Brifing Pelayanan PTSP Bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan



Gambar 5.32. Pelayanan Terpadu Satu Pintu+



Gambar 5.33. Aplikasi eraterang

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melakukan pembenahan dan perbaikan demi peningkatan sistim kerja yang efisien, efektifitas serta produktifitas pada Sumber Daya Manusia Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki standart pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen moderen yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima, sehingga dapat melakukan perbaikan yang cepat dengan melakukan perubahan dan pembaharuan pola pikir, serta inovasi-inovasi pelayanan publik kepada masyarakat pengguna dan pencari keadilan.

1. Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Penyelenggaraan pelayanan publik yang transparansi dan akuntabel yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat secara umum guna mendapatkan berbagai informasi yang dicari, sehingga

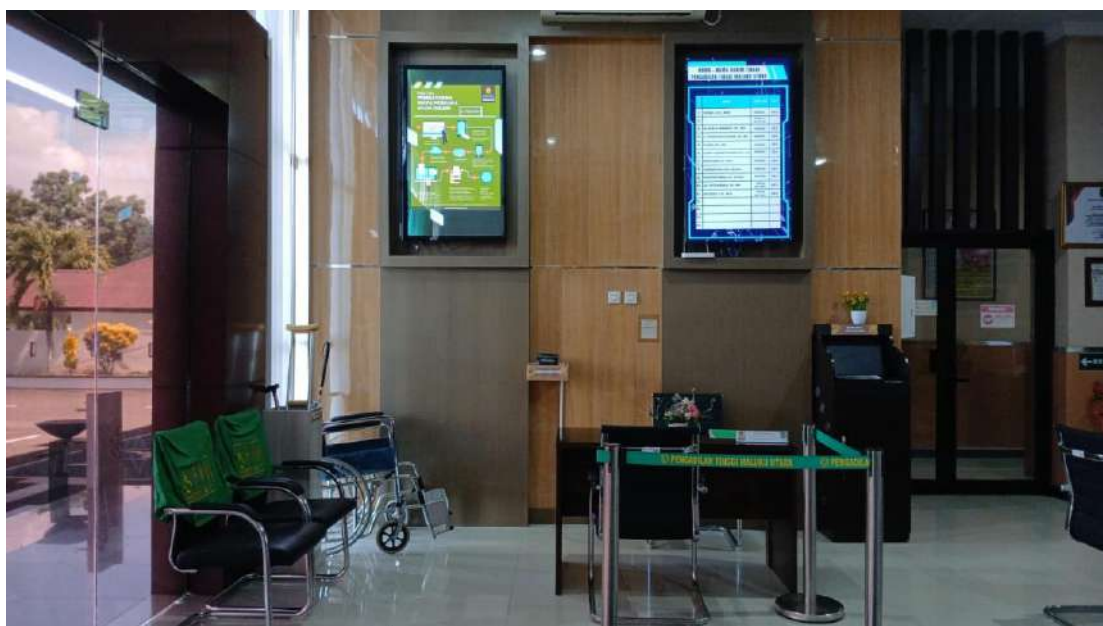
dalam pelaksanaannya diperlukan adanya suatu inovasi mengenai pelayanan publik sebagai solusi untuk mengefektifkan peneyelenggaraan pelayan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Adapun dalam hal Inovasi pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menyediakan fasilitas layanan, antara lain sebagai berikut :

- a) Menyediakan layanan monitor/layar informasi sebagai sarana informasi penanganan dan penyelesaian perkara yang dapat diakses oleh pencari keadilan maupun kepada masyarakat secara umum;
- b) Menyediakan kursi roda dan tongkat sebagai alat bantu bagi tamu disabilitas yang berkunjung ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- c) Menyediakan sarana jalur disabilitas, kursi tunggu khusus disabilitas, antrian khusus disabilitas, dan parkir khusus disabilitas dan ibu hamil;
- d) Menyediakan sanitizer, masker dan alat pengukur suhu untuk para pengunjung dengan penerapan protocol kesehatan selama dalam masa pandemic Covid 19;
- e) Menyediakan bingkisan sebagai kompensasi atas keterlambatan layanan;
- f) Menyediakan air minum dan media baca berupa koran dan majalah di ruang tamu terbuka;
- g) Aplikasi survey kepuasan masyarakat, lewat monitor touch screen dan lewat website Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- h) Menyediakan pamflet-pamflet/brosur pelayanan dalam hal pelayanan Informasi kepada masyarakat;

- i) Memfasilitasi WIFI gratis bagi pengunjung dan kotak pengaduan dan saran;
- j) Memfasilitasi layanan charge HP dan Mini Coffee untuk pengunjung;

Dengan menerapkan standar pelayanan publik yang baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.



Gambar 5.34. Monitor Informasi



Gambar 5.35. Kursi roda bagi penyandang disabilitas



Gambar 5.36. Kursi tamu bagi penyandang disabilitas



Gambar 5.37. Tongkat bagi penyandang disabilitas dan payung



Gambar 5.38. Alat bantu pendengaran Tunarungu



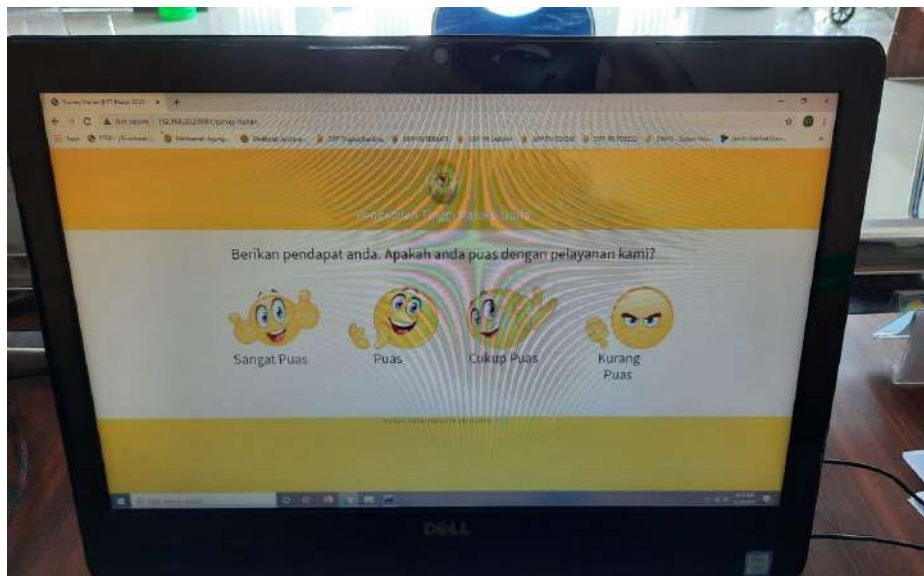
Gambar 5.39. Alat Peraga Tunanetra



Gambar 5.40. Mesin antrian



Gambar 5.41. Alat pengukur suhu



Gambar 5.42. Monitor Touch screen untuk aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat



Gambar 5.43. Kotak Gratifikasi



Gambar 5.44. Kotak Pengaduan dan Saran



Gambar 5.45. Layanan media baca buku, koran dan majalah



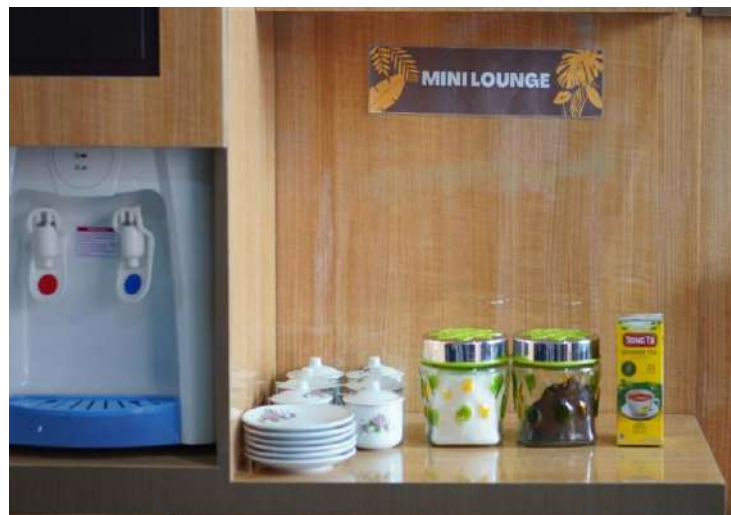
Gambar 5.46. Ruang tamu terbuka



Gambar 5.47. Bingkisan kompensasi atas keterlambatan layanan



Gambar 5.48. Layanan Charge HP



Gambar 5.49. Layanan air minum



Gambar 5.50. Pamflet dan Brosur pelayanan

Selain fasilitas inovasi layanan tersebut di atas, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara menjadikan pelayanan publik sebagai unggulan kinerjanya, maka dalam melaksanakan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, tepat waktu dan disiplin, diciptakan beberapa inovasi mandiri dan menerapkan berbagai inovasi tersebut, mulai dari Aplikasi E-PTSP dan aplikasi-aplikasi lain yang menyangkut *core business* pada Kepaniteraan maupun pada kinerja pendukung di kesekretariatan, yaitu sebagai berikut :

1. SIPP : Aplikasi mengenai administrasi perkara secara elektronik yang pengisiannya dilakukan secara tepat waktu sesuai SOP dan aturan yang berlaku.
2. E Berpadu : Aplikasi yang meliputi berbagai macam pelayanan, berupa pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin penyitaan, penggeledahan, secara elektronik.
3. SISUPER : Aplikasi mengenai survey pelayanan elektronik untuk SKM, SAPK dan survey harian.
4. SIKEP : Aplikasi mengenai pengelolaan data Kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung RI.
5. E BIMA : Suatu sistem untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI.
6. SAKTI : Aplikasi yang berbasis android untuk mendukung implementasi pengelolaan Keuangan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

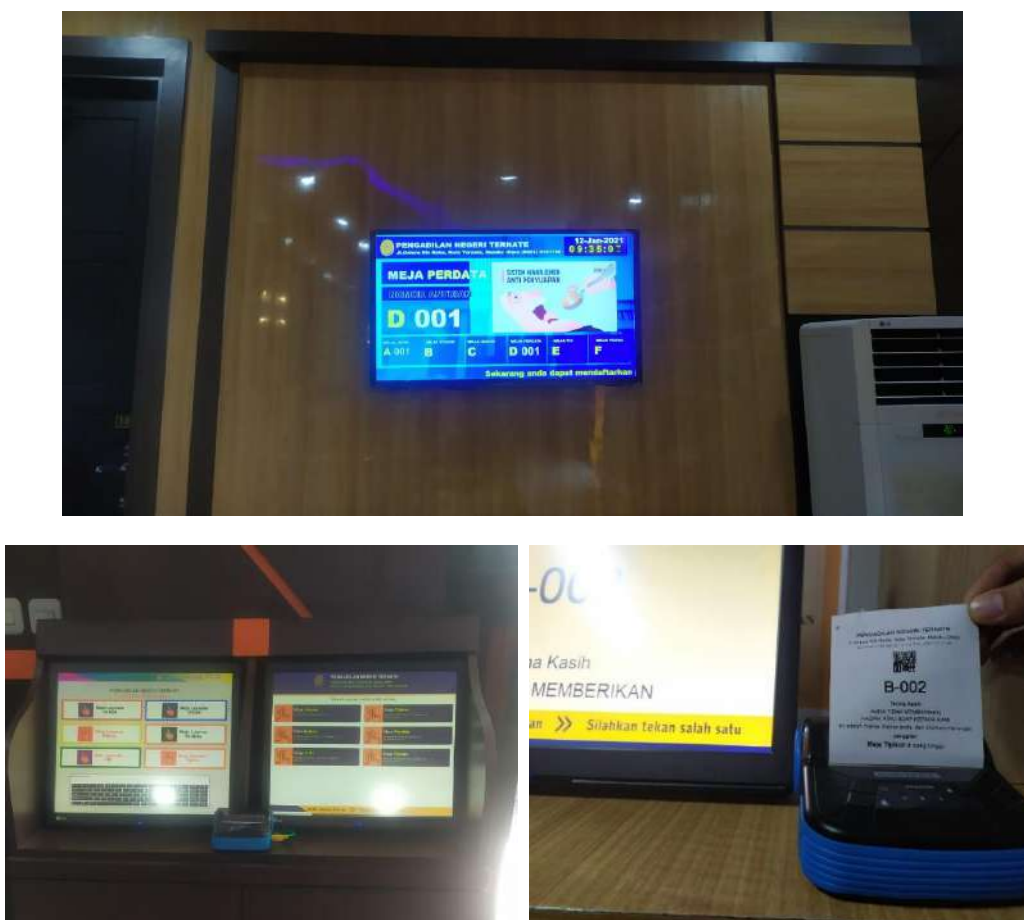
7. SIMAN BMN : Aplikasi mengenai pengelolaan BMN.
8. E Dokumen : aplikasi penyimpanan dokumen eviden ZI dan APMPUH.
9. Aplikasi Arsip Perkara : Aplikasi penelusuran lokasi penyimpanan berkas perkara dengan cepat.
10. Aplikasi Surat PTSP : Aplikasi Disposisi Surat Masuk dan Monitoring Surat Keluar.
11. E-Aparatur : Aplikasi Permintaan Alat Tulis Kantor.
12. Buku Tamu Online : Aplikasi Buku Tamu Online.
13. SIPAPU : Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.
14. Komdanas : Komunikasi Data Nasional MA.
15. LLK : Laporan Lembar Kerja Harian secara elektronik.
16. E-Court : Elektronik Pengadilan.
17. SIWAS : Sistem Informasi Pengawasan dari BAWAS MA.
18. LAPOR : Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat dari Kementerian Setneg.
19. E Pelita : Layanan Inovasi Fasilitas Disabilitas
20. Aplikasi AMPUH : Sistem Informasi Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh.

Di samping itu, pelaksanaan transparansi kinerja pelayanan publik yang bersifat inovatif juga telah dilaksanakan secara transparansi melalui inovasi kinerja dalam media social, yakni Facebook, Youtube, Twitter, Tiktok, Instagram dan Website Pengadilan Tinggi Maluku utara.

2. Pengadilan Negeri Ternate

Dalam memberikan Pelayanan Publik yang maksimal kepada Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Ternate juga melakukan beberapa inovasi-inovasi sebagai wujud pengabdian, beberapa Inovasi yang telah dilakukan antara lain:

1) Aplikasi Antrian PTSP



Gambar 5.51. Aplikasi Antrian PTSP

Dengan adanya aplikasi antrian PTSP ini proses pelayanan lebih teratur, para pengguna layanan pengadilan tidak lagi berebutan untuk mendapatkan pelayanan, karena para pengguna diwajibkan mengambil nomor antrian dan duduk di kursi tunggu dan ketika tiba saat untuk giliran

untuk dilayani maka sistem akan otomatis memanggil nomor antrian tersebut.

2) Aplikasi Panggilan Sidang dan Informasi



Gambar 5.52. Aplikasi PangSid

Aplikasi Panggilan Sidang dan Informasi (Pangsid), fungsi dari aplikasi ini adalah ketika para pihak sudah lengkap dan siap untuk sidang maka tidak lagi dipanggil secara manual akan tetapi panggilan otomatis dari aplikasi pangsid tersebut, dan juga untuk panggilan rutin seperti apel serta panggilan lainnya bisa kostum panggil dari aplikasi ini.

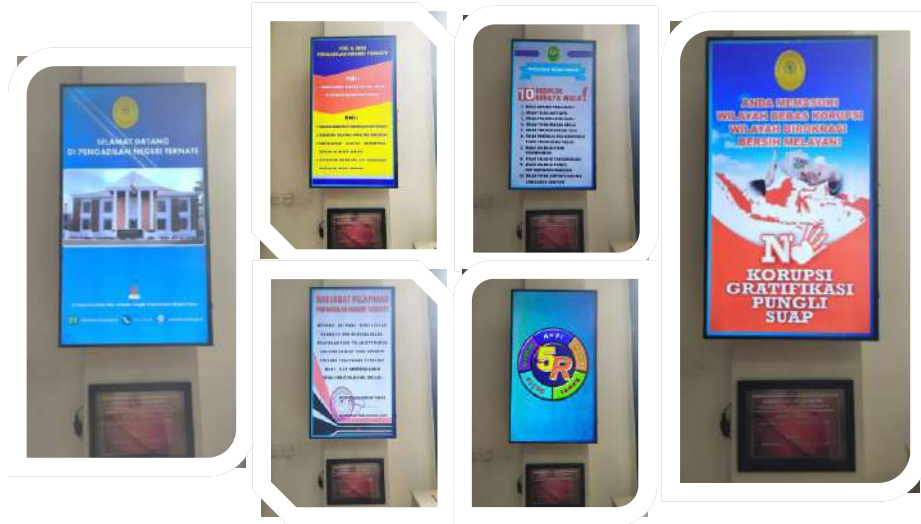
3) Kotak Gratifikasi



Gambar 5.53. Kotak Gratifikasi

Kotak Gratifikasi merupakan salah bentuk implementasi penerapan Sistem manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

4) Electronic Banner System (BESTEM)



Gambar 5.54. Electric Banner System

Dengan terbatasnya area publik untuk menampilkan informasi-informasi dalam bentuk banner maka Inovasi banner elektronik sebagai pengganti banner manual yang dapat menampung banyak banner sekaligus dalam satu media tanpa memakan banyak ruang dan biaya yang harus dikeluarkan setiap pencetakan banner secara manual.

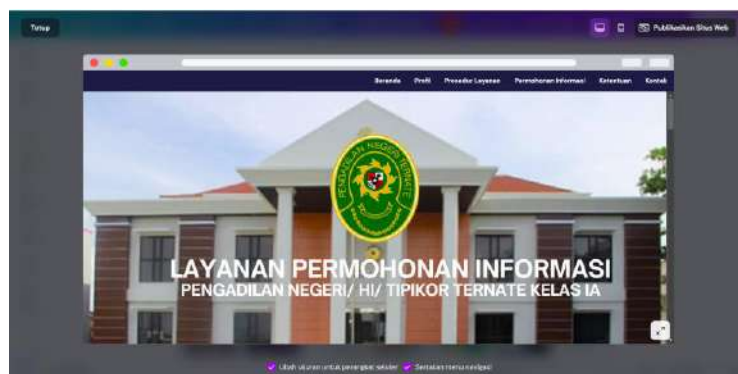
5) Aplikasi Survei Kepuasan bagi pengguna PTSP

Aplikasi ini hadir sebagai pengganti kuisioner yang biasanya dalam bentuk kertas dan sangat menyulitkan dalam proses pengisian dan rekapan, dengan aplikasi ini dapat mengurangi penggunaan kertas dan sangat mudah dalam proses rekapan.



Gambar 5.55. Aplikasi Survei Kepuasan bagi pengguna PTSP

6) Aplikasi Permohonan Layanan Informasi



Gambar 5.56. Aplikasi Survei Kepuasan bagi pengguna PTSP

Aplikasi pelayanan permohonan informasi publik secara online mempermudah masyarakat sebagai pencari keadilan maupun pengguna layanan pengadilan memiliki opsi pilihan untuk mendapatkan layanan informasi publik. Masyarakat hanya cukup mengakses link atau website yang telah ditetapkan yang kemudian mengisi serta melampirkan berkas-berkas yang disyaratkan dan menunggu permohonan tersebut untuk di tindak lanjuti. Apabila terdapat kekurangan dalam dokumen persyaratan maka akan dihubungi untuk diberikan kesempatan untuk melengkapi tetapi apabila permohonan tersebut berdasarkan uji konsekuensi informasi termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan atau tidak terdapat kepentingan yang diterima maka permohonan tersebut tidak dapat dilanjutkan dengan memberikan penjelasan penolakan.

7) Petunjuk Permohonan Izin Besuk Tahanan



Gambar 5.57. Petunjuk Izin Besuk Tahanan

Adanya penyesuaian dan peningkatan fasilitas untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan khususnya pengguna layanan izin besuk, melalui video tata cara penginputan izin besuk pada e-berpadu diharapkan mampu memudahkan pencari keadilan khususnya pengguna layanan izin besuk dalam memperoleh dan mengakses layanan pengadilan secara adil.

3. Pengadilan Negeri Soasio

Adapun Inovasi pada Pengadilan Negeri Soasio Kelas II termuat dalam daftar sebagai berikut :

1) Sistem Pelayanan Dua Puluh Menit (Simpel)



Gambar 5.58. Sistem Pelayanan Dua Puluh Menit (Simpel)

Sistem Pelayanan Dua Puluh Menit (Simpel) merupakan kebijakan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Kelas II yang pada pokoknya lamanya waktu proses penyelesaian pelayanan pembuatan surat keterangan dikerjakan dan diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) menit (jika permohonan atau persyaratan surat keterangan telah terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang).

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor: W28-U1/847/KP.03/VIII/2020, pelayanan yang diberikan dalam kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- Surat Keterangan Tidak Dipidana;
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
- Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang baik atas nama perorangan/badan hukum menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- Pengesahan akta CV/PT;
- Pendaftaran Surat Kuasa;
- Leges Alat Bukti.

2) Aplikasi E-Kapita PN Soasio

Merupakan sebuah engine (mesin) yang bekerja layaknya HUMAS yang terintegrasi dengan sebuah sistem yang akan memberikan segala kebutuhan informasi bagi masyarakat di Pengadilan Negeri Soasio secara Virtual. e-KAPITA merupakan singkatan dari Elektronik Komunikasi Data Dan Pengaduan. KAPITA sendiri memiliki makna Pemimpin atau yang membawa perubahan sehingga diharapkan e-

KAPITA dapat membawa perubahan di PN SOASIO khususnya perubahan dalam kemudahan dalam mengakses informasi elektronik di Pengadilan Negeri Soasio. Adapun yang dapat dilayani oleh e-Kapita adalah informasi seputar Status Perkara, Biaya Perkara, Denda Tilang, Surat Keterangan, serta Pengaduan & Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat & Survey Persepsi Anti Korupsi.



Gambar 5.59. Virtual Assistant e-KAPITA

4. Pengadilan Negeri Tobelo

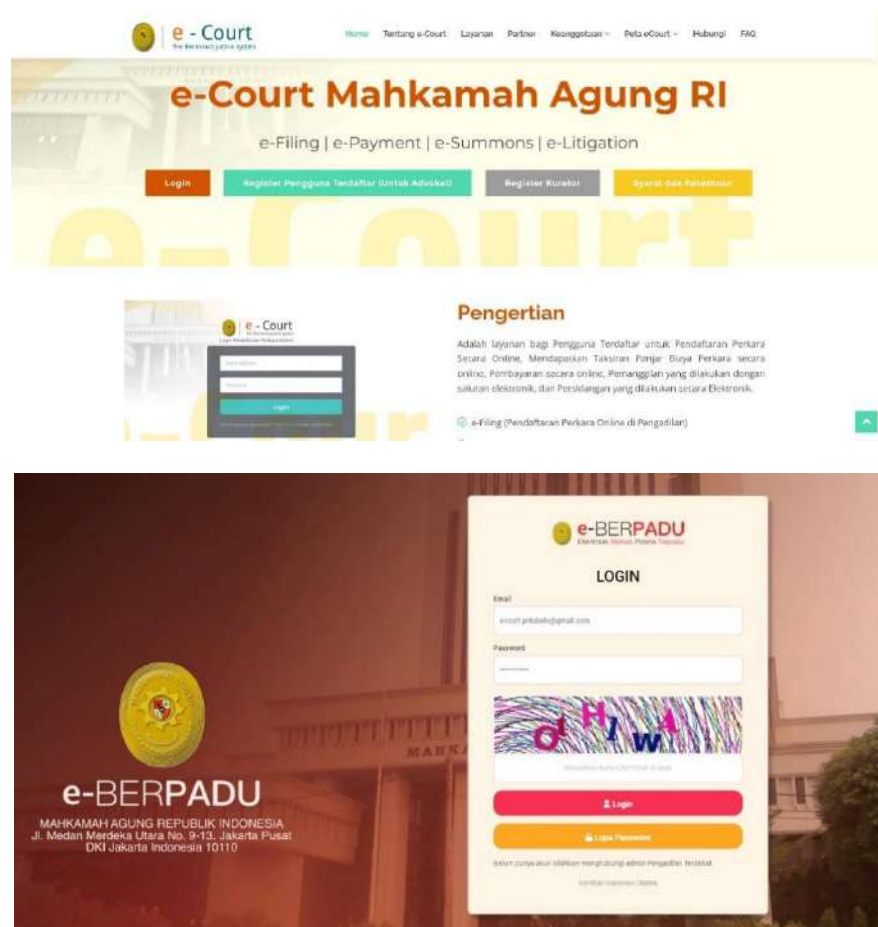
Adapun fasilitas pelayanan publik yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tobelo yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Ruang Sidang, yang terdiri dari 3 (tiga) ruang sidang biasa dan 1 (satu ruang sidang anak);
- b. Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Ruang Mediasi;
- d. Ruang Tamu Terbuka;
- e. Ruang Tunggu Sidang;

- f. Ruang Tunggu Anak,
- g. Ruang Tunggu Jaksa;
- h. Ruang Tahanan;
- i. Parkir Pegawai dan Pengunjung;
- j. Smoking Area;
- k. Kursi roda dan jalur difabel (penyandang cacat);
- l. Titik Kumpul Bencana.

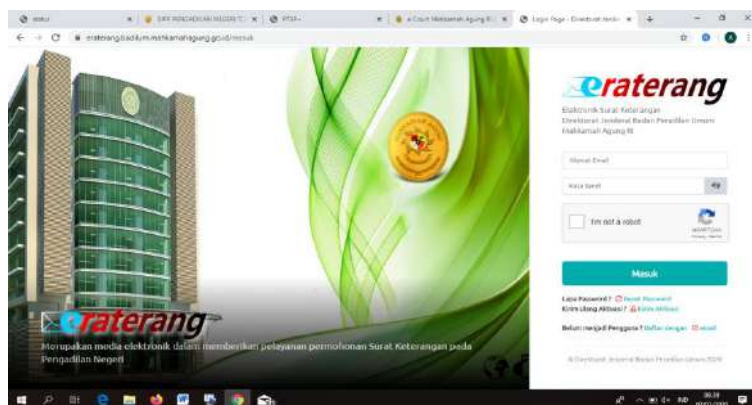
Fasilitas lainnya yang tidak kalah penting dalam pelayanan publik antara lain berbentuk aplikasi :

- a. Aplikasi e-Court dan e-Berpadu Mahkamah Agung RI;



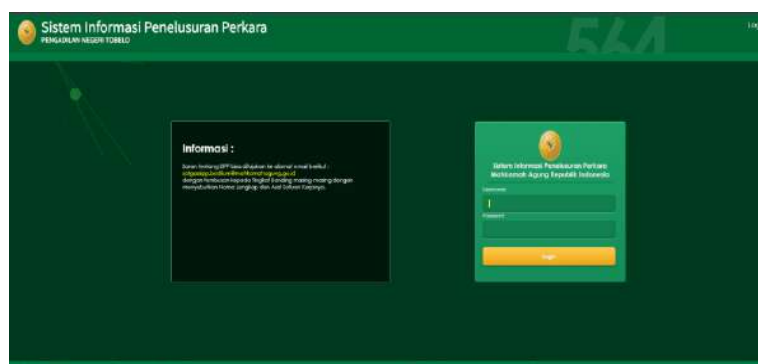
Gambar 5.60. Aplikasi e-Court dan e-Berpadu

- b. Aplikasi eraterang Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;



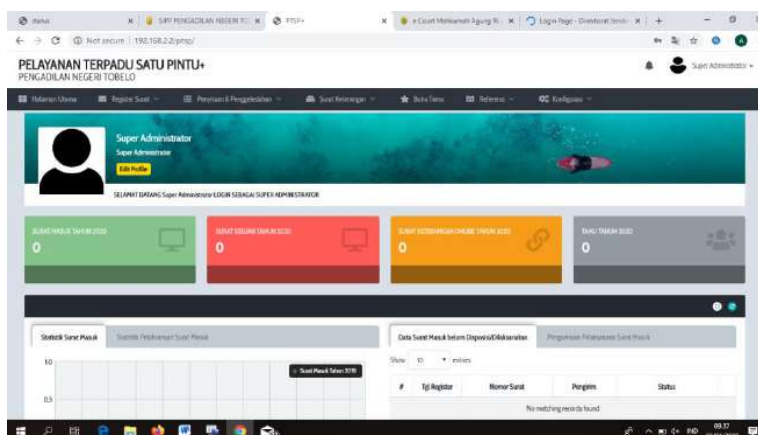
Gambar 5.61. Aplikasi Eraterang

- c. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);



Gambar 5.62. Aplikasi SIPP

- d. Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+);



Gambar 5.63. Aplikasi PTSP+

e. Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS);



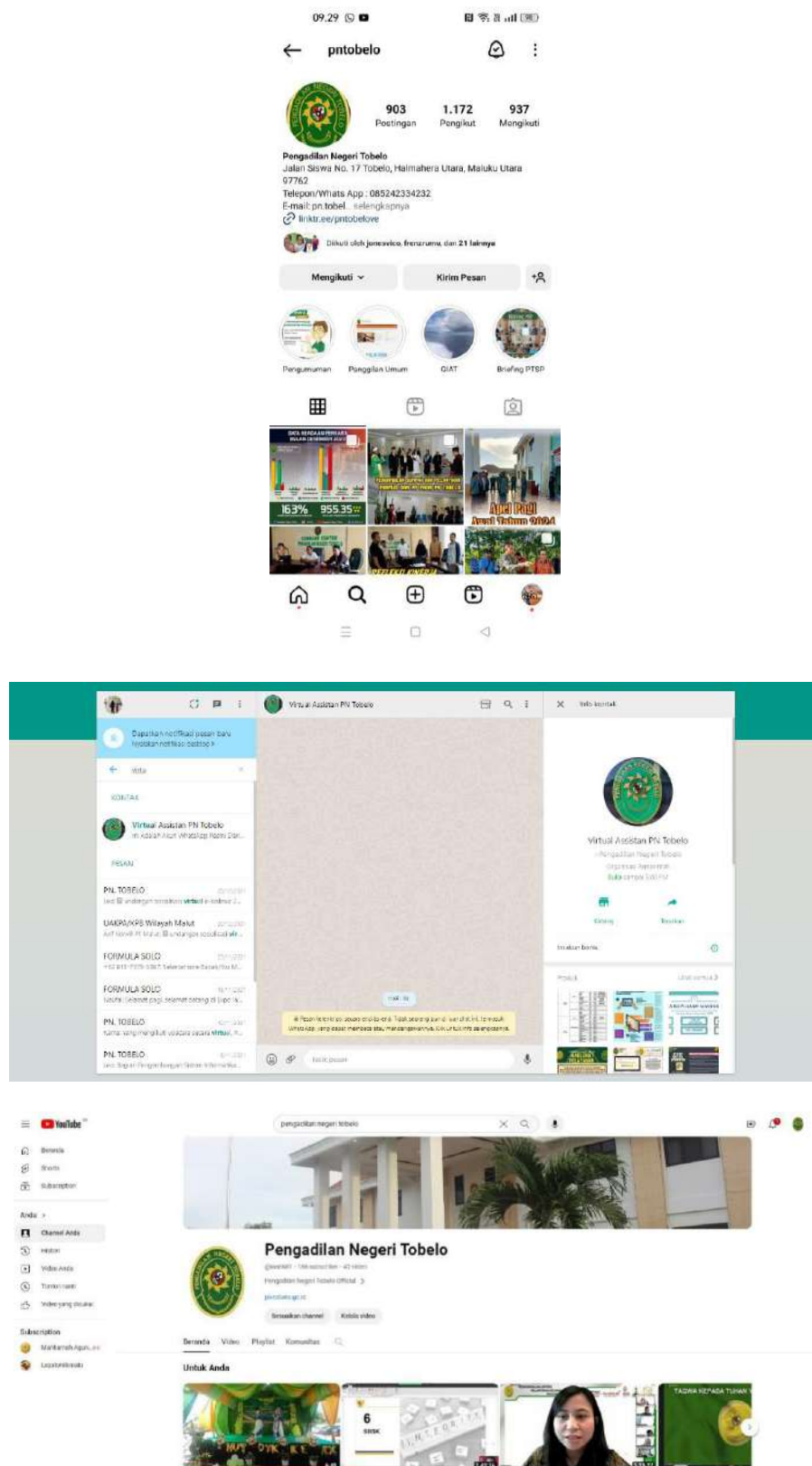
Gambar 5.64. Aplikasi SIWAS

f. Website Pengadilan Negeri Tobelo;



Gambar 5.65. Website Pengadilan

g. Pemanfaatan Media Sosial dalam memberikan informasi.



Gambar 5.66. Media Sosial

h. Kaca Mata Baca

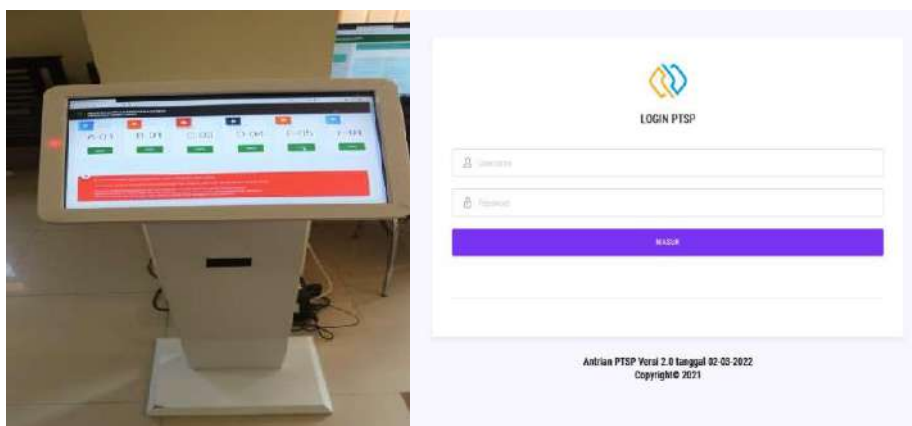


Gambar 5.67. Kaca Mata Baca

5. Pengadilan Negeri Labuha

Dalam memberikan Pelayanan Publik yang maksimal kepada Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Labuha Kelas II juga melakukan beberapa inovasi-inovasi sebagai wujud pengabdianya, beberapa Inovasi yang telah dilakukan antara lain:

1) Antrian PTSP



Gambar 5.68. Antrian PTSP

Alur pelaksanaan Aplikasi antrian e-PTSP yaitu Pengunjung mengambil memilih tujuan pelayanan dengan cara memilih layanan di layar komputer, tiket antrian akan tercetak di printer, kemudian pengunjung menunggu sampai tiba giliran layanan yang akan tampil di layar TV dan beserta suara nomor urut antrian yang dipanggil.

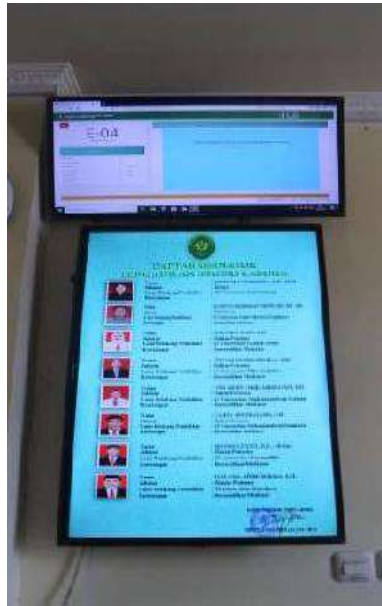
2) Antrian Prioritas



Gambar 5.69. Antrian Prioritas

Dalam memberikan keadilan bagi Pengguna pelayanan, maka Pengadilan Negeri Labuha Kelas II mengeluarkan Inovasi sebuah Kartu Antrian Prioritas yang dapat digunakan bagi Kelompok Rentan Seperti Wanita Hamil, Lansia, Ibu Membawa Anak, Dan Penyandang Disabilitas. Pemberian Kartu Prioritas ini akan dilakukan oleh Petugas Keamanan yang ada didepan pintu kepada Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Labuha Kelas II.

3) Monitor Informasi



Gambar 5.70. Monitor Informasi

Layar monitor Informasi berfungsi untuk panggilan antrian PTSP dan panggilan Pemberitahuan Sidang secara audio visual.

4) Mesin EDC

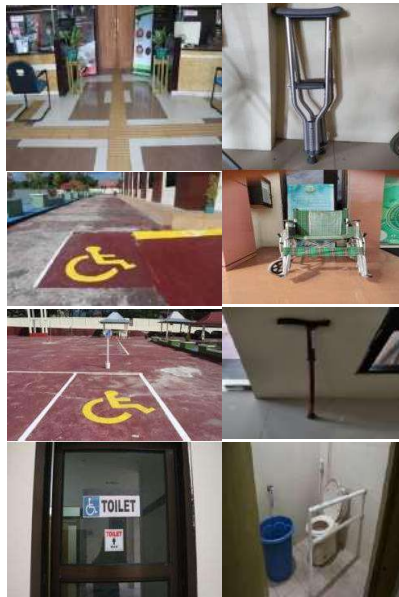


Gambar 5.71. Monitor EDC

Kegunaan dari Mesin EDC (Elektronik Data Capture) adalah sebagai alat penyeteroran biaya perkara bagi masyarakat pencari keadilan.

Kegunaan dari inovasi ini adalah pemberitahuan menyangkut dengan peringatan perilaku anti gratifikasi secara elektronik sesuai dengan surat edaran dari Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 17 Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang himbauan pembuatan audio peringatan perilaku anti gratifikasi.

7) Jalur Khusus Disabilitas



Gambar 5.74. Jalur dan Fasilitas Disabilitas

Sesuai dengan surat keputusan Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Labuha Kelas II melakukan pembenahan sarana dan prasarana disabilitas. Pembenahan tersebut mulai dengan memeriksa kelengkapan sarana seperti parkir khusus disabilitas, kursi roda, toilet disabilitas sampai kepada pembuatan jalur disabilitas dari area parkir disabilitas sampai kepada area pelayanan, ruang sidang dan toilet.

8) Pelayanan Tamu (Air Minum Pengunjung)



Gambar 5.75. Jalur dan Fasilitas Disabilitas

9) Pelayanan Tamu (Terminal Charger dan Rak Majalah Pengunjung)



Gambar 5.76. Pelayanan Tamu

10) Layanan Pengaduan dan Keluhan (LADUKU)

Kegunaan dari inovasi ini adalah memberikan keleluasan kepada masyarakat pencari keadilan untuk melayangkan pengaduan ataupun keluhan terkait dengan Pelayanan yang diterimanya, selanjutnya pengaduan ataupun keluhan tersebut akan langsung ditindaklanjuti.



Gambar 5.77. Pelayanan Tamu

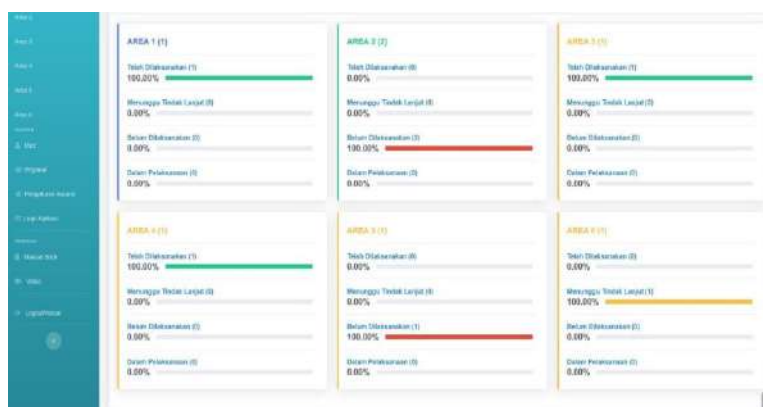
- 11) Sistem Informasi Monitoring Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (SIMO-AMPUH)



Gambar 5.78. Aplikasi SIMO-AMPUH

Inovasi ini merupakan Aplikasi yang berisikan seluruh dokumen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri Labuha, yang mana dapat dijadikan rujukan bagi Pimpinan Pengadilan untuk melakukan Monitoring dan evaluasi, sehingga Dokumen Ampuh Pengadilan Negeri Labuha menjadi lengkap dan valid.

12) Sistem Informasi Monitoring Pembangunan Zona Integritas (SIMO-ZI)



Gambar 5.79. Aplikasi SIMO-ZI

Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pembangunan Zona Integritas (SIMO-ZI) merupakan Aplikasi yang berisikan seluruh dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, yang mana dapat dijadikan rujukan bagi Pimpinan Pengadilan untuk melakukan Monitoring dan evaluasi, sehingga Dokumen Pembangunan ZI Pengadilan Negeri Labuha menjadi lengkap dan valid.

13) Layanan Panggilan Sidang (LA KORO SIDANG)



Gambar 5.80. Aplikasi PangSid

Layanan Panggilan Sidang (LA KORO SIDANG) Merupakan aplikasi yang dibuat untuk mempermudah koordinasi antara petugas Piket Sidang, Panitera Pengganti dan Majelis Hakim yang akan melakukan persidangan, sehingga jalannya persidangan dapat diatur dengan baik.

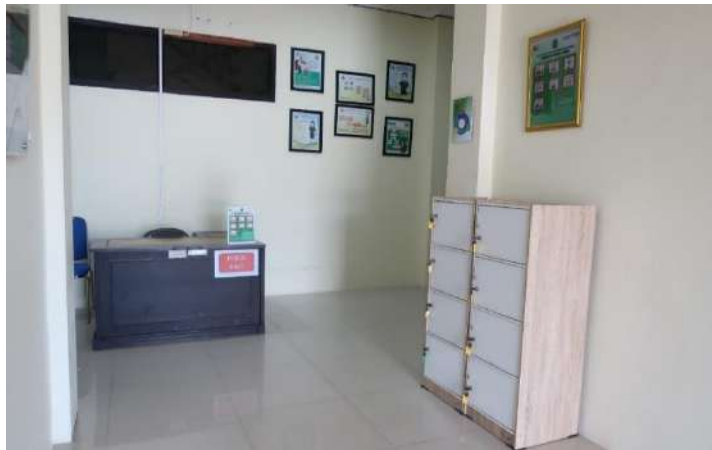
14) Layanan Informasi Persidangan (LINDA)



Gambar 5.81. Layanan LINDA

Kegunaan dari inovasi ini adalah memberikan keleluasan kepada masyarakat pencari keadilan untuk mengetahui informasi persidangan lebih mudah melalui Scan Barcode.

15) Loker Pengunjung



Gambar 5.82. Loker Pengunjung

Kegunaan dari Loker Pengunjung adalah tempat penyimpanan barang-barang pribadi masyarakat pencari keadilan.

16) Pojok Rapi



Gambar 5.83. Pojok

17) Pintu Khusus Penuntut Umum dan Tahanan



Gambar 5.84. Pojok

6. Pengadilan Negeri Sanana

Adapun Inovasi pada Pengadilan Negeri Sanana Kelas II, terkait layanan publik antara lain sebagai berikut :

- a) Menyediakan layanan TV/layar informasi dan papan informasi hakim dan pegawai sebagai sarana informasi penanganan dan penyelesaian perkara yang dapat diakses oleh pencari keadilan maupun kepada masyarakat secara umum;
- b) Sebagai pelayanan publik Pengadilan Negeri Sanana juga memfasilitasi kebutuhan pelayanan pusat berupa Call Center 0929-2112724 dalam melayani kebutuhan masyarakat



Gambar 5.85. Fasilitas Informasi Hakim dan Pegawai

- c) Menyediakan kursi roda sebagai alat bantu bagi tamu disabilitas yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Sanana;



Gambar 5.86. Kursi Roda untuk disabilitas pada Pengadilan Negeri Sanana



Gambar 5.87. Guiding blocks sebagai alat bantu penunjuk arah bagi tuna Netra pada Pengadilan Negeri Sanana



Gambar 5.88. Kursi pengunjung pada Pengadilan Negeri Sanana



Gambar 5.89. Fasilitas Genset kantor pengadilan negeri



Gambar 5.90. Ruang Pengunjung



Gambar 5.91. Penunjuk arah bagi para pengunjung pencari keadilan



Gambar 5.92. Denah Kantor Pengadilan Negeri Sanana

- d) Menyediakan bingkisan sebagai kompensasi atas keterlambatan layanan;



Gambar 5.93. Lemari Kompensasi

- e) Menyediakan air minum dan media baca berupa koran dan majalah di ruang tamu terbuka;

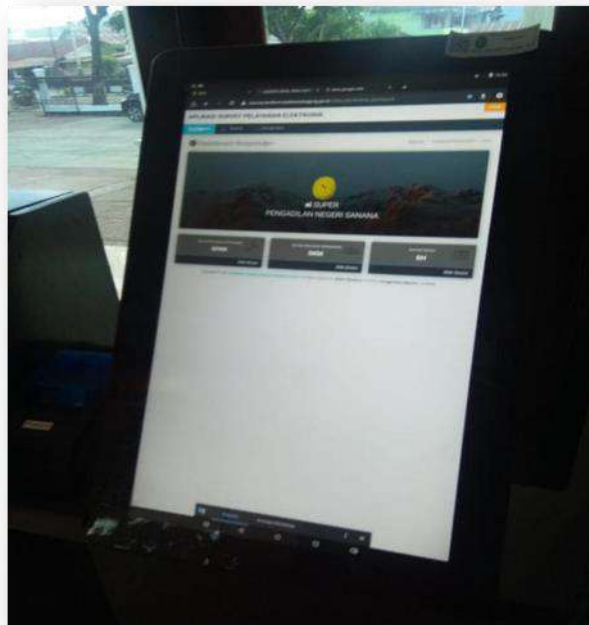


Gambar 5.94. Pojok Baca



Gambar 5.95. Galon Minum untuk pengunjung

- f) Aplikasi survey kepuasan masyarakat, lewat monitor touch screen dan lewat website Pengadilan Negeri Sanana;



Gambar 5.96. Tab survey untuk pengunjung

- g) Menyediakan pamflet/brosur pelayanan dalam hal pelayanan Informasi kepada masyarakat;



Gambar 5.97. Brosur Pelayanan untuk pengunjung

- h) Memfasilitasi WiFi gratis bagi pengunjung dan kotak pengaduan dan saran



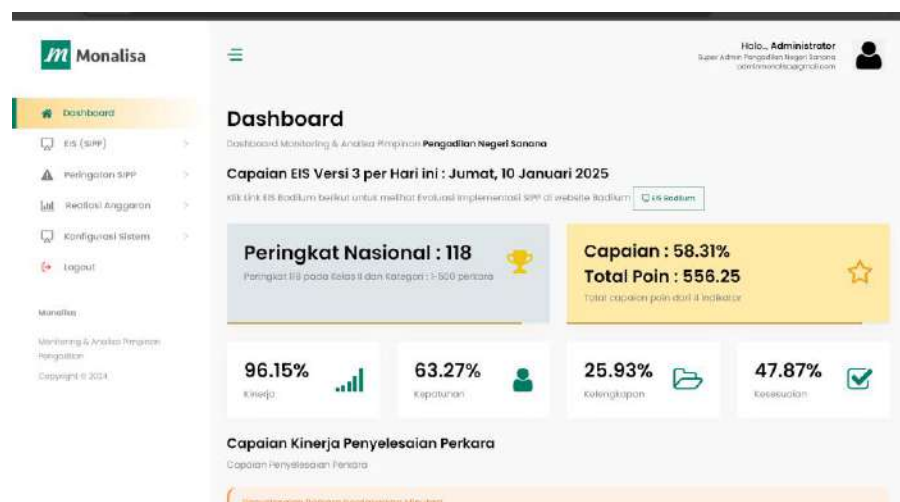
Gambar 5.98. Kotak saran / aduan

Adapun Inovasi Pelayanan Eksternal Pengadilan Negeri Sanana, yaitu :

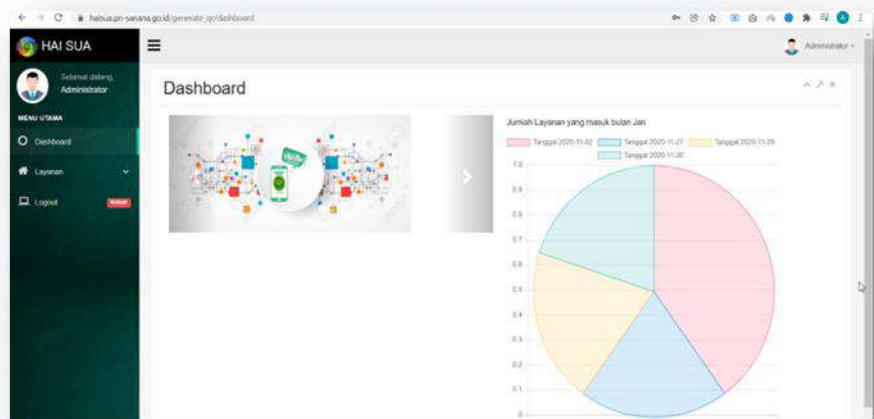
“Monalisa” (Monitoring & Analisa Pimpinan)

Virtual assistant pada Pengadilan Negeri Sanana dikemas dengan nama Monalisa (Monitoring & Analisa Pimpinan), Monalisa akan menampilkan berbagai informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna, dengan diawali tampilan dashboard berupa informasi Capaian EIS, Capaian kinerja penyelesaian perkara serta penyerapan anggaran yang terhubung langsung melalui server lokal dan server cloud. Fitur lainnya yaitu mengirimkan pesan kepada nomor assistant virtual tersebut maka secara otomatis akan dibalas dan menampilkan menu menu untuk pengguna memilih informasi mana yang dibutuhkan, pesan tersebut berjalan pada *platform social media* Whatsapp, dengan fitur-fiturnya sebagai berikut :

- Informasi detail Capaian EIS
- Informasi Capaian kinerja penyelesaian perkara
- Informasi Penyerapan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03



Gambar 5.99. Monalisa (Monitoring & Analisa Pimpinan)

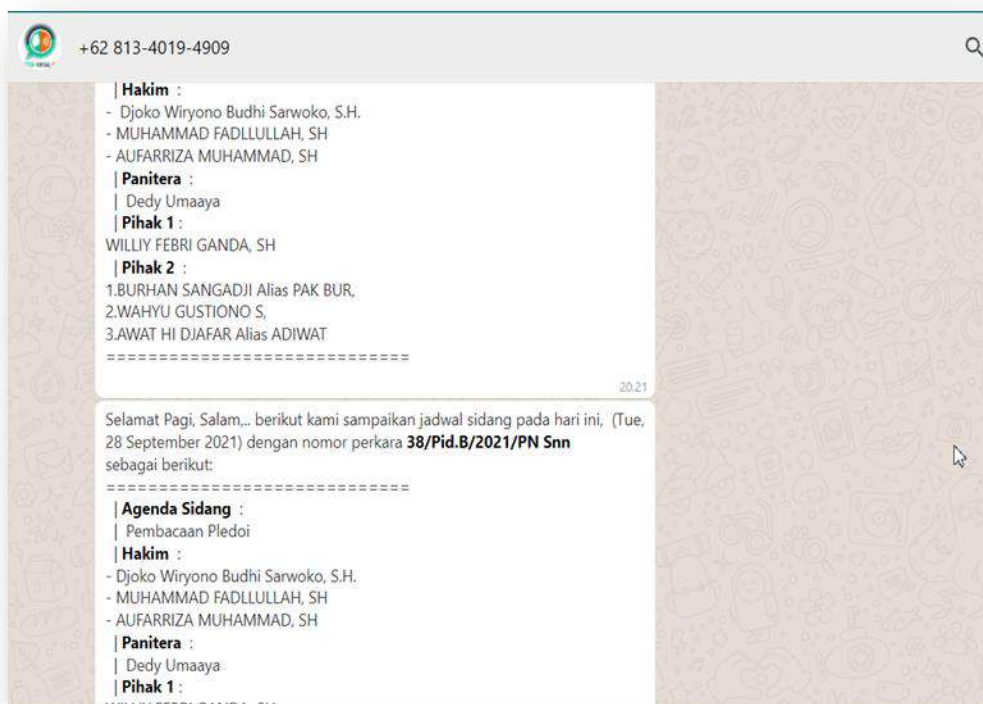


Gambar 5.100. Panel admin Haisua

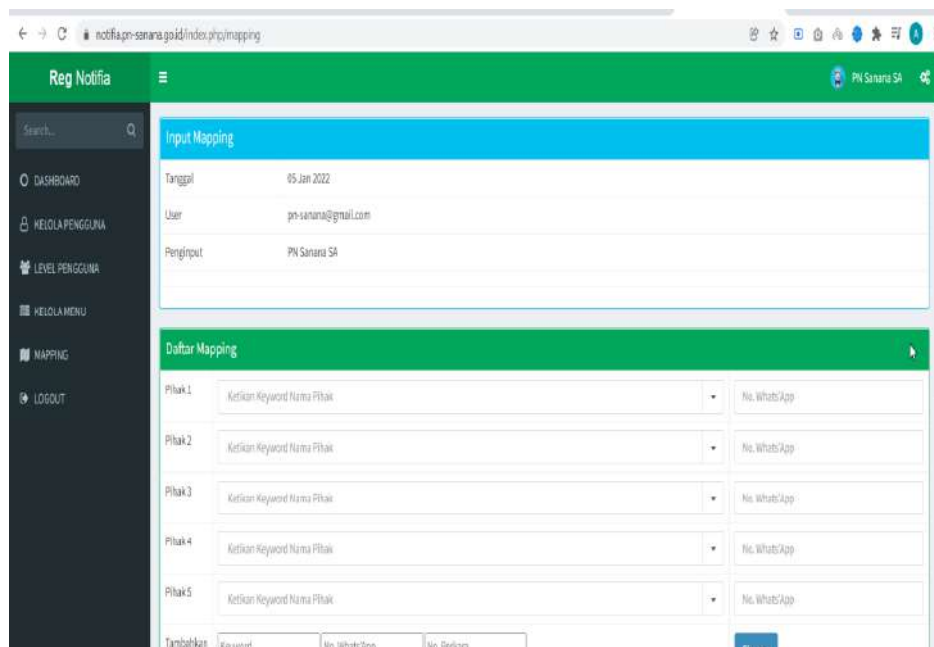
Pengingat Sidang “Notifia”

Notifia merupakan nama system informasi yang akan mengirimkan informasi tentang jadwal sidang dihari tersebut kepada masyarakat yang mendaftarkan nomornya, pihak kejaksaan, hakim dan para pihak yang bersidang, pesan tersebut dikirimkan secara otomatis dan terjadwal oleh server dan dikirimkan melalui whats'app kepada pihak yang bersidang dihari itu. Adapun fitur pada notifia berisi informasi sebagai berikut:

- Pesan whats'app berisi jadwal sidang, nama pihak yang bersidang, password dan id zoom untuk sidang online.
- Registrasi fitur pengingat sidang
- Kirim ulang jadwal sidang



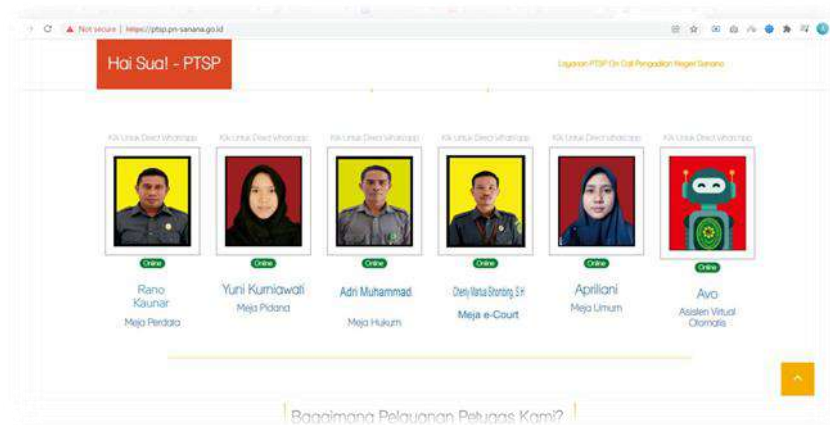
Gambar 5.101. Peningkat sidang Notifia



Gambar 5.102. Panel Admin Notifia

PTSP Virtual

Pengadilan Negeri Sanana memiliki pelayanan langsung jarak jauh dengan mengunjungi sub domain www.ptsp.pn-sanana.go.id.

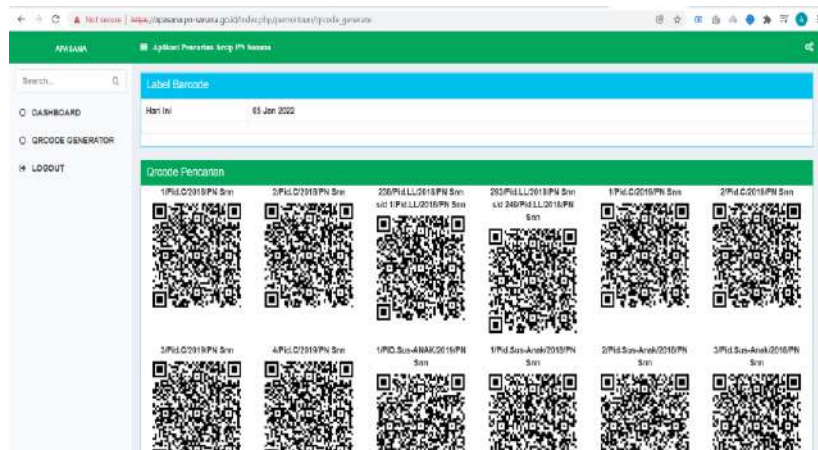


Gambar 5.103. Direct service PTSP

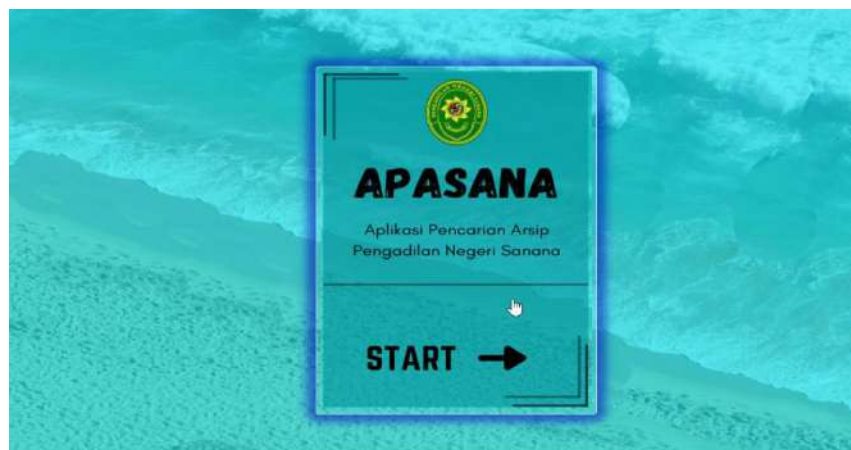
INOVASI PELAYANAN INTERNAL PENGADILAN NEGERI SANANA

1) Aplikasi Pencarian Arsip Pengadilan Negeri Sanana (APASANA)

Apasana merupakan sebuah sistem informasi yang berfungsi untuk memetakan arsip perkara pada ruang arsip, dengan memetakan nomor rak dan lokasi berkas kemudian dicatat dalam basis data, maka pengguna APASANA dapat menemukan detail arsip yang diinginkan dengan scan QR Code yang telah degenerate atau memasukan pencarian melalui kotak pencarian



Gambar 5.104. Panel Admin APASANA

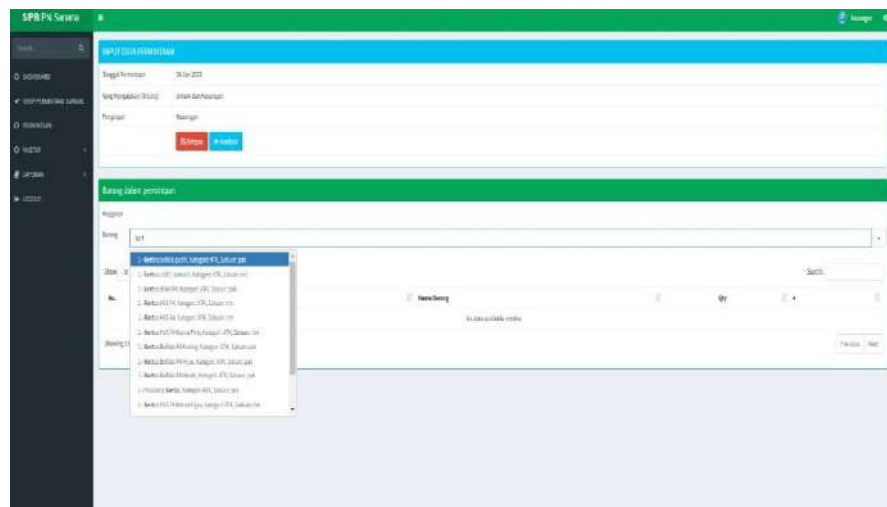


Gambar 5.22. Halaman Beranda depan APASANA

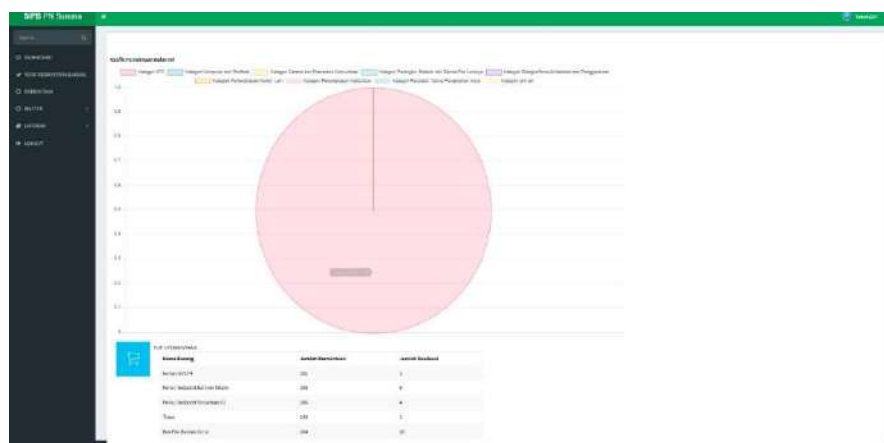
2) Sistem Informasi Permintaan Barang (SIPB)

Sistem Informasi Permintaan Barang merupakan sebuah sistem informasi yang menghasilkan output berupa Rekapitulasi Daftar Barang yang akan dibelanjakan, Rekapitulasi Permintaan Barang dari masing-masing Bagian dan Laporan Barang yang telah diterima oleh Bagian yang melakukan permintaan. SIPB digunakan oleh masing-masing bagian untuk melakukan permintaan barang pakai habis dengan menginput barang yang dibutuhkan dan menghasilkan rekapitulasi permintaan barang dari bagian tersebut, yang kemudian diverifikasi oleh user dari bagian Umum dan

Keuangan untuk kemudian barang tersebut dibelanjakan dan menghasilkan laporan barang menunggu pembelanjaan, setelah barang dibelanjakan dan didistribusikan ke bagian-bagian maka bagian yang menerima barang pakai habis tersebut melakukan verifikasi penerimaan sehingga menghasilkan laporan realisasi permintaan barang.



Gambar 5.105. Permintaan Barang per Bagian dengan SIPB



Gambar 5.106. Dashboard Pengguna SIPB

No	Status	Nama	No Telp	No Email
1	Selesai	Perangko, Nengsiy	021-4211111	Perangko.Nengsiy@gmail.com
2	Selesai	Perangko, Nengsiy	021-4211111	Perangko.Nengsiy@gmail.com
3	Selesai	Perangko, Nengsiy	021-4211111	Perangko.Nengsiy@gmail.com
4	Selesai	Perangko, Nengsiy	021-4211111	Perangko.Nengsiy@gmail.com
5	Selesai	Perangko, Nengsiy	021-4211111	Perangko.Nengsiy@gmail.com
6	Selesai	Perangko, Nengsiy	021-4211111	Perangko.Nengsiy@gmail.com
7	Selesai	Perangko, Nengsiy	021-4211111	Perangko.Nengsiy@gmail.com
8	Selesai	Perangko, Nengsiy	021-4211111	Perangko.Nengsiy@gmail.com
9	Selesai	Perangko, Nengsiy	021-4211111	Perangko.Nengsiy@gmail.com
10	Selesai	Perangko, Nengsiy	021-4211111	Perangko.Nengsiy@gmail.com

Gambar 5.107. Halaman Verifikasi Permintaan oleh User Umum dan Keuangan pada SIPB

7. Pengadilan Negeri Bobong

Pelayanan publik di Pengadilan Negeri Bobong bertujuan untuk memuaskan keinginan masyarakat pencari keadilan di Wilayah Hukumnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KMPAN) No 62 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pelayanan publik setidaknya mengandung sendi-sendi :

- 1) Kesederhanaan, dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;
- 2) Kejelasan yang mencakup;
- 3) Rincian biaya atau tarif pelayanan publik;
- 4) Prosedur/ tatacara umum, baik teknis maupun administrasi
- 5) Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;

- 6) Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika;
- 7) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yakni memberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas;
- 8) Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
- 9) Dokumentasi PTSP, Ruang Tumbu Terbuka, Toilet Difabel



Gambar 5.108. Ruang PTSP Pengadilan Negeri Bobong

10) Ruang Tamu Terbuka



Gambar 5.109. Ruang Tamu Terbuka Pengadilan Negeri Bobong

11) Toilet Disabilitas



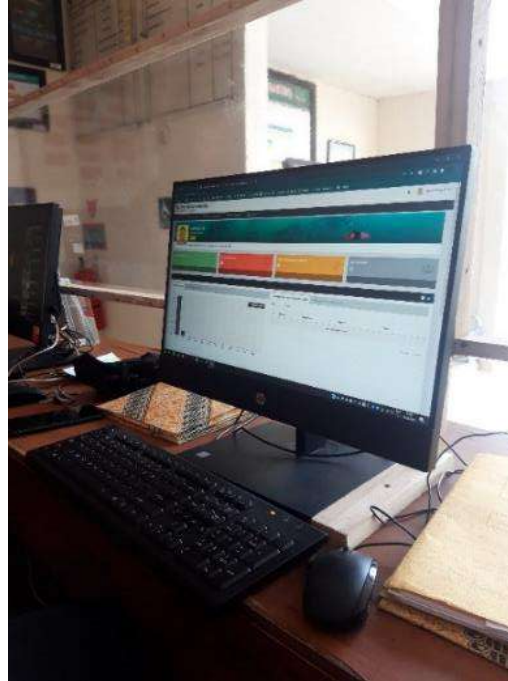
Gambar 5.110. Toilet Disabilitas

Aplikasi dari Inovasi pelayanan publik antara lain sebagai berikut :

- 1) Komputer Layanan sebagai sarana informasi penanganan dan penyelesaian perkara yang dapat diakses oleh pencari keadilan maupun kepada masyarakat secara umum;
- 2) Menyediakan kursi roda sebagai alat bantu bagi tamu disabilitas yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Bobong;
- 3) Menyedia Kursi Pengunjung Difabilitas untuk masyarakat pencari keadilan;
- 4) Menyediakan Toilet Pengunjung Difabilitas untuk masyarakat pencari keadilan;
- 5) Menyediakan Informasi Maklumat Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
- 6) Menyediakan sanitizer, masker dan alat pengukur suhu untuk para pengunjung dengan penerapan protocol kesehatan selama dalam masa pandemic Covid 19;
- 7) Menyediakan bingkisan sebagai kompensasi atas keterlambatan layanan;
- 8) Menyedian Nomor Antrian pelayanan untuk masyarakat pencari keadilan;
- 9) Menyediakan QR Code pamflet-pamflet/ brosur pelayanan dalam hal pelayanan Informasi kepada masyarakat;
- 10) Menyediakan CCTV untuk mengontrl kegiatan pelayanan masyarakat pencari keadilan.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik yang baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prisnsip efektif, efisien, inovasi

dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.



Gambar 5.111. Komputer Pelayanan



Gambar 5.112. Kursi Roda



Gambar 5.113. Kursi ruang tunggu khusus Difabel



Gambar 5.114. Toilet Difabel



Gambar 5.115. Maklumat Pelayan



Gambar 5.116. Bingkisan kompensasi atas keterlambatan layanan



Gambar 5.117. Bingkisan kompensasi atas keterlambatan layanan



Gambar 5.118. CCTV



Gambar 5.119. Waktu Pelayanan

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Kegiatan Pengawasan pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 28.KPT/W28-U/OT1.2/II/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pengawas Khusus pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Untuk Pelaksanaan Pengawasan masing-masing bidang dimaksud telah dilaksanakan setiap bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada masing-masing Bidang :

1. Kepaniteraan :
 - a. Kepaniteraan Perdata
 - b. Kepaniteraan Pidana
 - c. Kepaniteraan Tipikor
 - d. Kepaniteraan Hukum
2. Kesekretariatan :
 - a. Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
 - b. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
 - c. Sub. Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
 - d. Sub. Bagian Keuangan Dan Pelaporan.
 - e. Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Dari hasil temuan Pengawasan tersebut diatas telah ditindak lanjuti, namun masih ada beberapa temuan yang belum ditindak lanjuti sepanjang temuan dalam

kendali internal bagian, sedangkan temuan-temuan yang bersifat fisik sarana dan kekurangan SDM adalah diluar kendali bagian, sehingga tidak dapat ditindak lanjuti dalam waktu cepat dan tepat, tetapi penyelesaian temuan merupakan kendali bidang kesekretariatan (Sekretaris) dalam pengadaan barang / jasa dan SDM dalam kendali Kepegawaian;

Untuk Pengawasan pada Pengadilan Negeri dalam Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara terdapat 6 (enam) Pengadilan Negeri pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan. Pengawasan 2 (dua) kali kegiatan oleh Hakim Pengawas Daerah yang dilaksanakan secara langsung maupun melalui zoom meeting sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 27/KPT.W28-U/OT1.2/II/2024 tanggal 2 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Daerah Untuk Melaksanakan Pengawasan di Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yaitu masing-masing pada :

- 1) Pengadilan Negeri Ternate, dengan Surat Tugas Nomor: 702/KPT.W28-U/ST.KP7.1/IV/2024 tanggal 18 April 2024 dan Nomor: 1643/KPT.W28-U/ST.KP7.1/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: Nomor 27/KPT.W28-U/OT1.2/II/2024 tanggal 2 Januari 2024, LHP telah di kirim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan Surat Nomor: 1112/KPT.W28-U/HK.00/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.
- 2) Pengadilan Negeri Soasio, dengan Surat Tugas Nomor : 707/KPT.W28-U/ST.KP7.1/IV/2024 tanggal 18 April 2024 dan Nomor : 1460/KPT.W28-U/ST.KP7.1/VII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 27/KPT.W28-U/OT1.2/II/2024

tanggal 2 Januari 2024, LHP telah di kirim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dengan Surat Nomor: 1112/KPT.W28-U/HK.00/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.

- 3) Pengadilan Negeri Tobelo, dengan Surat Tugas Nomor : 704/KPT.W28-U/ST.KP7.1/IV/2024 tanggal 18 April 2024 dan Nomor : 1461/KPT.W28-U/ST.KP7.1/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 27/KPT.W28-U/OT1.2/II/2024 tanggal 2 Januari 2024, LHP telah dikirim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dengan Surat Nomor: 1112/KPT.W28-U/HK.00/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.
- 4) Pengadilan Negeri Sanana berdasarkan Surat Tugas Nomor: 800/KPT.W28-U/ST.KP7.1/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 dan Nomor: 1466/KPT.W28-U/ST.KP7.1/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 27/KPT.W28-U/OT1.2/II/2024 tanggal 2 Januari 2024. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah dikirim ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui surat Nomor: 1112/KPT.W28-U/HK.00/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.
- 5) Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Tugas Nomor: 797/KPT.W28-U/ST.KP7.1/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 dan Nomor: 1462/KPT.W28-U/ST.KP7.1/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 27/KPT.W28-U/OT1.2/II/2024 tanggal 2 Januari 2024, Laporan Hasil pemeriksaan telah dikirim pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui surat Nomor: 1112/KPT.W28-U/HK.00/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.

- 6) Pengadilan Negeri Bobong berdasarkan surat tugas Nomor: 799/KPT.W28-U/ST.KP7.1/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 dan Nomor: 1467/KPT.W28-U/ST.KP7.1/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 27/KPT.W28-U/OT1.2/II/2024 tanggal 2 Januari 2024, dan Laporan Hasil Pemeriksaan telah di kirim pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui surat Nomor: 1112/KPT.W28-U/HK.00/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara sudah sesuai dengan petunjuk dan pedoman pengawasan berdasarkan ketentuan Buku IV Edisi Tahun 2007 Mahkamah Agung RI.

Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan adalah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri masing-masing yaitu:

1. Pengadilan Negeri Ternate telah menunjuk kordinator Kimwasbidang dan Kimwasmat dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 2546/KPN.W28-U/SK.PW1/XIII/2024, Tanggal 2 Desember 2024.
2. Pengadilan Negeri Soasio telah menunjuk kordinator Kimwasbidang dan kimwasmat dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor. 62/KPN.W28-U1/KP.10.10/II/2024, Tanggal 4 Januari 2024.
3. Pengadilan Negeri Tobelo telah menunjuk kordinator Kimwasbidang dan kimwasmat dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 233/KPN.W28-U4/SK/PW1/I/2024, Tanggal 11 Januari 2024.

4. Pengadilan Negeri Labuha telah menunjuk kordinator Kimwasbidang dan kimwasmat dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 177/KPN.W28-U3/HK1.2.5/XI/2024, Tanggal 1 November 2024.
5. Pengadilan Negeri Sanana telah menunjuk kordinator Kimwasbidang dan kimwasmat dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor: 106/W28-U5/KPN/SK/I/2024 Tanggal 4 Januari 2024.
6. Pengadilan Negeri Bobong telah menunjuk kordinator Kimwasbidang dan kimwasmat dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor: 244/KPN.W28-U6/PW1.1/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024.

Untuk Pengadilan Negeri yang tidak ada Wakil Ketua, maka kordinator Kimwas dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yaitu, Pengadilan Negeri Labuha, Pengadilan Negeri Sanana dan Pengadilan Negeri Bobong, Kimwas telah melaksanakan tugas pengawasan jika ada temuan, maka membuat Kertas Kerja Pengawasan yang memuat kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi, dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri masing-masing.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah kurangnya hakim Pengadilan Negeri tidak proposional dengan bidang tugas yang ada pada Satuan Kerja, kekurangan hakim tiap Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Ternate Jumlah hakim 7 Orang hakim Karier dan 4 Orang hakim Ad Hoc, dengan volume perkara sebanyak 835 perkara,

dan ruang lingkup pengawasan terdiri dari 5 bidang kepaniteraan dan 3 bidang kesekretariatan ditambah 1 bidang wasmat.

2. Pengadilan Negeri Soasio, jumlah Hakim 8 orang, volume perkara sebanyak 135 perkara dan ruang lingkup pengawasan terdiri dari 3 bidang kepaniteraan, dan 3 bidang kesekretariatan dan 1 bidang wasmat.
3. Pengadilan Negeri Tobelo jumlah Hakim 6 orang, volume perkara sebanyak 164 perkara, dan ruang lingkup pengawasan terdiri dari 3 bidang kepaniteraan, 3 bidang kesekretariatan dan 1 bidang wasmat.
4. Pengadilan Negeri Labuha Hakim 5 orang volume, perkara sebanyak 220 perkara dan ruang lingkup pengawasan terdiri dari 3 bidang kepaniteraan, 3 bidang kesekretariatan dan 1 bidang wasmat.
5. Pengadilan Negeri Sanana Hakim 6 orang volume perkara sebanyak 103 perkara dan ruang lingkup pengawasan terdiri dari 3 bidang kepaniteraan, 3 bidang kesekretariatan dan 1 bidang wasmat.
6. Pengadilan Negeri Bobong Hakim 6 orang volume perkara sebanyak 14 perkara dan ruang lingkup pengawasan terdiri dari 3 bidang kepaniteraan, 3 bidang kesekretariatan dan 1 bidang wasmat.

Hakim Pengawas Bidang tiap Pengadilan Negeri se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara semuanya merangkap tugas pengawasan yaitu 1 orang hakim 2 bidang pengawasan bahkan 3 bidang pengawasan yaitu Pengadilan Negeri Tobelo, Pengadilan Negeri Sanana, Pengadilan Negeri Labuha dan Pengadilan Negeri Bobong oleh karena kondisi demikian pelaksanaan tugas pengawasan belum maksimal, namun masih bisa berjalan.

B. EVALUASI

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menetrapkan pola Evaluasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan melihat Kondisi, kriteria, sebab akibat dan rekomendasi. Namun dalam hal Pengawasan rutin bulanan, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mengembangkan model evaluasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 28/KPT.W28-U/OT1.2//2024, Tanggal 2 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pengawas Khusus pada pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Untuk evaluasi Kinerja pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dilakukan secara berjenjang, mulai dari unit terkecil yaitu para kasubag dan Panmud beserta staf yang didampingi oleh masing-masing hakim pengawas bidang, kemudian dengan Kabag dan para kasubag, dan selanjutnya dengan Panitera dan sekretaris kemudian akhirnya diplenokan dengan pimpinan rapat oleh Ketua pengadilan Tinggi Maluku Utara

Dalam Rapat evaluasi Kinerja Pleno tersebut disamping membahas hasil rapat berjenjang dan laporan dari masing-masing sub baguan juga membahas Hasil dari monitoring dan evaluasi hakim tinggi pengawas bidang.

Dari hasil temuan baik pada Pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Bidang maupun Pengawas Daerah telah dilaksanakan evaluasi dan tindak lanjut. Disamping itu juga pada sidang Pleno tersebut, juga dilakukan evaluasi terhadap pembangunan Zona integritas dan Evaluasi terhadap sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2024, dengan pengukuran Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 yaitu Sasaran Strategis, Indikator Kinerja 3an Target dengan Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan dan Target sesuai pagu anggaran peningkatan manajemen peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, maka pada Bab ini Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri di bawahnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Keadaan perkara tersebut, berdasarkan rencana kinerja tahun 2024, dengan sasaran strategis dan indikator kinerja dengan target 100% dan program kegiatan dengan target perkara berdasarkan realisasi dan capaian tahun 2024, perkara yang masuk di Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2024, ada 135 perkara dan yang sudah putus ada 133 perkara, sedangkan yang sisanya 2 perkara baru masuk di akhir bulan Desember 2024, sehingga belum bisa diselesaikan dalam tahun 2024, Dengan demikian realisasi dan capaian tahun 2024 ini yaitu 98,5% masuk dalam kategori **Sangat Baik**, kalau dilihat dari penyelesaian perkara tepat waktu maka semua perkara diselesaikan tepat waktu kurang dari 3 bulan sehingga kinerjanya mencapai target, yaitu 100%.

Sedangkan diukur berdasarkan peningkatan manajemen peradilan dengan pagu anggaran rencana kinerja 2024 DIPA 03, target 76 perkara, khusus untuk perkara Pidana dan Tipikor ada 94 perkara, maka realisasi capaian kinerja yaitu 123 % masuk dalam kategori **Baik Sekali**, sedangkan untuk realisasi DIPA 03 itu sendiri adalah 99,99%, realisasi tertinggi yang pernah dicapai Pengadilan Tinggi Maluku utara, Sedangkan realisasi untuk DIPA 01, mencapai 99,56.

2. Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Pada dasarnya penyelesaian perkara tepat waktu Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah 100% karena tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan untuk tingkat pertama yaitu waktu maksimal 5 (lima) Bulan, namun jika dihitung dengan jumlah perkara yang masuk, dengan yang putus serta sisa yang ada yang belum melewati batas waktu tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Pengadilan Negeri Ternate: jumlah perkara masuk Perdata, Pidana dan Tipikor sebanyak 583 perkara dan jumlah perkara putus 556 perkara maka capaian kinerja adalah 95.37%.
- b) Pengadilan Negeri Soasio: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 176 perkara dan jumlah perkara putus 144 perkara maka capaian kinerja adalah 81,82%.
- c) Pengadilan Negeri Tobelo: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 318 perkara dan jumlah perkara putus 284 perkara maka capaian kinerja adalah 89.31 %.

- d) Pengadilan Negeri Labuha: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 122 perkara dan jumlah perkara putus 110 perkara maka capaian kinerja adalah 90,16 %.
- e) Pengadilan Negeri Sanana: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 130 perkara dan jumlah perkara putus 115 perkara maka capaian kinerja adalah 88.46%.
- f) Pengadilan Negeri Bobong: jumlah perkara masuk perdata dan pidana sebanyak 27 perkara dan jumlah perkara putus 27 perkara maka capaian kinerja adalah 100 %.

B. REKOMENDASI

Bahwa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas fungsi peradilan baik pada tingkat Banding maupun pada tingkat Pertama adalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), untuk Pengadilan Tinggi Maluku Utara kekurangan Pegawai, setiap kepaniteraan hanya 2 (dua) staf sehingga implementasi pelaksanaan pelayanan melalui PTSP belum maksimal. Sedangkan untuk Pengadilan Negeri kekurangan Hakim, sehingga implementasi penyelesaian perkara belum optimal, juga dalam tugas pengawasan bidang rata-rata merangkap 2 (dua) bidang sehingga tidak maksimal.

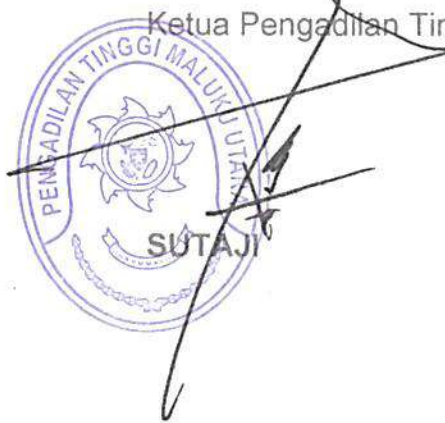
Berdasarkan hal tersebut, maka kami rekomendasikan kepada pimpinan pada Eselon I Mahkamah Agung RI. Agar dalam penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, agar ditempatkan pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Dan dalam penempatan Calon Hakim

diangkat menjadi Hakim agar ditempatkan pada Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Bahwa kendala dan hambatan lain adalah kekurangan sarana prasarana pengolahan data berupa komputer dan Laptop serta printer. Oleh karena itu melalui laporan ini kami rekomendasikan kepada pimpinan Eselon I Mahkamah Agung Cq. Biro Perencanaan dan Organisasi, kiranya usulan Rencana Kegiatan Anggaran/Kementerian Lembaga (RKA/KL) Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya dapat dipertimbangkan dan disetujui, karena usulan kami sesuai kebutuhan riil dengan skala prioritas.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan tahunan 2024 ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja manajemen peradilan pada masa yang akan datang.

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Tinggi Maluku Utara. The stamp features a central emblem with a star and crescent, surrounded by the text "PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA" and "SUTAJI" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.